

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	12 Juni 2025	Periode Pelaksanaan HMETD	8 Januari 2026 – 22 Januari 2026
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	22 Desember 2025	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	12 Januari 2026 - 26 Januari 2026
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di:		Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	23 Januari 2026
Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Januari 2026	Tanggal Penjatahan atas Pemesanan Saham Tambahan	26 Januari 2026
Pasar Tunai	6 Januari 2026	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	28 Januari 2026
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD:		Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri II	8 Januari 2026
Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Januari 2026	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri II	
Pasar Tunai	7 Januari 2026	Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juli 2028
Tanggal Pencatatan dalam DPS yang berhak atas HMETD	6 Januari 2026	Pasar Tunai	13 Juli 2028
Tanggal Distribusi HMETD	7 Januari 2026	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri II	13 Juli 2026
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	8 Januari 2026	Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri II	13 Juli 2028
Awal Perdagangan HMETD	8 Januari 2026	Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri II	13 Juli 2028
Akhir Perdagangan HMETD	22 Januari 2026		

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



[Signature]

[Signature]

[Signature]

PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP dan penyewaan Fiber Optic melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat :
Gedung Cyber 1, Lantai 10
Jl. Kuningan Barat No.8,
Jakarta Selatan 12710
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

Kantor Operasional :
Ruko Rich Palace
Jl. Meruya Ilir Raya No. 36 – 40 Blok A1
Jakarta Barat 11630
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Perseroan berencana untuk menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 57,14% (lima puluh tujuh koma satu empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Januari 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD ini sebanyak-banyaknya Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD ini akan dicatatkan di BEI.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.304.000.000 (dua miliar tiga ratus empat juta) lembar Waran Seri II yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 10,29% (sepuluh koma dua sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I. Waran Seri II diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang melaksanakan haknya dalam PMHMETD I. Setiap pemegang HMETD yang melaksanakan 50 (lima puluh) lembar saham baru Perseroan dalam PMHMETD I berhak memperoleh 9 (sembilan) lembar Waran Seri II dimana setiap 1 (satu) lembar Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 13 Juli 2026 – 13 Juli 2028, Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri II tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri II tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri II sebanyak-banyaknya Rp 691.200.000.000,- (enam ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus juta Rupiah).

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I Perseroan, bahwa PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara ("AKUN") selaku pemegang 5.360.707.200 (lima miliar tiga ratus enam puluh tiga ratus tujuh ribu dua ratus) lembar saham atau setara dengan 60,62% (enam puluh koma enam dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan per tanggal 15 September 2025 menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperoleh yaitu sejumlah 7.147.609.600 (tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus) HMETD yang dimilikinya melalui Surat Pernyataan tanggal 23 September 2025 dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sehingga keseluruhan AKUN akan melaksanakan Pelaksanaan HMETD sejumlah Rp1.786.902.400.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar Sembilan ratus dua juta empat ratus ribu Rupiah).

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham porsi Publik maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No.1.329 tanggal 19 September 2025 yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, AKUN ("Pembeli Siaga") telah menyatakan sanggup menjadi Pembeli Siaga jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 5.652.377.067 (lima miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tujuh) saham pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp1.413.094.266.750,- (satu triliun empat ratus tiga belas miliar Sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI DALAM ATAU DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK TANGGAL 8 JANUARI 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL 22 JANUARI 2026. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 12 JANUARI 2026 SAMPAI DENGAN 26 JANUARI 2026. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 22 JANUARI 2026 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERIZINAN, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB 6 PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN (DILUSI) MAKSIMUM SEBESAR 57,14% (LIMA PULUH TUJUH KOMA SATU EMPAT PERSEN) DARI TOTAL PORSI KEPEMILIKAN SAHAM DARI MASING-MASING PEMEGANG SAHAM PADA SAAT PELAKSANAAN HMETD .

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan surat No.57/INET-OJK/IX/2025 tanggal 26 September 2025 perihal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.32/2015") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.33/2015") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam UUP2SK.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	2
RINGKASAN	7
1. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I)	20
2. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I	34
3. PERNYATAAN UTANG	38
4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	45
5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	49
6. FAKTOR RISIKO	66
7. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	70
8. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	71
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	71
B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	71
C. KEGIATAN USAHA	71
D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	72
E. IZIN USAHA	76
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	82
G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	85
H. MANAJEMEN RISIKO	91
I. STRUKTUR ORGANISASI	93
J. SUMBER DAYA MANUSIA	94
K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	96
L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	97
M. INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN ANAK	99
N. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD I	106
O. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGUNAAN DANA	107
P. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	108
Q. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI	113
9. EKUITAS	130
10. KEBIJAKAN DIVIDEN	132
11. PERPAJAKAN	133
12. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA	135
13. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	137
14. TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN	139
15. PENYEBARAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT HMETD DAN FORMULIR	143
16. INFORMASI TAMBAHAN	144

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”	Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUP2SK yaitu: a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“BAE”	Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang melaksanakan PMHMETD I yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta.
“Bandwidth”	Berarti jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second (bps).
“Bapepam-LK”	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BEI”	PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia, dimana saham Perseroan dicatatkan.
“Daftar Pemesanan”	Daftar yang memuat nama-nama pemesan.
“DPS”	Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
“Efek”	Berarti surat berharga yaitu surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung

	<p>memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUPPSK.</p>
"Efektif"	<p>Berarti telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 74 UUPPSK yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: <ol style="list-style-type: none"> i. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau ii. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)"	Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham.
"FPPS"	Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
"Hari Bursa"	Hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
"Hari Kerja"	Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
"HMETD"	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang berarti hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada (eksisting) untuk membeli saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
"KSEI"	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam UU Pasar Modal.
"OJK"	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK ("UU OJK").
"Pemerintah"	Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Penawaran Umum"	Berarti kegiatan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan tahun 2025.
"Penitipan Kolektif"	Jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.

<p>“Pernyataan Penerbitan Waran Seri II” atau “PPW Seri II”</p>	<p>Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Sei II dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.330 tanggal 19 September 2025 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri II dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan efek Terlebih Dahulu I PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.268 tanggal 16 Oktober 2025 yang keduanya dibuat oleh Perseroan di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.</p>
<p>“Perjanjian Pembeli Siaga”</p>	<p>Berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.329 tanggal 19 September 2025 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan AKUN di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.</p>
<p>“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS”</p>	<p>Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.328 tanggal 19 September 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.267 tanggal 16 Oktober 2025 yang keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.</p>
<p>“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II” atau “PPAW Seri II”</p>	<p>Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.331 tanggal 19 September 2025 sebagaimana diubah dalam Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.269 tanggal 16 Oktober 2025 yang keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.</p>
<p>“Pernyataan Pendaftaran”</p>	<p>Berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya. Dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan sebelum melakukan Penawaran Umum atas saham-saham kepada Publik, berikut lampiran-lampirannya serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat sesuai ketentuan dalam UU Pasar Modal <i>juncto</i> POJK No. 32/2015).</p>
<p>“Perseroan”</p>	<p>Badan hukum yang akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I, yang dalam hal ini adalah PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk.</p>
<p>“Perusahaan Anak”</p>	<p>Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka.</p>
<p>“PMHMETD I”</p>	<p>Penawaran Umum Terbatas Saham Perseroan dengan menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dan harga pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.</p>
<p>“POJK No. 14/2022”</p>	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tanggal 14 Agustus 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.</p>

"POJK No. 17/2020"	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"POJK No. 30/2015"	Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 32/2015"	Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"POJK No. 33/2014"	Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 33/2015"	Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"POJK No. 55/2015"	Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"POJK No.15/2020"	Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
"POJK No. 42/2020"	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Point of Presence atau PoP"	Berarti suatu metode yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan nomor akses lokal di jaringan data umum.
"PPh"	Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan sesuai dengan ketentuan di negara Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia.
"Prospektus"	Setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 33/2015 yaitu prospektus ini.
"PT"	Perseroan Terbatas.
"Rekening Efek"	Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau pemegang rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
"Rp"	Mata uang Rupiah.
"RUPS"	Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
"Saham Baru"	Saham biasa yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini dalam jumlah sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dan harga pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
"Saham Lama"	Saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
"HMETD"	Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada

	Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
“USD”	Berarti Dolar Amerika Serikat.
“UUP2SK”	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
“Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM”	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 sebagaimana terakhir kali diubah dengan UUP2SK.
“Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT”	Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 4756 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41.
“Wi-fi”	Berarti teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi Internet berkecepatan tinggi.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

AKUN : Berarti PT Abadi Kreasi unggul Nusantara

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

DPS : Berarti PT Data Prima Solusindo
PFI : Berarti PT Pusat Fiber Indonesia
IAB : Berarti PT Internet Anak Bangsa
GPI : Berarti PT Garuda Prima Internetindo

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta risiko usaha, yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-002586.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007821.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 3645 serta Tambahan BNRI No. 19 tanggal 10 Januari 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.670 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253540 tanggal 12 Desember 2025, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0281104.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Desember 2025 ("**Akta Perseroan No. 1.670/2025**"), yang mana berdasarkan Akta Perseroan No. 1.670/2025 para pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan portepel dan perubahan isi Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.

(Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perseroan No. 1.670/2025 selanjutnya disebut juga "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di dalam bidang (i) Informasi dan Komunikasi; dan (ii) Aktivitas Keuangan dan Asuransi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

1) **Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi – KBLI 61994**

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Caf dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.

2) **Internet Service Provider – KBLI 61921**

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk- mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) **Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel - KBLI 61100**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro- atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya- yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas -transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari

pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator-infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan -bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi -data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

2) Jasa Sistem Komunikasi Data - KBLI 61922

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan.

3) Jasa Interkoneksi Internet (NAP) - KBLI 61924

Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses- dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan- trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

4) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya - KBLI 62090

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

5) Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

I. UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2016 di Jakarta. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan bergerak di bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP dan penyewaan Fiber Optic melalui Perusahaan anak.

Visi Perseroan adalah:

“Menjadi Perusahaan Telekomunikasi dan Mengembangkan Infrastruktur Digital di Indonesia.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :

- Memberikan solusi yang akurat dan cepat terkait kebutuhan pelanggan;
- Menjadikan perusahaan yang selalu mengikuti perkembangan jaman untuk kebutuhan pelanggan;
- Memberikan fleksibilitas dalam memberikan solusi kepada pelanggan;
- Menjadikan lingkungan kerja yang kreatif dan produktif bagi seluruh karyawan; dan
- Menjadikan perusahaan yang bernilai lebih bagi seluruh pemegang saham dan karyawan.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, sebagai berikut :

1. **SINERGI.** Mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang saat ini maupun yang akan datang untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan usaha yang sehat.
2. **FOKUS.** Mengedepankan dan mendedikasikan diri pada pengembangan ICT yang komprehensif dan transparan.
3. **INTEGRITAS.** Mampu mewujudkan keinginan pelanggan dengan konsep duduk bersama dalam lingkup persoalan.
4. **CUSTOMER SATISFACTION.** Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi kebutuhan pengguna jasa, baik internal maupun eksternal secara tulus dan memuaskan.
5. **EXCELLENCE.** Berorientasi pada kepuasan dan keinginan pelanggan dengan mengedepankan ketepatan kualitas dan hasil yang memuaskan.

II. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan dan Perusahaan anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
2. Fleksibel dalam memberikan kebutuhan pelanggan.
3. Didukung oleh tim yang handal dan berpengalaman di bidang digital teknologi.
4. Pasar yang luas dan tersebar baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.
5. Perseroan memiliki pelanggan yang terdiversifikasi.

III. KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak di bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP dan penyewaan Fiber Optic melalui Perusahaan anak. Perseroan saat ini memiliki 4 (empat) Perusahaan anak dengan kepemilikan langsung.

Berikut adalah data mengenai Perusahaan Anak milik Perseroan :

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	PT Data Prima Solusindo	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2022	Kabupaten Tangerang	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%
2	PT Pusat Fiber Indonesia	Perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, aktivitas professional, ilmiah dan teknis	2022	2022	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%
3	PT Internet Anak Bangsa	Perdagangan besar, konstruksi sipil, konstruksi khusus, konstruksi gedung	2025	2025	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99%
4	PT Garuda Prima Internetindo	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2025	Bali	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Perusahaan anak dibandingkan dengan pendapatan, laba (rugi) sebelum pajak, jumlah aset dan jumlah liabilitas dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025:

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap pendapatan neto	Kontribusi terhadap Laba (rugi) sebelum pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
Perseroan	17,56%	3,19%	32,25%	79,14%
DPS	6,60%	0,01%	9,85%	14,58%
PFI	74,57%	97,83%	57,30%	5,72%
IAB	1,28%	-1,03%	0,60%	0,56%
GPI*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

*Keterangan: Pelaksanaan akuisisi GPI oleh Perseroan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 sehingga kontribusi GPI belum terkonsolidasi pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perkembangan Teknologi

Prospek usaha bisnis internet ke depan sangat cerah dan terus mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Transformasi digital di berbagai sektor mulai dari pendidikan, perbankan, kesehatan, e-commerce, hingga industri kreatif telah mendorong peningkatan kebutuhan akan konektivitas yang cepat, stabil, dan berkapasitas tinggi. Penerapan teknologi seperti 5G, Wi-Fi 7, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), cloud computing, dan edge computing semakin memperluas peluang bisnis internet, tidak hanya sebagai penyedia koneksi tetapi juga sebagai penyedia layanan bernilai tambah seperti solusi smart home, platform digital, layanan data center, hingga cyber security. Selain itu, tren digital lifestyle yang mencakup kerja jarak jauh, konten streaming, smart city, dan kendaraan otonom turut menciptakan permintaan besar terhadap layanan internet berkualitas tinggi.

Pertumbuhan pengguna fixed broadband atau internet tetap di Indonesia pada tahun 2025 meningkat pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga yang berlangganan fixed broadband naik dari sekitar 27,40% pada 2024 menjadi 38,70% di 2025, sebuah lonjakan yang cukup signifikan.

Perkembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)

Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) merupakan tulang punggung utama infrastruktur telekomunikasi global, termasuk Indonesia. Seiring dengan ledakan trafik data akibat transformasi digital, cloud computing, streaming, IoT, dan 5G, permintaan terhadap kapasitas SKKL terus meningkat tajam. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, sangat bergantung pada SKKL untuk menghubungkan wilayah-wilayah terluar dan mendukung konektivitas nasional. Selain itu, secara geografis Indonesia berada di jalur strategis antara Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australia, menjadikannya lokasi ideal untuk lintasan kabel laut internasional. Prospek usaha SKKL di Indonesia juga didorong oleh rencana pembangunan dan penguatan infrastruktur digital oleh pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Palapa Ring dan inisiatif perluasan jaringan ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Prospek usaha kontraktor Fiber To The Home (FTTH)

Prospek usaha kontraktor FTTH (Fiber To The Home) di Indonesia saat ini sangat menjanjikan dan diproyeksikan akan terus bertumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan. Dari sisi pasar, Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk dengan penetrasi fixed broadband yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia, sehingga ruang ekspansi masih sangat besar. Pemerintah juga mendorong pemerataan akses digital melalui berbagai program infrastruktur telekomunikasi dan digitalisasi daerah, yang membuka peluang besar bagi perusahaan kontraktor untuk terlibat dalam pembangunan jaringan di kota-kota besar maupun wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, pertumbuhan kawasan perumahan baru, apartemen, kawasan industri, dan pusat bisnis yang membutuhkan jaringan FTTH sejak tahap konstruksi memberikan peluang kerja sama jangka panjang antara kontraktor, pengembang properti, dan penyedia layanan internet (ISP).

Secara bisnis, sektor kontraktor FTTH menawarkan potensi pendapatan berulang (recurring income) tidak hanya dari proyek pembangunan jaringan, tetapi juga dari layanan operasi, pemeliharaan, dan perluasan kapasitas jaringan di masa mendatang. Dengan meningkatnya persaingan antar-ISP yang berlomba menyediakan layanan berkualitas tinggi, permintaan terhadap jasa kontraktor profesional yang mampu membangun jaringan cepat, efisien, dan handal juga akan terus meningkat. Kombinasi antara permintaan pasar yang tinggi, dukungan kebijakan pemerintah, pertumbuhan infrastruktur digital, dan perkembangan teknologi telekomunikasi menjadikan bisnis kontraktor FTTH sebagai salah satu sektor strategis dengan prospek pertumbuhan jangka panjang yang kuat di Indonesia.

Prospek usaha Fiber To The Home (FTTH)

Prospek usaha penyedia layanan Fiber To The Home (FTTH) di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah dalam beberapa tahun ke depan. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan internet cepat dan stabil untuk kegiatan seperti belajar daring, kerja jarak jauh, streaming, game online, hingga smart home, layanan berbasis fiber optik menjadi standar baru bagi konektivitas rumah tangga. Saat ini, meskipun penetrasi internet secara umum di Indonesia telah melampaui 80%, penetrasi layanan FTTH masih jauh lebih rendah — ini menciptakan ruang pertumbuhan yang sangat besar, terutama di luar kota-kota besar. Pulau Jawa memang sudah lebih padat dengan jaringan FTTH, namun peluang tetap terbuka di kota lapis kedua dan ketiga, serta di luar Jawa seperti Bali, NTB, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, yang saat ini masih dilayani oleh koneksi nirkabel atau tembaga.

2. Struktur Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)

- | | | | |
|----|-------------------------|---|--|
| a. | Jumlah Saham Baru | : | Sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) lembar saham biasa atas nama yang mewakili 57,14% (lima puluh tujuh koma satu empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. |
| b. | Nilai Emisi PMHMETD I | : | Sebanyak-banyaknya Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah).. |
| c. | Rasio HMETD | : | 3 : 4 yaitu dimana setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama berhak atas 4 (empat) HMETD, di mana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru. |
| d. | Harga Pelaksanaan HMETD | : | Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. |
| e. | Hak atas Saham Baru | : | Saham Baru ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian |

-
- dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.
- f. Dilusi Setelah HMETD : Bagi yang tidak melaksanakan HMETD, dilusi sampai dengan maksimum sebesar 57,14% (lima puluh tujuh koma satu empat persen) dari total porsi kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham pada saat pelaksanaan HMETD.
- g. Pembeli Siaga : PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara (“AKUN”) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan menyatakan kesediaannya untuk menjadi Pembeli Siaga dalam PMHMETD I Perseroan.
- h. Jumlah dan Nilai Pembeli Siaga : Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No.1.329 tanggal 19 September 2025 yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, AKUN (“Pembeli Siaga”) telah menyatakan sanggup menjadi Pembeli Siaga jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 5.652.377.067 (lima miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tujuh) saham pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp1.413.094.266.750,- (satu triliun empat ratus tiga belas miliar Sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)
- i. Rasio Waran Seri II : 50 : 9 yaitu dimana setiap pemegang 50 (lima puluh) Saham Hasil Pelaksanaan HMETD berhak atas 9 (sembilan) Waran Seri II, di mana 1 (satu) Waran Seri II berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru.
- j. Jumlah Waran Seri II : Sebanyak-banyaknya 2.304.000.000 (dua miliar tiga ratus empat juta) lembar Waran Seri II.
- k. Nilai Emisi Waran Seri II : Sebanyak-banyaknya Rp 691.200.000.000,- (enam ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus juta Rupiah).
- l. Penggunaan Dana Hasil PMHMETD I : Seluruh dana hasil dari PMHMETD I Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:
1. Sekitar Rp2.935.000.000.000,- (dua triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak, GPI yang mana akan digunakan oleh GPI untuk:
 - a. Sekitar Rp2.800.000.000.000,- (dua triliun delapan ratus miliar Rupiah) akan digunakan GPI untuk pengembangan jaringan Fiber To The Home (FTTH) berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 7 sebanyak 2 Juta Pelanggan di Pulau Bali dan Lombok;
 - b. Sisanya sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja GPI, yaitu biaya pembelian perlengkapan penunjang, biaya pengembangan layanan, biaya pemasaran, biaya pelatihan serta biaya overhead lainnya.
 2. Sekitar Rp215.384.400.000,- (dua ratus lima belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) untuk

penyetoran modal kepada Perusahaan Anak, PFI yang mana akan digunakan oleh PFI untuk melunasi biaya Indefeasible Right of Use (IRU) Jaringan kabel bawah laut (Submarine Cable) kepada PT JMP.

3. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, yaitu biaya pembelian perlengkapan penunjang, biaya pengembangan layanan, biaya pemasaran, biaya pelatihan serta biaya overhead lainnya.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, yaitu biaya pembelian perlengkapan penunjang, biaya pengembangan layanan, biaya pemasaran, biaya pelatihan serta biaya overhead lainnya.

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| m. | Periode Perdagangan HMTED | : | 8 - 22 Januari 2026 |
| n. | Periode Pelaksanaan HMTED | : | 8 - 22 Januari 2026 |
| o. | Periode Perdagangan Waran Seri II | : | 8 Januari 2026 – 13 Juli 2028 |
| p. | Periode Pelaksanaan Waran Seri II | : | 13 Juli 2026 – 13 Juli 2028 |

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I Perseroan, bahwa PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara selaku pemegang 5.360.707.200 (lima miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus) atau setara dengan dengan 60,62% (enam puluh koma enam dua persen) saham Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperoleh yaitu sejumlah 7.147.609.600 (tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus) HMETD yang dimilikinya melalui Surat Pernyataan tanggal 19 September 2025 dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sehingga keseluruhan AKUN akan melaksanakan Pelaksanaan HMETD sejumlah Rp1.786.902.400.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar Sembilan ratus dua juta empat ratus ribu Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025 berdasarkan Surat No. 010/SP/SINERGY/XI.2025 tanggal 6 November 2025 berdasarkan sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.360.707.200	53.607.072.000	60,62
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01
Masyarakat dibawah 5%	3.786.189.722	37.861.897.220	39,37
Total Modal Ditempatkan & Disetor	8.894.552.519	88.945.525.190	100,00
Saham dalam Portepel	21.105.447.481	211.054.474.810	

Bahwa per tanggal 15 September 2025 masih terdapat Waran Seri I yang berlaku berjumlah 757.003.890 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lembar) Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 26 Januari 2026.

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Saham hasil pelaksanaan Waran Seri I akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **tidak lagi melaksanakan Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **melaksanakan seluruh HMETD**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	5.360.707.200	53.607.072.000	60,62	12.508.316.800	125.083.168.000	60,62
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01	23.333	233.330	0,01
Masyarakat dibawah 5%	3.482.278.910	34.822.789.100	39,37	8.125.317.456	81.253.174.560	39,37
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	8.842.996.110	88.429.961.100	100,00	20.633.567.589	206.336.575.890	100,00
Saham dalam Portepel	21.157.003.890	211.570.038.900		9.366.342.411	93.663.424.110	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **tidak lagi melaksanakan Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **melaksanakan seluruh HMETD dan setelah pelaksanaan Waran Seri II**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	12.508.316.800	125.083.168.000	60,62	13.794.886.528	137.948.865.280	60,62
Muhammad Arif	23.333	233.330	0,01	25.732	257.320	0,01
Masyarakat dibawah 5%	8.125.317.456	81.253.174.560	39,37	8.961.064.394	89.610.643.940	39,37
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	20.633.567.589	206.336.575.890	100,00	22.755.976.654	227.559.766.540	100,00
Saham dalam Portepel	9.366.342.411	93.663.424.110		7.244.023.346	72.440.233.460	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **tidak lagi melaksanakan Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **tidak melaksanakan HMETD sama sekali**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	5.360.707.200	53.607.072.000	60,62	17.151.355.346	171.513.553.460	83,11
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01	23.333	233.330	0,01
Masyarakat dibawah 5%	3.482.278.910	34.822.789.100	39,37	3.482.278.910	34.822.789.100	16,88
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	8.842.996.110	88.429.961.100	100,00	20.633.567.589	206.336.575.890	100,00
Saham dalam Portepel	21.157.003.890	211.570.038.900		9.366.342.411	93.663.424.110	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **tidak lagi melaksanakan Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **tidak melaksanakan HMETD sama sekali dan setelah pelaksanaan Waran Seri II**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	17.151.355.346	171.513.553.460	83,11	19.273.672.012	192.736.720.120	84,70
Muhammad Arif	23.333	233.330	0,01	25.732	257.320	0,01
Masyarakat dibawah 5%	3.482.278.910	34.822.789.100	16,88	3.482.278.910	34.822.789.100	15,29
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	20.633.567.589	206.336.575.890	100,00	22.755.967.654	227.559.766.540	100,00
Saham dalam Portepel	9.366.342.411	93.663.424.110		7.244.023.346	72.440.233.460	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **melaksanakan seluruh Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **melaksanakan seluruh HMETD**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	5.360.707.200	53.607.072.000	55,84	12.508.316.800	125.083.168.000	55,84
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01	23.333	233.330	0,01
Masyarakat dibawah 5%	4.239.282.800	42.392.828.000	44,15	9.891.659.867	98.916.598.670	44,15
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	9.600.000.000	96.000.000.000	100,00	22.400.000.000	224.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.400.000.000	204.000.000.000		7.600.000.000	76.000.000.000	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **melaksanakan seluruh Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **melaksanakan seluruh HMETD setelah pelaksanaan Waran Seri II**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	12.508.316.800	125.083.168.000	55,84	13.794.886.528	137.948.865.280	55,84
Muhammad Arif	23.333	233.330	0,01	25.733	257.330	0,01
Masyarakat dibawah 5%	9.891.659.867	98.916.598.670	44,15	10.909.087.739	109.090.877.390	44,15
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	22.400.000.000	224.000.000.000	100,00	24.704.000.000	247.040.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.600.000.000	76.000.000.000		5.296.000.000	52.960.000.000	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **melaksanakan seluruh Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **tidak melaksanakan HMETD sama sekali**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	5.360.707.200	53.607.072.000	55,84	18.160.693.867	181.606.938.670	81,06
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01	23.333	233.330	0,01
Masyarakat dibawah 5%	4.239.282.800	42.392.828.000	44,15	4.239.282.800	42.392.828.000	18,93
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	9.600.000.000	96.000.000.000	100,00	22.400.000.000	224.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.400.000.000	204.000.000.000		7.600.000.000	76.000.000.000	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **melaksanakan seluruh Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **tidak melaksanakan HMETD sama sekali dan setelah pelaksanaan Waran Seri II:**

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	18.160.693.867	181.606.938.670	81,06	20.464.691.467	204.646.914.671	91,36
Muhammad Arif	23.333	233.330	0,01	25.733	257.329	0,01
Masyarakat dibawah 5%	4.239.282.800	42.392.828.000	18,93	4.239.282.800	42.392.828.000	18,93
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	22.400.000.000	224.000.000.000	100,00	24.704.000.000	247.040.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.600.000.000	76.000.000.000		15.296.000.000	152.960.000.000	

3. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Grup beserta catatan atas laporan keuangan. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain).

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain). Laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Juli 2025 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Ridho Fathoni, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1629 yang dalam laporannya No. 00427/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/XII/2025 pada tanggal 4 Desember 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Dulgani, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 0165 yang dalam laporannya No. 00091/2.0119/AU.1/05/0165-1/1/III/2025 pada tanggal 27 Maret 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 1023 yang dalam laporannya No. 00114/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 pada tanggal 8 April 2024.

a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
JUMLAH ASET LANCAR	151.587.072.145	66.980.456.860	65.764.792.556
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	187.314.324.852	162.874.228.243	158.153.181.200
JUMLAH ASET	338.901.396.997	229.854.685.103	223.917.973.756
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	20.530.658.169	12.593.365.343	7.490.677.601
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	9.179.169.087	1.389.639.618	1.888.338.889
JUMLAH LIABILITAS	29.709.827.256	13.983.004.961	9.379.016.490
JUMLAH EKUITAS	309.191.569.741	215.871.680.142	214.538.957.266

b. Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
PENDAPATAN USAHA	53.058.935.749	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(33.419.616.026)	(11.336.657.878)	(19.563.574.082)	(20.619.611.538)
LABA BRUTO	19.639.319.723	7.156.662.394	10.873.626.600	8.269.770.331
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	14.390.202.365	1.695.729.276	1.696.037.943	1.310.129.398
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	11.269.152.458	1.343.567.826	1.328.358.953	875.692.019
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	13.441.948	1.048.863	(1.798.051)	(49.293.852)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167
LABA PER SAHAM DASAR	1,42	0,18	0,18	0,13
LABA PER SAHAM DILUSIAN	1,24	0,14	0,14	-
EBITDA	23.585.049.595	3.328.691.843	3.893.655.470	2.463.354.940
Bunga Berjalan	116.280.816	131.575.166	111.698.031	131.305.772

c. Laporan Arus Kas Konsolidasian

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi	8.957.153.485	6.064.114.656	6.106.898.077	(27.031.986.002)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(48.002.255.793)	(5.808.279.895)	(5.625.407.742)	(61.872.742.425)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan	90.752.304.263	(225.151.940)	(372.476.766)	148.690.316.908

d. Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Usaha	186,91%	9,74%	5,36%	44,82%
Beban Pokok Pendapatan	194,79%	-5,75%	-5,12%	43,49%
Laba Bruto	174,42%	48,35%	31,49%	48,25%
Laba Usaha	829,58%	40,51%	-2,69%	-29,41%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	748,61%	59,34%	29,46%	-26,59%
Laba Periode/Tahun Berjalan	738,75%	65,70%	51,69%	-36,26%
Jumlah Aset	46,68%	5,53%	2,65%	206,80%
Jumlah Liabilitas	99,42%	189,44%	49,09%	20,54%
Jumlah Ekuitas	43,04%	1,10%	0,62%	229,03%
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto / Pendapatan Usaha	37,01%	38,70%	35,72%	28,63%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan Usaha	21,26%	7,27%	4,36%	2,86%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / Beban Usaha	205,65%	23,91%	13,59%	11,87%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / Ekuitas (ROE)	3,65%	0,62%	0,61%	0,39%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / Aset (ROA)	3,33%	0,58%	0,58%	0,37%
Rasio Keuangan (x)				
Aset / Liabilitas	11,41	15,51	16,44	23,87
Liabilitas / Ekuitas (Debt to Equity)	0,10	0,07	0,06	0,04
Liabilitas / Aset (Debt to Asset)	0,09	0,06	0,06	0,04
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio)	7,38	5,22	5,32	8,78

Interest Coverage Ratio (ICR) (EBITDA / Beban Bunga Pinjaman)	202,83	25,30	34,86	18,76
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	2,30	2,40	2,73	8,05
Debt to EBITDA	1,26	4,48	3,59	3,81

Financial Covenant	Persyaratan	Posisi Per			Keterangan
		31 Juli 2025	31 Des 2024	31 Des 2023	
Current Ratio	Minimal 1x	7,38x	-	-	Seluruh persyaratan financial covenant telah terpenuhi.
Debt to Equity Ratio	Maksimal 2,5x	0,09x	-	-	
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 1x	2,30x	-	-	

PADA TANGGAL 31 JULI 2025, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN

4. Faktor Risiko

Perseroan menghadapi risiko-risiko terkait kegiatan usaha dan kepemilikan saham yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada, risiko-risiko berikut ini:

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko perizinan

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko gangguan jaringan kabel serat optik
- Risiko persaingan usaha
- Risiko bencana alam
- Risiko perubahan teknologi telekomunikasi
- Risiko Investasi dan Aksi Korporasi
- Risiko Pendanaan
- Risiko Terhambatnya Pembangunan/Pengembangan Jaringan Kabel
- Risiko Tidak Didapatkannya Kontrak Dengan Penyedia Backbone Dan/Atau Penyedia Bandwidth
- Risiko Tidak Didapatkannya Perizinan SBU Konstruksi Untuk IAB
- Risiko Ketergantungan Terhadap Entitas Anak

C. RISIKO UMUM

- Risiko makro ekonomi
- Risiko atas kebijakan atau peraturan Pemerintah terkait bidang usaha Perseroan
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada PMHMETD I
- Risiko fluktuasi harga saham Perseroan
- Risiko kebijakan dividen
- Risiko penjualan saham di masa yang akan datang dapat memengaruhi harga pasar saham Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab 6 Prospektus ini.

5. Kebijakan Dividen

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Manajemen Perseroan untuk saat ini menetapkan kebijakan untuk melakukan pembagian dividen kas kepada pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain meliputi (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan (v) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Untuk penjelasan kebijakan dividen secara lengkap dapat dilihat pada Bab 11 dalam prospektus ini.

6. Keterangan tentang Perusahaan Anak

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan yang dimiliki Perseroan dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	PT Data Prima Solusindo	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2022	Kabupaten Tangerang	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%
2	PT Pusat Fiber Indonesia	Perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	2022	2022	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%
3	PT Internet Anak Bangsa	Perdagangan besar, konstruksi sipil, konstruksi khusus, konstruksi gedung	2025	2025	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99%
4	PT Garuda Prima Internetindo	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2025	Bali	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%

1. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I)

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, para pemegang saham Perseroan telah memberikan: (i) Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sejumlah sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) saham baru, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan susunan permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD. (ii) Persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- a. Dalam rangka atau sehubungan dengan PMHMETD, menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan, menentukan kepastian modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan), selanjutnya menyatakan/menuangkannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, kemudian mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
- c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
- d. Menegosiasikan dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pembeli siaga (sepanjang relevan) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- e. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- f. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia; dan
- g. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Perseroan

sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 014 tanggal 12 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Selo Selieana, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan.

Selain itu, para pemegang saham Perseroan juga telah memberikan Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) Waran Seri II bersamaan dengan Rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sejumlah sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) saham baru, yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan RUPSLB pada tanggal 12 Juni 2025, berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

- a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD serta jumlah Waran Seri II;
- b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD dan harga pelaksanaan Waran Seri II;
- c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD dan pelaksanaan Waran Seri II.

sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 12 tanggal 20 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notarius di Jakarta Timur.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) saham biasa atas nama yang mewakili 57,14% (lima puluh tujuh koma satu empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Januari 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham biasa atas nama yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya yang akan dikeluarkan dari Portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI.

HMETD akan diperdagangkan di BEI dan di luar BEI dalam jangka waktu tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 22 Januari 2026. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 26 Januari 2026.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.304.000.000 (dua miliar tiga ratus empat juta) lembar Waran Seri II yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 10,29% (sepuluh koma dua sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I. Waran Seri II diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang

melaksanakan haknya dalam PMHMETD I. Setiap pemegang HMETD yang melaksanakan 50 (lima puluh) lembar saham baru Perseroan dalam PMHMETD I berhak memperoleh 9 (sembilan) lembar Waran Seri II dimana setiap 1 (satu) lembar Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 13 Juli 2026 – 13 Juli 2028, Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri II tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri II tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri II sebanyak-banyaknya Rp 691.200.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu miliar Rupiah).

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I Perseroan, bahwa PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara ("AKUN") selaku pemegang 5.360.707.200 (lima miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus) lembar saham atau setara dengan 60.62% (enam puluh koma enam dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan per tanggal 15 September 2025 menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperoleh yaitu sejumlah 7.147.609.600 (tujuh miliar serratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus) HMETD yang dimilikinya melalui Surat Pernyataan tanggal 19 September 2025 dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sehingga keseluruhan AKUN akan melaksanakan Pelaksanaan HMETD sejumlah Rp1.786.902.400.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar Sembilan ratus dua juta empat ratus ribu Rupiah).

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham porsi Publik maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.329 tanggal 19 September 2025 yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, AKUN ("Pembeli Siaga") telah menyatakan sanggup menjadi Pembeli Siaga jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 5.652.377.067 (lima miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tujuh) saham pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp1.413.094.266.750,- (satu triliun empat ratus tiga belas miliar Sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).



PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP dan penyewaan Fiber Optic melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat :
Gedung Cyber 1, Lantai 10
Jl. Kuningan Barat No.8,
Jakarta Selatan 12710
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

Kantor Operasional :
Ruko Rich Palace
Jl. Meruya Ilir Raya No. 36 – 40 Blok A1
Jakarta Barat 11630
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERIZINAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB 6 PROSPEKTUS INI.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE sampai dengan tanggal 15 September 2025 berdasarkan Surat No. 01/INET-FBR/IX/25 tanggal 16 September 2025 berdasarkan sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.360.707.200	53.607.072.000	60,62
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01
Masyarakat dibawah 5%	3.482.278.910	34.822.789.100	39,37
Total Modal Ditempatkan & Disetor	8.842.996.110	88.429.961.100	100,00
Saham dalam Portepel	21.157.003.890	211.570.038.900	

Bahwa per tanggal 15 September 2025 masih terdapat Waran Seri I yang berlaku berjumlah 757.003.890 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lembar) Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 26 Januari 2026.

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Saham hasil pelaksanaan Waran Seri I akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **tidak lagi melaksanakan Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **melaksanakan seluruh HMETD**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	5.360.707.200	53.607.072.000	60,62	12.508.316.800	125.083.168.000	60,62
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01	23.333	233.330	0,01
Masyarakat dibawah 5%	3.482.278.910	34.822.789.100	39,37	8.125.317.456	81.253.174.560	39,37
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	8.842.996.110	88.429.961.100	100,00	20.633.567.589	206.336.575.890	100,00
Saham dalam Portepel	21.157.003.890	211.570.038.900		9.366.342.411	93.663.424.110	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **tidak lagi melaksanakan Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **melaksanakan seluruh HMETD dan setelah pelaksanaan Waran Seri II**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	12.508.316.800	125.083.168.000	60,62	13.794.886.528	137.948.865.280	60,62
Muhammad Arif	23.333	233.330	0,01	25.732	257.320	0,01
Masyarakat dibawah 5%	8.125.317.456	81.253.174.560	39,37	8.961.064.394	89.610.643.940	39,37
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	20.633.567.589	206.336.575.890	100,00	22.755.976.654	227.559.766.540	100,00
Saham dalam Portepel	9.366.342.411	93.663.424.110		7.244.023.346	72.440.233.460	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **tidak lagi melaksanakan Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **tidak melaksanakan HMETD sama sekali**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	5.360.707.200	53.607.072.000	60,62	17.151.355.346	171.513.553.460	83,11
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01	23.333	233.330	0,01
Masyarakat dibawah 5%	3.482.278.910	34.822.789.100	39,37	3.482.278.910	34.822.789.100	16,88
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	8.842.996.110	88.429.961.100	100,00	20.633.567.589	206.336.575.890	100,00
Saham dalam Portepel	21.157.003.890	211.570.038.900		9.366.342.411	93.663.424.110	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **tidak lagi melaksanakan Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **tidak melaksanakan HMETD sama sekali dan setelah pelaksanaan Waran Seri II**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	17.151.355.346	171.513.553.460	83,11	19.273.672.012	192.736.720.120	84,70
Muhammad Arif	23.333	233.330	0,01	25.732	257.320	0,01
Masyarakat dibawah 5%	3.482.278.910	34.822.789.100	16,88	3.482.278.910	34.822.789.100	15,29
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	20.633.567.589	206.336.575.890	100,00	22.755.967.654	227.559.766.540	100,00
Saham dalam Portepel	9.366.342.411	93.663.424.110		7.244.023.346	72.440.233.460	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **melaksanakan seluruh Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **melaksanakan seluruh HMETD**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	5.360.707.200	53.607.072.000	55,84	12.508.316.800	125.083.168.000	55,84
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01	23.333	233.330	0,01
Masyarakat dibawah 5%	4.239.282.800	42.392.828.000	44,15	9.891.659.867	98.916.598.670	44,15
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	9.600.000.000	96.000.000.000	100,00	22.400.000.000	224.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.400.000.000	204.000.000.000		7.600.000.000	76.000.000.000	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **melaksanakan seluruh Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **melaksanakan seluruh HMETD setelah pelaksanaan Waran Seri II**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	12.508.316.800	125.083.168.000	55,84	13.794.886.528	137.948.865.280	55,84
Muhammad Arif	23.333	233.330	0,01	25.733	257.330	0,01
Masyarakat dibawah 5%	9.891.659.867	98.916.598.670	44,15	10.909.087.739	109.090.877.390	44,15
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	22.400.000.000	224.000.000.000	100,00	24.704.000.000	247.040.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.600.000.000	76.000.000.000		5.296.000.000	52.960.000.000	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **melaksanakan seluruh Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **tidak melaksanakan HMETD sama sekali**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	5.360.707.200	53.607.072.000	55,84	18.160.693.867	181.606.938.670	81,06
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01	23.333	233.330	0,01
Masyarakat dibawah 5%	4.239.282.800	42.392.828.000	44,15	4.239.282.800	42.392.828.000	18,93
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	9.600.000.000	96.000.000.000	100,00	22.400.000.000	224.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.400.000.000	204.000.000.000		7.600.000.000	76.000.000.000	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 15 September 2025 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang Waran Seri I **melaksanakan seluruh Waran Seri I** dan pemegang saham masyarakat dibawah 5% **tidak melaksanakan HMETD sama sekali dan setelah pelaksanaan Waran Seri II**:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	300.000.000.000		30.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantra	18.160.693.867	181.606.938.670	81,06	20.464.691.467	204.646.914.671	91,36
Muhammad Arif	23.333	233.330	0,01	25.733	257.329	0,01
Masyarakat dibawah 5%	4.239.282.800	42.392.828.000	18,93	4.239.282.800	42.392.828.000	18,93
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	22.400.000.000	224.000.000.000	100,00	24.704.000.000	247.040.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.600.000.000	76.000.000.000		15.296.000.000	152.960.000.000	

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 22 Januari 2026 melalui BEI sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dengan menerbitkan HMETD seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI. Maka jumlah seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI sebanyak-banyaknya akan menjadi 22.400.000.000 (dua puluh dua miliar empat ratus juta) saham.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) yaitu sampai dengan maksimum 57,14% (lima puluh tujuh koma satu empat persen) dari total porsi kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham pada saat pelaksanaan HMETD.

Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun atas rencana penerbitan HMETD termasuk persetujuan dari kreditur, selain persetujuan RUPS sehubungan dengan PMHMETD I.

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI sesuai dengan POJK No. 32/2015.

1.A. KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Saham Yang Berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. Pemegang Saham Yang Berhak Atas HMETD dan Jenis HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak memperoleh HMETD pada tanggal 6 Januari 2026 pukul 16.00 WIB dan memiliki 3 (tiga) Saham Lama akan memperoleh masing-masing 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan demikian, total saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) saham biasa atas nama yang mewakili 57,14% (lima puluh tujuh koma satu empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah).

2. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 7 Januari 2026 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Perusahaan Efek dan Bank Kustodiannya setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal 7 Januari 2026 di kantor Pusat BAE:

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kyai Caringin No. 2-A
Jakarta 10150, Indonesia
Telepon: +62-21 2263 8327
Fax. +62-21 2263 9048

E-mail : helpdesk@ficomindo.com ; ficomindo_br@yahoo.co.id

dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Perdagangan HMETD

HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama periode perdagangan HMETD, mulai tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 22 Januari 2026 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui BEI (melalui Perantara Pedagang Efek/Pialang yang terdaftar di BEI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui BEI akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sejumlah 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan setiap Hari Bursa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di BEI.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD miliknya tersebut dapat melakukannya melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD tersebut menjadi beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk HMETD

Pemegang Saham Yang Berhak akan mendapatkan HMETD secara elektronik ke Rekening Efek di Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing atas nama pemegang saham.

5. Nilai Teoritis HMETD

Nilai Teoritis HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

Harga pasar setiap saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD I	=	Rp b
Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD I	=	A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	=	B
Harga Teoritis Saham ex HMETD	=	$\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp X
Harga Teoritis HMETD	=	Rp X – Rp b

6. Penggunaan HMETD

HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli saham baru yang dikeluarkan Perseroan. HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif akan diberikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Pecahan HMETD

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

8. Hukum yang Berlaku

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF KECUALI PELAKSANAAN WARAN SERI I DAN WARAN SERI II.

1.B. KETERANGAN TENTANG WARAN SERI II

Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri II harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri II dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri II, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Waran Seri II yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 2.304.000.000 (dua miliar tiga ratus empat juta) Waran Seri II yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif.

1. Definisi

- a. Waran Seri II berarti Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I yang memberi hak kepada pemegang Waran Seri II untuk membeli Saham Baru.
- b. Surat Konfirmasi Waran Seri II berarti bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Perusahaan Efek dan/atau bank kustodian berdasarkan data yang diperoleh oleh Pengelola Administrasi Waran Seri II dari KSEI untuk kepentingan pemegang Rekening Efek dan selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Waran Seri II sebagai bukti pemilikan Waran Seri II dalam Penitipan Kolektif.
- c. Periode Pelaksanaan Waran Seri II berarti jangka waktu melakukan Pelaksanaan Waran Seri II yaitu setiap Hari Bursa terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I atau sejak tanggal 13 Juli 2026 sampai dengan tanggal 13 Juli 2028 pukul 16.00 WIB.
- d. Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II berarti Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 2.304.000.000 (dua miliar tiga ratus empat juta) Saham Baru.
- e. Harga Pelaksanaan Waran Seri II berarti harga setiap Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II yang ditetapkan, harus dibayar pada waktu melakukan Pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah).

2. Persyaratan Waran Seri II

a. Hak Atas Waran Seri II

- i. Setiap 50 (lima puluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 9 (sembilan) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif.

-
- ii. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri II yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri II berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada harga pelaksanaan Waran Seri II selama Periode Pelaksanaan Waran Seri II. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham Perseroan, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham Baru. Bila Waran Seri II tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

b. Bentuk Denominasi Waran Seri II

Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri II, melainkan Waran Seri II akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri II ke Rekening Efek pada Perusahaan Efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri II dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri II.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri II, maka setiap Waran Seri II yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak akan berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran Seri II tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II.

Selama Pelaksanaan Waran Seri II belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri II menjadi Saham Baru, maka Pemegang Waran Seri II tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham Baru.

3. Hak Untuk Membeli Saham Baru Perseroan

Setiap Pemegang Waran Seri II dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri II dengan cara sebagai berikut:

Bagi Pemegang Waran Seri II yang warannya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru dilakukan dengan memberikan instruksi melalui Perusahaan Efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri II berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan membayar harga pelaksanaan yang telah ditetapkan yaitu Rp300,- (tiga ratus Rupiah).

4. Periode Perdagangan, Pelaksanaan dan Masa Berlakunya Waran Seri II

Waran Seri II ini berlaku selama 30 (tiga puluh) bulan kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan yang paling awal di Bursa yaitu tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan akhir bulan ke 30 (tiga puluh) yaitu tanggal 13 Juli 2028 pada pukul 16.00 WIB.

Periode Perdagangan Waran Seri II adalah tanggal 8 Januari 2026 hingga tanggal 11 Juli 2028 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan Waran Seri II di Pasar Reguler dan Negosiasi, dan tanggal 8 Januari 2026 hingga tanggal 13 Juli 2028 pada pukul 12.00 WIB untuk perdagangan Waran Seri II di Pasar Tunai.

Periode Pelaksanaan Waran Seri II adalah setiap Hari Kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan Waran Seri II, mulai tanggal 13 Juli 2026 sampai dengan akhir bulan ke 30 (tiga puluh) setelah pencatatan Waran Seri II tersebut, yaitu tanggal 13 Juli 2028 pada pukul 16.00 WIB.

Pemegang Waran Seri II memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Waran Seri II yang dipegangnya menjadi Saham Baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang Waran Seri II berhak untuk tidak menukarkan Waran Seri II yang dipegangnya menjadi Saham Baru.

Setelah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri II yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II.

5. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri II

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri II adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri II dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri II menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri II pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

6. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II

- a. Setiap Pemegang Waran Seri II berhak melakukan pelaksanaan Waran Seri II selama Periode Pelaksanaan Waran Seri II pada jam kerja dengan melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri II sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri II.
- b. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II yang berada dalam Penitipan Kolektif adalah sebagai berikut:
 1. Pemegang Waran Seri II memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran Seri II dengan menyerahkan Surat Konfirmasi Waran Seri II melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri II dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
 2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan Waran Seri II oleh perusahaan efek dan/atau bank kustodian kepada KSEI, maka:
 - KSEI akan mendebet Waran Seri II dari masing-masing sub rekening Pemegang Waran Seri II yang memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran Seri II ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - Segera setelah uang Harga Pelaksanaan Waran Seri II diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri II dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke Rekening Bank Khusus pada hari yang sama.
 3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan Waran Seri II, KSEI akan menyampaikan pada Pengelola Administrasi Waran Seri II, dokumen sebagai berikut:
 - Daftar rincian Instruksi Pelaksanaan Waran Seri II yang diterima KSEI;
 - Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri II yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus;
 - Instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
 4. Segera setelah Pengelola Administrasi Waran Seri II menerima dari KSEI dokumen tersebut di atas, Pengelola Administrasi Waran Seri II akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan Waran Seri II, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri II dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II.
 5. Selambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan Waran Seri II diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri II telah dibayar penuh (*in good funds*) dalam Rekening Bank Khusus, Pengelola Administrasi Waran Seri II akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II ke sub rekening Pemegang Waran Seri II yang melakukan Pelaksanaan Waran Seri II dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya setelah melakukan pendistribusian Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II tersebut KSEI akan menerbitkan laporan hasil distribusi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II tersebut kepada Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri II.

7. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri II

Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain seperti biaya bank sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri II yang permohonan pelaksanaannya diajukan langsung ke Pengelola Administrasi Waran Seri II harus dibayar penuh (*in good funds*) pada saat pelaksanaan, maka Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus.

Pemegang Waran Seri II yang akan melaksanakan Waran Seri II menjadi Saham Baru dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet, giro, bank transfer, pemindahbukuan tunai (in good funds) dalam Rupiah kepada Rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA)
KCP Alaydrus

Alamat: **Jl. Alaydrus No. 47 dan 47A, Gambir, Jakarta Pusat 10130**

Atas Nama: **PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk**

No. Rekening: **494-890-8989**

Dalam hal pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri II kurang dari jumlah yang ditentukan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri II dapat menolak Pelaksanaan Waran Seri II dan Perseroan segera mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya lain yang dikeluarkan Pengelola Administrasi Waran Seri II untuk pengembalian pembayaran tersebut (jika ada).

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds).

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri II menjadi Saham Baru menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri II.

8. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri II

Harga Pelaksanaan Waran Seri II adalah Rp300,- (tiga ratus Rupiah). Perseroan tidak melakukan dan dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran Seri II kecuali dalam hal pemecahan saham atau penggabungan saham.

$$\text{Jumlah Waran Seri II Baru} = \frac{\text{Harga nominal lama saham}}{\text{Harga nominal baru saham}} \times B$$

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, peleburan, konversi atau pecahan nilai nominal saham (stock split):

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga nominal lama saham}}{\text{Harga nominal baru saham}} \times A$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri II yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri II yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek dengan menggunakan nilai nominal yang baru; Penyesuaian tersebut diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Jumlah Waran Seri II tidak mengalami perubahan, hanya Harga Pelaksanaan yang akan mengalami perubahan apabila terjadi pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{A + B} \times E$$

A : Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen

B : Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

E : Harga pelaksanaan Waran Seri II yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

9. Status Pelaksanaan Waran Seri II

Waran Seri II hanya dapat diperdagangkan secara elektronik sejak tanggal pencatatannya di Bursa yaitu tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan 11 Juli 2028 pada pasar reguler dan negosiasi dan tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan 13 Juli 2028 pada pasar tunai.

Surat Konfirmasi Pencatatan Waran (SKPW) adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan Waran Seri II yang dimiliki oleh Pemegang Waran Seri II dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri II yang bersangkutan dan merupakan dasar bagi KSEI untuk melakukan pengkreditan terhadap Rekening Efek perusahaan efek dan/atau bank kustodian tempat Pemegang Waran Seri II yang bersangkutan membuka rekening.

Pemegang Waran Seri II tidak memiliki hak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan serta tidak berhak untuk menerima dividen dalam bentuk apapun serta hak-hak lain yang dapat terkait dalam Saham Baru Perseroan.

Pengelola Administrasi Waran Seri II akan mencatatkan Saham Baru hasil pelaksanaan Waran Seri II setelah menerima konfirmasi dari pihak Perseroan. Status Saham Baru hasil pelaksanaan Waran Seri II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

10. Status Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II

Saham hasil Pelaksanaan Waran Seri II adalah Saham Baru dengan nilai nominal masing-masing saham Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari modal disetor Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan Waran Seri II yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya.

11. Daftar Pemegang Waran Seri II

Daftar Pemegang Waran Seri II adalah daftar yang diterbitkan KSEI dan BAE yang didalamnya tercantum nama, alamat serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Data-data yang diperlukan dalam Daftar Pemegang Waran Seri II akan diperoleh dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian melalui KSEI dan BAE.

12. Pengelola Administrasi Waran Seri II

Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri II.

13. Pengalihan Hak Atas Waran Seri II

Hak atas Waran Seri II dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri II.

Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri II tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri II kecuali apabila ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri II telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri II karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri II atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri II beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri II dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri II, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri II dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Dalam hal satu Waran Seri II karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan kedalam Daftar Pemegang Waran Seri II dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri II bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada

Pemegang Waran Seri II. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri II menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri II atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri II sebagai satu satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri II.

Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri II dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri II yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu didalam Daftar Pemegang Waran Seri II berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri II mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri II.

Untuk Waran Seri II yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan kustodian Sentral Efek Indonesia.

14. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Apabila pada Periode Pelaksanaan Waran Seri II terjadi penggabungan atau peleburan atau Perseroan dilikuidasi, maka dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui penggabungan atau peleburan atau likuidasi tersebut, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri II sesuai dengan ketentuan dalam butir 5 tersebut di atas.

Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri II dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melakukan Waran Seri II yang dimilikinya.

- Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang dimuat dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri II.
- Dalam hal Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, maka para Pemegang Waran Seri II diberikan kesempatan untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri II sampai dengan tanggal tertentu yang akan ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

15. Perubahan

- A. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri II kecuali Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri II dan Harga Pelaksanaan Waran Seri II selain karena terjadi pemecahan, pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, pengeluaran saham baru dengan cara Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan penggabungan saham sebagaimana diatur dalam pasal 5.3 PPW, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 2. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri II dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari Kalender sebelum ditandatangani Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri II dan selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri II lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri II dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
 3. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri II harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri II dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri II ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
- B. Setelah akta Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri II ditandatangani maka Perseroan wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri II atas setiap perubahan terhadap Pernyataan Penerbitan Waran Seri II sesuai dengan Pasal 11 akta ini dan dilaporkan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- C. Perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri II sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam akta ini serta Peraturan Pasar Modal.

- D. Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri II ini sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan tersebut dalam Pasal 13.1, 13.2 dan 13.3 PPW.
- E. Dalam hal terjadi perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri II, Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut pada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

16. Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Waran Seri II

- Fluktuasi harga dan likuiditas saham Perseroan yang diperdagangkan di BEI, jumlah pemegang waran serta rencana pencatatan di Bursa Efek merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran Seri II, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

1.C. KINERJA SAHAM

Dibawah ini adalah keterangan mengenai historis kinerja saham Perseroan (kode perdagangan saham di BEI "INET"):

Bulan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Harga Penutupan	Volume (satuan lot)	Nilai (Ribuan Rp.)
Agustus – 2025	338	234	240	51.614.708	1.433.394.668
Juli – 2025	344	160	308	88.313.171	2.222.597.124
Juni – 2025	182	153	167	27.019.891	461.093.237
Mei – 2025	206	158	169	9.893.728	177.477.247
April – 2025	200	84	192	48.798.132	682.705.782
Maret – 2025	156	75	98	14.193.751	155.515.807
Februari – 2025	156	101	156	41.136.823	489.539.492
Januari – 2025	134	57	109	80.318.266	618.303.640
Desember – 2024	68	54	58	52.729.611	331.494.195
November - 2024	75	66	67	54.767.308	382.129.122
Oktober - 2024	83	65	73	70.838.006	509.036.477
September - 2024	95	64	68	23.729.785	187.277.871
Agustus - 2024	95	50	90	30.183.486	224.594.352

Unusual Market Activity (UMA):

Berdasarkan Pengumuman Bursa Efek Indonesia:

- No.Peng-UMA-00034/BEI.WAS/01-2025 tanggal 30 Januari 2025, Bursa Efek Indonesia menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham Perseroan di luar kebiasaan (Unusual Market Activity/UMA);
- Pengumuman Bursa Efek Indonesia No.Peng-UMA-00197/BEI.WAS/07-2025 tanggal 18 Juli 2025, Bursa Efek Indonesia menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham Perseroan di luar kebiasaan (Unusual Market Activity/UMA)

Suspensi:

Perseroan telah mengalami suspensi atas perdagangan saham Perseroan sebanyak 3 (dua) kali yaitu :

- Pada tanggal 12 Februari 2025 berdasarkan Pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-SPT-00035/BEI.WAS/02-2025 tanggal 11 Februari 2025 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Suspensi tersebut dibuka pada tanggal 13 Februari 2025 berdasarkan Pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-UPT-00032/BEI.WAS/02-2025 tanggal 12 Februari 2025;
- Pada Tanggal 25 februari 2025 berdasarkan Pengumuman Bursa Efek Indonesia No.Peng-SPT-00043/BEI.WAS/02-2025 tanggal 24 Februari 2025 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Suspensi tersebut dibuka pada tanggal 5 Maret 2025 berdasarkan Pengumuman Bursa Efek Indonesia No.Peng-UPT-00050/BEI.WAS/03-2025 tanggal 4 Maret 2025
- Pada Tanggal 29 April 2025 berdasarkan Pengumuman Bursa Efek Indonesia No.Peng-SPT-00067/BEI.WAS/04-2025 tanggal 28 April 2025 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Suspensi tersebut dibuka pada tanggal 15 Mei 2025 berdasarkan Pengumuman Bursa Efek Indonesia No.Peng-UPT-00073/BEI.WAS/05-2025 tanggal 14 Mei 2025.

2. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I

Seluruh dana hasil dari PMHMETD I Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp2.935.000.000.000,- (dua triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk melakukan penyeteroran modal pada perusahaan anak yaitu GPI yang mana oleh GPI seluruh dana tersebut akan digunakan untuk:
 - a. Sekitar Rp2.800.000.000.000,- (dua triliun delapan ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk Belanja modal untuk pembangunan jaringan *FTTH (Fiber To The Home)* dengan teknologi termutakhir yaitu *WIFI 7* untuk 2.000.000 (dua juta) *homepass* yang berlokasi di Pulau Bali dan Pulau Lombok dengan rencana pembangunan sebanyak 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu) *homepass* pada tahun 2026 dan 1.220.000 (satu juta dua ratus dua puluh ribu) *homepass* pada tahun 2027. Biaya pembangunan tersebut terdiri dari antara lain perangkat (i) *Optical Line Terminal (OLT)* dengan teknologi *XGSPON*; (ii) *Optical Distribution Cabinet (ODC)* dengan kapasitas 96-576 core; (iii) *Fiber Optic Distribution Wire*; (iv) *Optical Distribution Point (ODP)* 4,8,12,dan 16 port; (v) *Drop Wire*; (vi) *Optical Network Terminal (ONT) Dual Band 2,4 GHz dan 5 GHz* dengan *Throughput* sampai dengan 5,8 Gbps; serta (vii) biaya jasa penggelaran. Adapun vendor maupun kontraktor yang ditunjuk oleh GPI untuk melakukan pembangunan adalah pihak ketiga yang kredibel dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Sampai Prospektus ini diterbitkan, GPI masih melakukan review untuk setiap penawaran-penawaran dari vendor maupun kontraktor GPI yang diestimasikan penandatanganan perikatan dengan vendor maupun kontraktor tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir Tahun 2025.

GPI melakukan pembangunan jaringan *FTTH (Fiber To The Home)* untuk melakukan penetrasi pasar dengan menyalurkan internet berkecepatan tinggi dengan teknologi terkini yakni *WIFI 7* dengan harga langganan Rp299 ribu per bulan dan speed up to 2 Gbps yang diproyeksikan akan menjadi sumber revenue utama GPI. Target penyelesaian pembangunan tersebut yaitu pada akhir tahun 2027.

GPI telah memperoleh perizinan yang dibutuhkannya untuk melakukan pembangunan jaringan *FTTH (Fiber To The Home)* dengan teknologi termutakhir yaitu *WIFI 7* untuk 2.000.000 (dua juta) *homepass* (jumlah rumah yang tercakup jaringan) yang berlokasi di Pulau Bali dan Pulau Lombok, yaitu Izin Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi No. 91202017739020003 tanggal 17 Juni 2023 dan Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet Internet Service Provider (ISP) No. 722/TEL.02.02/2020 tanggal 14 September 2020. Perseroan maupun GPI saat ini belum memiliki perjanjian apapun terkait penyewaan backbone maupun pembelian bandwidth, dimana pembelian bandwidth dapat dilakukan kepada penyedia bandwidth yang berbeda di setiap lokasi.

- b. Sisanya sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja GPI, yaitu biaya pembelian perlengkapan penunjang, biaya pembelian bandwidth, biaya pengembangan layanan, biaya pemasaran, biaya gaji, biaya pelatihan serta biaya overhead lainnya.

2. Sekitar Sekitar Rp215.384.400.000,- (dua ratus lima belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk melakukan penyeteroran modal pada perusahaan anak yaitu PFI yang mana oleh PFI seluruh dana tersebut akan digunakan untuk melakukan pelunasan biaya *Indefeasible Right of Use* ("IRU") kepada PT Jejaring Mitra Persada ("JMP") sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penyediaan Fiber Optic Core Dalam Jaringan Telekomunikasi Jakarta – Batam Submarine Cable System (Rising-8) secara *Indefeasible Right of Use* (IRU) Nomor 020/JMP-PFI/LEG/PKS/V/2025 yang ditandatangani oleh dan antara PFI dan JMP pada tanggal 2 Mei 2025, dimana IRU merupakan hak pakai atas aset kabel bawah laut tersebut. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, aset kabel bawah laut tersebut belum selesai dibangun dimana pergelaran (pemasangan dan penataan kabel bawah laut) akan dimulai pada pekan ke-4 bulan Desember 2025 dan target selesai dibangun pada April 2026. Sehingga, atas hal ini PFI belum mendapatkan manfaat atas aset tersebut selama Pembangunan aset kabel bawah laut belum selesai dilakukan. JMP merupakan pihak ketiga dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Setelah pergelaran selesai, akan dilakukan tes komisioning yang ditargetkan pada bulan April 2026. Sebagaimana diatur di dalam perjanjian, Berita Acara Serah Terima ("BAST") dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tes komisioning selesai dilakukan. Adapun tabel pembayaran yang merefleksikan nilai yang akan dibayarkan PFI kepada JMP dari hasil emisi berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor Kontrak	Lokasi	Tahap Waktu dan Jatuh Tempo Berdasarkan Perjanjian	Nilai DPP	DPP + PPN	Telah Dibayarkan	Belum dibayarkan	Keterangan
019/JMP-PFI/LEG/PKS/V/2025	Batam - Singapore	Tahap I (31 Mei 2025)	24.255.000.000	26.923.050.000	26.923.050.000		-
		Tahap II (31 Juli 2025)	15.345.000.000	17.032.950.000	17.032.950.000		-
020/JMP-PFI/LEG/PKS/V/2025	Jakarta - Batam	Tahap I (31 Juli 2025)	8.910.000.000	9.890.100.000	9.890.100.000		-
		Tahap II (30 September 2025)*	48.510.000.000	53.846.100.000		53.846.100.000	Tahap II sampai dengan Tahap V akan dibayarkan dari dan PMHMETD dan akan dibayarkan segera setelah dana emisi diterima
		Tahap III (30 November 2025)*	48.510.000.000	53.846.100.000		53.846.100.000	
		Tahap IV (31 Januari 2026)*	48.510.000.000	53.846.100.000		53.846.100.000	
		Tahap V (30 Maret 2026)*	48.510.000.000	53.846.100.000		53.846.100.000	
TOTAL		242.550.000.000	269.230.500.000	53.846.100.000	215.384.400.000		

*Keterangan: Berdasarkan hasil negosiasi, target pembayaran untuk tahap II sampai dengan tahap V belum PFI bayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sehubungan dengan adanya penyesuaian jadwal pembangunan. PFI akan melakukan pembayaran untuk tahap II sampai dengan tahap V tersebut pada tanggal 27 Februari 2026.

PFI tidak memerlukan izin sehubungan dengan rencana penggunaan dana, dikarenakan dana yang akan disalurkan PFI akan digunakan untuk pelunasan biaya *Indefeasible Right of Use* (IRU) kepada JMP berdasarkan (i) Perjanjian Penyediaan Fiber Optic Core Dalam Jaringan Telekomunikasi Jakarta – Batam Submarine Cable System (Rising-8) secara *Indefeasible Right of Use* (IRU) No.020/JMP-PFI/LEG/PKS/V/2025 tanggal 2 Mei 2025.

3. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, yaitu biaya pembelian perlengkapan penunjang, biaya pembelian bandwidth, biaya pengembangan layanan, biaya pemasaran, biaya gaji, biaya pelatihan serta biaya overhead lainnya.

Sedangkan seluruh dana hasil pelaksanaan Waran Seri II akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yaitu biaya pembelian perlengkapan penunjang, biaya pembelian bandwidth, biaya pengembangan layanan, biaya pemasaran, biaya gaji, biaya pelatihan serta biaya overhead lainnya.

Dalam hal dana hasil PMHMETD I dan hasil pelaksanaan Waran Seri II tersebut tidak mencukupi pembiayaan rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif diantaranya adalah kas internal Perseroan dan pendanaan dari pihak ketiga.

Sehubungan dengan penyertaan modal yang dilakukan oleh Perseroan kepada GPI dan PFI, sesuai dengan Pasal 12 ayat (8) huruf e Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 19 Desember 2025 yang menyetujui rencana Direksi Perseroan untuk melakukan penyertaan modal oleh Perseroan kepada (i) GPI sekitar Rp2.935.000.000.000 dan (ii) PFI sekitar Rp215.384.400.000 yang dananya berasal dari hasil pelaksanaan PMHMETD I.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I untuk penyertaan modal Perseroan kepada GPI dan PFI merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan terkendali. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I yang akan digunakan untuk penyertaan modal Perseroan kepada GPI dan PFI memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II yang digunakan untuk modal kerja Perseroan, bukan merupakan transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 karena dilakukan dengan pihak ketiga. Namun, dalam hal dana tersebut disalurkan oleh Perseroan kepada Perusahaan Anak untuk digunakan sebagai modal kerja, maka transaksi tersebut termasuk transaksi afiliasi. Meski demikian, transaksi tersebut dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana Pasal 3 dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor. Perseroan tetap wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada hari kerja kedua setelah tanggal pelaksanaan transaksi, sesuai Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II yang digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Perusahaan Anak memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 tersebut.

Apabila di kemudian hari penggunaan dana hasil PMHMETD I diubah maka Perseroan wajib memperhatikan kembali ketentuan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap enam bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Dalam penggunaan dana hasil PMHMETD I ini, Perseroan akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari hasil PMHMETD I ini, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan dari Pemegang Saham dalam RUPS.

Berdasarkan Pasal 13 huruf a POJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD I yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib melaksanakan ketentuan POJK No. 30/2015 yaitu:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil penawaran HMETD kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPS; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS

dimana selanjutnya Perseroan harus menyampaikan hasil RUPS sebagaimana dimaksud di atas kepada OJK paling lambat dua hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS.

Sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum kepada OJK melalui surat No. 020/SP/SINERGY/VII.2025 tanggal 15 Juli 2025. Sehubungan dengan tersebut, Per 30 Juni 2025, terdapat sisa

dana hasil Penawaran Umum Perseroan sebesar Rp2.226.883.516, yang ditempatkan oleh Perseroan di rekening giro. Target dana tersebut dapat direalisasikan seluruhnya adalah pada akhir tahun 2025 dan peruntukannya adalah untuk Pembelian perlengkapan penunjang, biaya pembelian bandwidth, biaya pengembangan layanan, biaya pemasaran, biaya gaji, biaya pelatihan serta biaya overhead lainnya.

Sedangkan sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil Konversi Efek Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham Perseoran, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Waran Sei I kepada OJK melalui surat No. 019/SP/SINERGY/VII.2025 tanggal 15 Juli 2025. Sehubungan dengan tersebut, Per 30 Juni 2025, terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum Perseroan sebesar Rp64.617.433.496, yang ditempatkan oleh Perseroan di rekening giro. Target dana tersebut dapat direalisasikan seluruhnya adalah pada tahun 2026 dan peruntukannya adalah untuk Pembelian perlengkapan penunjang, biaya pembelian bandwidth, biaya pengembangan layanan, biaya pemasaran, biaya gaji, biaya pelatihan serta biaya overhead lainnya.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015 mengenai perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, total perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini adalah sekitar 0,062% (nol koma nol enam dua persen) dari hasil PMHMETD I, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya jasa Akuntan	:	0,011%
2. Biaya jasa Konsultan Hukum	:	0,013%
3. Biaya jasa Notaris	:	0,002%
4. Biaya jasa Biro Administrasi Efek	:	0,001%
5. Biaya Pendaftaran OJK, Biaya Pencatatan di Bursa, KSEI, Biaya Percetakan, Pengumuman Koran, penyelenggaraan RUPSLB dan lain-lain	:	0,035%

PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM INI AKAN DILAKSANAKAN DENGAN MENGIKUTI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, KHUSUSNYA DI BIDANG PASAR MODAL.

3. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Grup Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2025, yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Ridho Fathoni, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1629 yang dalam laporannya No. 00427/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/XII/2025 pada tanggal 4 Desember 2025. Laporan keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suhartati & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Dulgani dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0165 yang dalam laporannya No 00091/2.0119/AU.1/05/0165-1/1/III/2025 pada tanggal 27 Maret 2025 dan Laporan keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 1023 yang dalam laporannya No. 00114/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 pada tanggal 8 April 2024.

Pada tanggal 31 Juli 2025, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas Rp 29.709.827.256, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2025
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha - pihak ketiga	13.323.440.891
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	122.963.350
Pihak berelasi	83.993.364
Utang pajak	4.036.532.177
Beban masih harus dibayar	1.041.149.769
Uang muka penjualan	117.902.435
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank jangka panjang	1.285.714.284
Utang pembiayaan konsumen	349.900.442
Liabilitas sewa	169.061.457
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	20.530.658.169
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank jangka panjang	7.714.285.716
Utang pembiayaan konsumen	778.246.444
Liabilitas sewa	225.759.218
Liabilitas imbalan pascakerja	460.877.709
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.179.169.087
JUMLAH LIABILITAS	29.709.827.256

UTANG USAHA PIHAK KETIGA

Utang usaha pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 13.323.440.891 dengan rincian berdasarkan pemasok sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2025
PT Integrasi Jaringan Ekosistem	3.441.017.757
PT Rabik Bangun Nusantara	1.789.505.480
PT Green Net Indonesia	1.030.197.851
PT Link Net Tbk	639.360.000
PT Mitra Visioner Pratama	537.260.583
PT Jala Lintas Media	476.158.419
PT Berca Hardayaperkasa	391.267.179
PT Iforte Solusi Infotek	370.048.042
PT Mora Telematika Indonesia Tbk	350.280.000
PT Parsaoran Global Datatrans	319.661.684
PT Quantum Tera Network	220.517.432
PT Mitra Media Data	209.919.240
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 200.000.000)	3.548.247.224
Jumlah	13.323.440.891

Berikut kami sampaikan posisi liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi yang disertai dengan penyebab dan alasannya :

Pihak	Nominal OS (Rp)	Penyebab & Alasan
PT Integrasi Jaringan Ekosistem	3.441.017.757	Pembayaran belum dapat dilakukan karena saat ini Perseroan masih menunggu selesainya proses rekonsiliasi administratif dengan PT Integrasi Jaringan Ekosistem guna memastikan kesesuaian data tagihan dan pencatatan antar kedua belah pihak.
PT Rabik Bangun Nusantara	1.789.505.480	Pembayaran belum dilakukan karena keterlambatan proses rekonsiliasi administratif dan saat ini Perseroan menunggu <i>feedback</i> terkait usulan perubahan tanggal jatuh tempo.
PT Green Net Indonesia	1.030.197.851	

UTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

Utang .ain-lain kepada pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 122.963.350 yang terdiri dari:

Keterangan	31 Juli 2025
Pihak Ketiga	122.963.350
Jumlah	122.963.350

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Beban masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 1.041.149.769 yang terdiri dari:

Keterangan	31 Juli 2025
Tenaga ahli	1.018.753.000
Biaya bunga	22.396.769
Jumlah	1.041.149.769

UANG MUKA PENJUALAN

Uang muka penjualan Perseroan dan Entitas Anak kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 117.902.435, yang terdiri dari:

Keterangan	31 Juli 2025
Uang muka penjualan	117.902.435
Jumlah	117.902.435

LIABILITAS SEWA

Saldo liabilitas sewa ini merupakan liabilitas kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 394.820.675 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2025
Liabilitas sewa	444.000.000
Dikurangi beban keuangan di masa depan	(49.179.325)
Nilai kini pembayaran minimum	394.820.675
Dikurangi bagian jangka pendek	(169.061.457)
Bagian Jangka Panjang	225.759.218

Jumlah tercatat aset hak-guna yang diklasifikasikan dalam aset tetap:

31 Juli 2025

Keterangan	Harga Perolehan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku
Bangunan	404.593.096	(67.432.183)	337.160.913
Kendaraan	113.273.989	(75.515.993)	37.757.996
Jumlah	517.867.085	(142.948.176)	374.918.909

Jumlah angsuran sewa dan bunga ditangguhkan berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2025	
	Pembayaran Sewa Minimum	Nilai Kini dari Pembayaran Sewa Minimum
< 1 tahun	202.800.000	172.577.293
1 - 5 tahun	241.200.000	222.243.382
> 5 tahun	-	-
Sub-total	444.000.000	394.820.675
Dikurangi: beban keuangan	(49.179.325)	-
Jumlah	394.820.675	394.820.675

UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Utang pembiayaan konsumen Perseroan dan Entitas Anak kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 1.128.146.886 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2025
PT Toyota Astra Financial Service	956.999.690
PT BCA Finance	171.147.196
PT CIMB Niaga Finance	-
Jumlah	1.128.146.886
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	349.900.442
Bagian Jangka Panjang	778.246.444

UTANG PAJAK

Utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 4.036.532.177 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2025
Perusahaan	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	420.000
Pasal 21	28.037.126
Pasal 23	26.017.667
Pasal 26	213.931
Pasal 29	12.130.061
Pajak Pertambahan Nilai	24.836.047
Sub-jumlah	91.654.832
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	648.378.091
Pasal 21	438.275
Pasal 23	345.172.000
Pasal 29	2.916.136.601
PP 23	-
Pajak Pertambahan Nilai	34.752.378
Sub-jumlah	3.944.877.345
Jumlah	4.036.532.177

UTANG BANK JANGKA PANJANG

Saldo utang bank jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 9.000.000.000 yang terdiri dari:

Keterangan	31 Juli 2025
PT Bank DKI	9.000.000.000
Dikurangi beban provisi yang belum diamortisasi	-
Sub-jumlah	9.000.000.000
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.285.714.284
Bagian Jangka Panjang	7.714.285.716

Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban tertentu yang sudah disepakati bersama, antara lain sebagai berikut:

Financial Covenant	Persyaratan	31 Juli 2025	Keterangan
Current Ratio	Minimal 1x	7,38x	Seluruh persyaratan financial covenant telah terpenuhi.
Debt to Equity Ratio	Maksimal 2,5x	0,09x	
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 1x	2,30x	

UTANG LAIN-LAIN PIHAK BERELASI

Saldo utang pihak berelasi per tanggal 31 Juli 2025 adalah sebesar Rp 83.993.364 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2025
Danang Wijiyanto	83.993.364
Jumlah	83.993.364

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perseroan dan Entitas Anak memberikan imbalan kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja ini. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut sebanyak 19 karyawan pada 31 Juli 2025. Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program selama kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2025
Beban jasa kini	87.540.204
Beban bunga	15.555.417
Sub-jumlah	103.095.621
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(17.233.266)
Jumlah	85.862.355

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2025
Saldo awal	375.015.354
Beban jasa kini	87.540.204
Beban bunga	15.555.417
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain:	
Dampak perubahan asumsi keuangan	8.686.726
Dampak penyesuaian pengalaman	(25.919.992)
Saldo Akhir	460.877.709

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

Keterangan	31 Juli 2025	
	Perubahan asumsi	Dampak pada keseluruhan kewajiban
Tingkat diskonto	-1%	Kenaikan menjadi (Rp 404.991.456)
	+1%	Penurunan menjadi Rp 525.955.992
Tingkat kenaikan gaji	-1%	Penurunan menjadi Rp 526.146.325
	+1%	Kenaikan menjadi (Rp 403.855.604)

Analisis sensitivitas disajikan diatas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti tidak mungkin bahwa perubahan asumsi akan terjadi dalam isolasi dari satu sama lain karena beberapa dari asumsi dapat berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti telah dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* diproyeksikan pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Juli 2025, Perseroan dan Entitas Anak mencatat penyisihan liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen KKA Azwir dan Rekan melalui laporan No. 250794/LAA-AAR/IX/2025 tanggal 4 September 2025 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut

Keterangan	31 Juli 2025
Tingkat diskonto per tahun	5,61 % - 7,13%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%
Usia pensiun normal	57 tahun / years
Tingkat kematian	Indonesia - IV (2019) 10% dari Tabel
Tingkat kecacatan	Mortalita Indonesia IV

IKATAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Juli 2025, beberapa perjanjian yang masih dan akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

Perusahaan

1. Perjanjian Kerja Sama Antara PT Rabik Bangun Nusantara dengan Perseroan

Pada tanggal 2 September 2021, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Rabik Bangun Nusantara, sehubungan dengan pemakaian merk RBN untuk penjualan kepada pihak ketiga. Perjanjian ini selama 5 tahun sejak tanggal perjanjian.

Entitas Anak

1. Perjanjian antara PT Gemilang Lintang Nusantara ("GLN") dan PT Pusat Fiber Indonesia ("PFI")

Pada tanggal 10 Oktober 2022, PFI, entitas anak, dan PT Gemilang Lintang Nusantara (GLN), pihak ketiga, mengadakan perjanjian kerjasama terkait dengan penyewaan jaringan kabel serat optik dengan segmentasi/lokasi dan panjang kabel serat optik yang dikomersialkan oleh GLN. Perjanjian ini untuk jangka waktu 9 tahun dan 3 bulan dengan deposit sebesar Rp 29.487.150.000. Deposit tersebut akan dikembalikan ke PFI sesuai dengan ketentuan perjanjian atau menjadi pengurang biaya sewa.

2. Perjanjian antara PT Jejaring Mitra Persada ("JMP") dan PT Pusat Fiber Indonesia ("PFI")

Berdasarkan perjanjian No. 019/JMP/PFI/LEG/PKS/V/2025, tanggal 2 Mei 2025, PFI, entitas anak, dan PT Jejaring Mitra Persada (JMP), pihak ketiga, mengadakan perjanjian kerja sama terkait dengan pemanfaatan kabel Fiber Optic (FO) dalam jaringan Telekomunikasi Batam - Singapore secara indefeasible right of use (IRU). Perjanjian ini berlaku sepanjang umur teknis kabel FO, sebagaimana ditentukan berdasarkan masa hidup operasional normal kabel FO, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara serah terima (BAST). Nilai dari perjanjian ini sebesar Rp 39.600.000.000 yang akan dibayarkan bertahap, dan PFI akan dikenakan biaya pemeliharaan dan perbaikan jaringan Telekomunikasi sebesar Rp 1.584.000.000/tahun.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 JULI 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA HASIL USAHA DIMASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN LIABILITAS SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN 31 JULI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SERTA SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN LIABILITAS & LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2025 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Grup beserta catatan atas laporan keuangan. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain).

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain). Laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Juli 2025 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Ridho Fathoni, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1629 yang dalam laporannya No. 00427/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/XII/2025 pada tanggal 4 Desember 2025. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Dulgani, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 0165 yang dalam laporannya No. 00091/2.0119/AU.1/05/0165-1/1/III/2025 pada tanggal 27 Maret 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 1023 yang dalam laporannya No. 00114/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 pada tanggal 8 April 2024.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	113.618.642.420	61.911.440.465	61.802.426.896
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	29.685.954.450	4.824.019.494	3.660.631.541
Piutang lain-lain - pihak ketiga	18.052.123	1.630.000	116.621.907
Pajak dibayar di muka	821.124.689	19.991.051	73.803.972
Uang muka	6.279.592.130	24.989.710	24.989.710
Biaya dibayar di muka	348.686.333	198.386.140	86.318.530
Biaya emisi ditangguhkan	815.020.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	151.587.072.145	66.980.456.860	65.764.792.556
Aset Tidak Lancar			
Uang muka setelah dikurangi bagian lancar	45.241.350.000	29.487.150.000	75.497.309.355
Aset pajak tangguhan - neto	209.741.375	257.877.193	239.241.779
Aset tetap - neto	140.915.265.621	132.496.368.609	79.867.743.720
Aset hak guna - neto	374.918.909	59.783.494	1.881.007.399
Goodwill	553.048.947	553.048.947	553.048.947
Uang Jaminan	20.000.000	20.000.000	114.830.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	187.314.324.852	162.874.228.243	158.153.181.200
JUMLAH ASET	338.901.396.997	229.854.685.103	223.917.973.756
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha - pihak ketiga	13.323.440.891	11.444.724.311	6.221.278.715
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	122.963.350	121.400.000	151.000.000
Pihak berelasi	83.993.364	184.433.640	170.997.140
Utang pajak	4.036.532.177	184.823.523	366.734.575
Biaya masih harus dibayar	1.041.149.769	289.123.090	197.100.000
Uang muka penjualan	117.902.435	-	-
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank jangka panjang	1.285.714.284	-	-
Utang pembiayaan konsumen	349.900.442	330.314.049	174.666.781
Liabilitas sewa	169.061.457	38.546.730	208.900.390
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	20.530.658.169	12.593.365.343	7.490.677.601

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank jangka panjang	7.714.285.716	-	-
Utang pembiayaan konsumen	778.246.444	986.823.767	-
Liabilitas sewa	225.759.218	27.800.497	1.637.040.628
Liabilitas imbalan pascakerja	460.877.709	375.015.354	251.298.261
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.179.169.087	1.389.639.618	1.888.338.889
JUMLAH LIABILITAS	29.709.827.256	13.983.004.961	9.379.016.490
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham – nilai nominal Rp 10 per saham			
Modal dasar - 30.000.000.000 saham pada 31 Juli 2025 dan 31 Desember 2024 dan 10.000.000.000 saham pada 31 Desember 2023			
Modal ditempatkan dan disetor - 8.408.626.310 saham pada 31 Juli 2025, 7.500.067.714 saham pada 31 Desember 2024 dan 7.500.000.000 saham pada 31 Desember 2023	84.086.263.100	75.000.677.140	75.000.000.000
Tambahan modal disetor – neto	207.106.785.120	133.514.991.658	133.509.506.824
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	3.600.000.000	3.300.000.000	3.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	14.404.165.777	4.093.625.646	3.065.266.726
Rugi komprehensif lainnya	(24.249.044)	(37.690.975)	(35.892.921)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	309.172.964.953	215.871.603.469	214.538.880.629
Kepentingan Nonpengendali	18.604.788	76.673	76.637
JUMLAH EKUITAS	309.191.569.741	215.871.680.142	214.538.957.266
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	338.901.396.997	229.854.685.103	223.917.973.756

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
PENDAPATAN NETO	53.058.935.749	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(33.419.616.026)	(11.336.657.878)	(19.563.574.082)	(20.619.611.538)
LABA BRUTO	19.639.319.723	7.156.662.394	10.873.626.600	8.269.770.331
Beban penjualan	(434.510.279)	(676.437.441)	(1.108.176.734)	(834.198.370)
Beban umum dan administrasi	(5.051.745.940)	(4.947.452.998)	(8.655.795.317)	(6.129.423.499)
Penghasilan (beban) lain-lain – neto	24.169.628	(7.643.309)	200.640.188	40.327.718
LABA USAHA	14.177.233.132	1.525.128.646	1.310.294.737	1.346.476.180
Penghasilan keuangan	329.250.049	302.175.796	497.441.237	94.958.990
Beban keuangan	(116.280.816)	(131.575.166)	(111.698.031)	(131.305.772)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	14.390.202.365	1.695.729.276	1.696.037.943	1.310.129.398
Beban Pajak Penghasilan				
Kini	(3.076.705.407)	(278.384.810)	(385.810.167)	(605.630.152)
Tangguhan	(44.344.500)	(73.776.640)	18.131.177	171.192.773
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	11.269.152.458	1.343.567.826	1.328.358.953	875.692.019
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan pasti	17.233.266	1.343.001	(2.302.288)	(63.197.246)
Pajak penghasilan terkait	(3.791.318)	(294.138)	504.237	13.903.394
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	13.441.948	1.048.863	(1.798.051)	(49.293.852)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (lanjutan)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	11.270.624.360	1.343.567.360	1.328.358.920	875.692.735
Kepentingan nonpengendali	(1.471.902)	466	33	(716)
JUMLAH	11.269.152.458	1.343.567.826	1.328.358.953	875.692.019
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	11.284.066.291	1.344.616.223	1.326.560.866	826.398.901
Kepentingan nonpengendali	(1.471.885)	466	36	(734)
JUMLAH	11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167
LABA PER SAHAM DASAR	1,42	0,18	0,18	0,13
LABA PER SAHAM DILUSIAN	1,24	0,14	0,14	-
EBITDA	23.585.049.595	3.328.691.843	3.893.655.470	2.463.354.940
Bunga Berjalan	116.280.816	131.575.166	111.698.031	131.305.772

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	28.242.692.667	17.122.152.906	29.179.447.880	28.859.808.819
Pembayaran kas kepada pemasok	(14.096.786.073)	(6.829.382.251)	(14.308.302.233)	(49.409.446.235)
Pembayaran kas kepada karyawan	(3.235.927.794)	(3.662.285.267)	(6.024.158.092)	(3.899.050.890)
Pembayaran kas atas kegiatan operasi lainnya	(1.880.615.239)	(269.968.626)	(2.569.073.279)	(2.031.603.566)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	9.029.363.561	6.360.516.762	6.277.914.276	(26.480.291.872)
Penerimaan bunga	314.882.926	302.175.797	497.441.237	94.958.990
Pembayaran beban keuangan	(74.626.269)	(131.575.166)	(104.367.358)	(87.224.334)
Pembayaran pajak penghasilan	(312.466.733)	(467.002.737)	(564.090.078)	(559.428.786)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	8.957.153.485	6.064.114.656	6.106.898.077	(27.031.986.002)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Aset tetap				
Perolehan	(17.737.255.793)	(5.808.279.895)	(10.129.912.247)	(3.198.252.908)
Hasil Penjualan	-	-	4.504.504.505	-
Penambahan uang muka sewa	(24.255.000.000)	-	-	-
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	(6.010.000.000)	-	-	(58.674.489.517)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(48.002.255.793)	(5.808.279.895)	(5.625.407.742)	(61.872.742.425)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Hasil dari penerbitan saham	82.677.379.422	3.032.393	6.161.974	151.500.000.000
Penerimaan utang bank jangka panjang	9.000.000.000	-	-	-
Penerimaan dari kepentingan nonpengendali pendirian entitas anak	20.000.000	-	-	-
Pembayaran deviden	(660.084.229)	-	-	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(188.990.930)	(203.332.333)	(339.038.740)	(224.989.916)
Pembayaran liabilitas sewa	(96.000.000)	(24.852.000)	(39.600.000)	(178.000.000)
Pembayaran biaya emisi saham	-	-	-	(2.406.693.176)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	90.752.304.263	(225.151.940)	(372.476.766)	148.690.316.908
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	51.707.201.955	30.682.821	109.013.569	59.785.588.481
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	61.911.440.465	61.802.426.896	61.802.426.896	2.016.838.415
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	113.618.642.420	61.833.109.717	61.911.440.465	61.802.426.896

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Usaha	186,91%	9,74%	5,36%	44,82%
Beban Pokok Pendapatan	194,79%	-5,75%	-5,12%	43,49%
Laba Bruto	174,42%	48,35%	31,49%	48,25%
Laba Usaha	829,58%	40,51%	-2,69%	-29,41%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	748,61%	59,34%	29,46%	-26,59%
Laba Periode/Tahun Berjalan	738,75%	65,70%	51,69%	-36,26%
Jumlah Aset	46,68%	5,53%	2,65%	206,80%
Jumlah Liabilitas	99,42%	189,44%	49,09%	20,54%
Jumlah Ekuitas	43,04%	1,10%	0,62%	229,03%
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto / Pendapatan Usaha	37,01%	38,70%	35,72%	28,63%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan Usaha	21,26%	7,27%	4,36%	2,86%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / Beban Usaha	205,65%	23,91%	13,59%	11,87%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / Ekuitas (ROE)	3,65%	0,62%	0,61%	0,39%
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / Aset (ROA)	3,33%	0,58%	0,58%	0,37%
Rasio Keuangan (x)				
Aset / Liabilitas	11,41	15,51	16,44	23,87
Liabilitas / Ekuitas (Debt to Equity)	0,10	0,07	0,06	0,04
Liabilitas / Aset (Debt to Asset)	0,09	0,06	0,06	0,04
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio)	7,38	5,22	5,32	8,78
Interest Coverage Ratio (ICR) (EBITDA / Beban Bunga Pinjaman)	202,83	25,30	34,86	18,76
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	2,30	2,40	2,73	8,05
Debt to EBITDA	1,26	4,48	3,59	3,81

Selama periode 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 & 2023, Perseroan memiliki pinjaman kepada PT Toyota Astra Financial Service, PT BCA Finance, PT CIMB Niaga Finance dan PT Bank DKI. Melalui Perseroan, diantara seluruh Kreditur tersebut hanya Bank DKI yang mempersyaratkan adanya financial covenant yang wajib dipenuhi oleh Perseroan masing – masing berlaku untuk periode per 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Berikut financial covenant tersebut:

Financial Covenant	Persyaratan	Posisi Per			Keterangan
		31 Juli 2025	31 Des 2024	31 Des 2023	
Current Ratio	Minimal 1x	7,38x	-	-	- Seluruh persyaratan financial covenant telah terpenuhi.
Debt to Equity Ratio	Maksimal 2,5x	0,09x	-	-	
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 1x	2,30x	-	-	

PADA TANGGAL 31 JULI 2025, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN

Berikut perhitungan Interest Coverage dan Debt Service Coverage atas fasilitas Bank DKI pada Perseroan.

Keterangan	31 Juli 2025
Laba Bersih	14.390.202.365
Depresiasi	9.407.816.463
EBITDA	23.585.049.595
Schedule Angsuran Pokok	10.128.146.858
Schedule Beban Bunga	116.280.816
ICR	202,83
DSCR	2,30

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Konsolidasian Penting, Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya.

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain). Laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Juli 2025 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Ridho Fathoni, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1629 yang dalam laporannya No. 00427/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/XII/2025 pada tanggal 4 Desember 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Dulgani, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 0165 yang dalam laporannya No. 00091/2.0119/AU.1/05/0165-1/1/III/2025 pada tanggal 27 Maret 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 1023 yang dalam laporannya No. 00114/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 pada tanggal 8 April 2024.

5.1 Umum

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 16 Desember 2016 dari Notaris Devi Prihartanti, S.H. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU 0002586.AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 20 Januari 2017. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.670 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253540 tanggal 12 Desember 2025, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0281104.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Desember 2025 ("**Akta Perseroan No. 1.670/2025**"), yang mana berdasarkan Akta Perseroan No. 1.670/2025 para pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan portepel dan perubahan isi Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang informasi dan komunikasi. Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan berupa internet service provider dan kegiatan usaha penunjang berupa aktivitas telekomunikasi dengan kabel, jasa sistem komunikasi data, interkoneksi internet, dan jual kembali jasa telekomunikasi.

Perseroan memulai kegiatan operasional pada tahun 2017.

Perseroan berdomisili di Gedung Cyber Lantai 10 Jl. Kuningan Barat No. 8, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan operasi Perusahaan di Rich Palace A1, Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40, Jakarta Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Induk perusahaan adalah PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara.

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak yang dikonsolidasikan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung dengan ringkasan sebagai berikut:

Entitas Anak – Langsung

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	PT Data Prima Solusindo	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2022	Kabupaten Tangerang	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
2	PT Pusat Fiber Indonesia	Perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	2022	2022	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%
3	PT Internet Anak Bangsa	Perdagangan besar, konstruksi sipil, konstruksi khusus, konstruksi gedung	2025	2025	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99%
4	PT Garuda Prima Internetindo *)	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2025	Bali	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%

**Keterangan: Pelaksanaan akuisisi PT Garuda Prima Internetindo oleh Perseroan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 dan telah terkonsolidasi pada Laporan Keuangan Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2025.*

5.2 Kebijakan Akuntansi Penting

Perseroan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dengan estimasi tersebut.

Standar dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru serta amendemen dan penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 namun tidak berdampak secara material terhadap pelaporan kinerja ataupun posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 117 tentang “Kontrak Asuransi”;
- Amendemen PSAK No. 117 tentang “Kontrak Asuransi - Penerapan Awal PSAK No. 117 dan PSAK No. 109 - Informasi Komparatif”; dan
- Amendemen PSAK No. 221 tentang “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran”.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, terdapat pula beberapa standar dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru serta amendemen ataupun penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan lainnya yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian tersebut akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026 dan 2027, sebagai berikut:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, “Instrumen Keuangan” dan PSAK No. 107, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” tentang “Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan”.

1 Januari 2027

- PSAK No. 118 tentang “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan”.

Penerapan dini untuk standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan di atas diperkenankan.

Perseroan masih mengevaluasi penerapan dari standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian tersebut dan belum dapat menentukan dampak yang mungkin timbul terhadap pelaporan keuangan Perseroan secara keseluruhan.

5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Dan Kinerja Perseroan

Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan:

Faktor Perizinan atau Regulasi Pemerintah

Layanan infrastruktur telekomunikasi yang ditawarkan Perseroan tunduk pada peraturan dan perizinan yang cenderung lebih ketat dibandingkan sebagian besar industri lain. Perseroan tunduk pada pengawasan dan peraturan di bawah berbagai otoritas berwenang Indonesia termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan badan pemerintah terkait lainnya. Perseroan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan peraturan tersebut melalui izin-izin yang diberikan. Peraturan-peraturan yang kerap kali berubah mengakibatkan perlunya penyesuaian izin-izin yang telah diperoleh.

Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dalam izin-izin yang diberikan, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai atau dianggap melanggar izin/peraturan perundangan yang berlaku oleh instansi pemerintah yang berwenang termasuk pemenuhan atas pembatasan kepemilikan investor asing dalam kegiatan usahanya, maka izin-izin Perseroan dapat sewaktu-waktu dihentikan dan/atau dicabut. Apabila hal ini terjadi, dapat mempengaruhi kinerja Perseroan sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan. Perizinan yang dimaksud antara lain antara lain Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diantaranya Izin Internet Service Provider (ISP), dan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dengan Media Fiber Optik Terrestrial.

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Perseroan memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi serta memiliki kompetensi dan keterampilan teknis yang mumpuni, terutama pada posisi teknisi dan staf teknis operasional. Hal ini disebabkan oleh karakteristik industri jasa akses internet yang menuntut pemahaman mendalam mengenai infrastruktur jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem keamanan informasi. SDM yang memiliki keahlian di bidang tersebut berperan penting dalam menjaga keandalan layanan, stabilitas jaringan, dan kepuasan pelanggan.

Kekurangan keterampilan teknis di dalam tim dapat berdampak pada menurunnya kemampuan perusahaan dalam memelihara, mengembangkan, dan mengoptimalkan infrastruktur jaringan, serta menghambat pemberian dukungan teknis yang cepat dan tepat kepada pelanggan. Oleh karena itu, Perseroan perlu secara konsisten melaksanakan program pelatihan dan pengembangan SDM, baik melalui pelatihan internal yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan, maupun pelatihan eksternal bekerja sama dengan lembaga profesional atau vendor teknologi.

Program pengembangan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga untuk membangun kompetensi adaptif terhadap kemajuan teknologi dan inovasi di sektor telekomunikasi dan internet. Dengan demikian, Perseroan diharapkan dapat memiliki tenaga kerja yang kompeten, tanggap terhadap perubahan, dan mampu memberikan layanan yang unggul dan berdaya saing tinggi di tengah persaingan industri yang semakin ketat untuk dapat menciptakan kinerja dan kondisi keuangan yang baik.

Faktor Pendanaan

Dalam menunjang program kerja dan pengembangan usaha di industri jasa telekomunikasi dan akses internet, Perseroan memerlukan ketersediaan dana investasi yang cukup besar sebagai modal awal dalam pembangunan dan perluasan jaringan infrastruktur. Investasi tersebut meliputi pembangunan jaringan fiber optik, penyediaan perangkat transmisi dan distribusi, instalasi perangkat pelanggan, serta pengadaan sistem pendukung operasional dan pemeliharaan.

Dengan strategi pembiayaan yang tepat, didukung oleh pengelolaan pemasaran yang efektif, Perseroan dapat memastikan bahwa investasi jaringan yang dilakukan memberikan nilai tambah ekonomi dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Faktor Jaringan Optik

Perseroan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap jaringan kabel yang menjadi tulang punggung operasional layanan, dengan panjang jaringan mencapai ratusan kilometer yang tersebar di wilayah perkotaan maupun daerah terbuka. Infrastruktur jaringan tersebut merupakan aset vital yang berfungsi sebagai media utama dalam penyaluran data, suara, dan layanan internet kepada pelanggan. Oleh karena itu, keandalan jaringan menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Namun demikian, jaringan kabel yang membentang luas tersebut memiliki potensi kerentanan terhadap berbagai risiko fisik, seperti tindakan pencurian kabel, pemotongan oleh pihak tidak bertanggung jawab, kebakaran, kerusakan pada tiang atau jalur pendukung, serta dampak dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Gangguan-gangguan tersebut tidak hanya menyebabkan penurunan kualitas layanan (*service degradation*) dan terhentinya konektivitas pelanggan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial akibat biaya

perbaikan, kehilangan potensi pendapatan, serta menurunnya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap kualitas layanan Perseroan.

Apabila gangguan tersebut terjadi secara berulang atau meluas, dampaknya dapat berimplikasi pada menurunnya daya saing Perseroan di pasar, berkurangnya daya tarik bagi calon pelanggan baru, serta meningkatnya risiko churn atau perpindahan pelanggan ke penyedia layanan lain. Oleh sebab itu, Perseroan melakukan pengelolaan risiko infrastruktur secara proaktif, antara lain melalui pemantauan jaringan secara real-time, peningkatan sistem keamanan fisik, kerja sama dengan pihak keamanan setempat, serta penerapan standar keselamatan dan ketahanan infrastruktur yang tinggi.

Dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, Perseroan dapat meminimalkan dampak gangguan jaringan, menjaga kontinuitas layanan, serta mempertahankan reputasi dan kepercayaan pelanggan sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang andal dan profesional.

Faktor Ketersediaan Layanan Internet

Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi secara berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah yang relevan bagi pelanggan guna memperkuat daya saing di pasar. Inovasi tidak hanya difokuskan pada pengembangan produk dan layanan, tetapi juga pada peningkatan pengalaman pelanggan secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan kepuasan dan loyalitas jangka panjang.

Dalam menghadapi dinamika industri telekomunikasi yang terus berkembang, Perseroan perlu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mengadopsi inovasi digital untuk menciptakan efisiensi serta menghadirkan layanan yang unggul. Melalui langkah tersebut, Perseroan dapat memperluas variasi dan fleksibilitas paket berlangganan, sekaligus memastikan tersedianya layanan dengan kualitas tinggi, keandalan yang baik, serta harga yang kompetitif.

Dengan strategi inovasi yang terarah dan berkelanjutan, Perseroan diharapkan mampu mempertahankan pelanggan yang sudah ada, menarik pelanggan baru, serta memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia layanan yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

5.4 Analisis Keuangan

A. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
PENDAPATAN NETO	53.058.935.749	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(33.419.616.026)	(11.336.657.878)	(19.563.574.082)	(20.619.611.538)
LABA BRUTO	19.639.319.723	7.156.662.394	10.873.626.600	8.269.770.331
Beban penjualan	(434.510.279)	(676.437.441)	(1.108.176.734)	(834.198.370)
Beban umum dan administrasi	(5.051.745.940)	(4.947.452.998)	(8.655.795.317)	(6.129.423.499)
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	24.169.628	(7.643.309)	200.640.188	40.327.718
LABA USAHA	14.177.233.132	1.525.128.646	1.310.294.737	1.346.476.180
Penghasilan keuangan	329.250.049	302.175.796	497.441.237	94.958.990
Beban keuangan	(116.280.816)	(131.575.166)	(111.698.031)	(131.305.772)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	14.390.202.365	1.695.729.276	1.696.037.943	1.310.129.398
Beban Pajak Penghasilan Kini	(3.076.705.407)	(278.384.810)	(385.810.167)	(605.630.152)
Tanggungan	(44.344.500)	(73.776.640)	18.131.177	171.192.773
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	11.269.152.458	1.343.567.826	1.328.358.953	875.692.019
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan pasti	17.233.266	1.343.001	(2.302.288)	(63.197.246)
Pajak penghasilan terkait	(3.791.318)	(294.138)	504.237	13.903.394
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	13.441.948	1.048.863	(1.798.051)	(49.293.852)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	11.270.624.360	1.343.567.360	1.328.358.920	875.692.735
Kepentingan nonpengendali	(1.471.902)	466	33	(716)
Jumlah	11.269.152.458	1.343.567.826	1.328.358.953	875.692.019
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Entitas induk	11.284.066.291	1.344.616.223	1.326.560.866	826.398.901
Kepentingan nonpengendali	(1.471.885)	466	36	(734)
Jumlah	11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167
LABA PER SAHAM DASAR	1,42	0,18	0,18	0,13
LABA PER SAHAM DILUSIAN	1,24	0,14	0,14	-

PENDAPATAN NETO

Rincian pendapatan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Juli 2024, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Penjualan Internet	52.381.678.439	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869
Konstruksi	677.257.310	-	-	-
Pendapatan Neto	53.058.935.749	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869

Rincian berdasarkan jenis pelanggan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pihak ketiga	53.058.935.749	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869
Pihak berelasi	-	-	-	-
Jumlah	53.058.935.749	18.493.320.272	30.437.200.682	28.889.381.869

Pendapatan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 mengalami kenaikan naik sebesar Rp 34.565.615.477 atau 186,91% dibandingkan dengan 31 Juli 2024 hal ini disebabkan oleh kenaikan segmen pendapatan internet dan mulai adanya penjualan dari segmen konstruksi yang dilakukan oleh entitas anak Perseroan. Kenaikan ini sejalan dengan pengembangan jaringan kabel fiber optic yang semakin besar sehingga dapat memberikan peningkatan yang signifikan bagi pendapatan Perseroan yang seluruhnya merupakan pendapatan dari pihak ketiga.

Pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.547.818.813 atau 5,36% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 hal ini disebabkan oleh kenaikan pada segmen pendapatan internet. Kenaikan ini sejalan dengan pengembangan jaringan kabel fiber optic yang semakin besar sehingga dapat memberikan peningkatan yang signifikan bagi pendapatan Perseroan yang seluruhnya merupakan pendapatan dari pihak ketiga.

Kenaikan volume penjualan ini berasal dari perluasan pasar, peningkatan permintaan pelanggan, serta strategi pemasaran yang lebih efektif. Sementara itu, Perseroan tidak menetapkan kenaikan harga jual yang merupakan kebijakan manajemen Perseroan untuk meningkatkan *occupancy*. Selain itu, terdapat layanan atau jasa baru yang dikembangkan oleh Perseroan, masing - masing penyebab yang disampaikan berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan serta pertumbuhan usaha Perseroan

Beban Pokok Pendapatan

Rincian Beban Pokok Pendapatan pada tanggal 31 Juli 2025 dan 2024, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
<i>Bandwidth</i>	23.247.969.968	9.870.529.110	16.622.991.855	19.882.938.552
Penyusutan aset tetap	8.943.313.370	1.233.128.768	1.870.186.738	489.687.820
Sewa jaringan	1.468.536.000	-	-	-
Konstruksi	541.796.688	-	-	-
Colocation server	218.000.000	233.000.000	1.070.395.489	246.985.166
Beban Pokok Pendapatan	33.419.616.026	11.336.657.878	19.563.574.082	20.619.611.538

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 22.082.958.148 atau sebesar 194,79% dibandingkan dengan 31 Juli 2024. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan dari pembelian *Bandwidth* yang sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan dari penjualan internet.

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 1.056.037.456 atau sebesar -5,12% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan dari pembelian *Bandwidth*.

Beban Penjualan

Rincian beban penjualan pada tanggal 31 Juli 2025 dan 2024 serta 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Komisi penjualan	240.481.257	453.432.260	782.958.029	540.465.834
Jamuan	138.879.942	153.616.293	238.389.877	237.199.738
Ekspedisi	54.599.580	3.955.000	7.894.940	13.532.798
Pemasaran	549.500	65.433.888	78.933.888	43.000.000
Beban Penjualan	434.510.279	676.437.441	1.108.176.734	834.198.370

Beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 241.927.162 atau sebesar -35,76% dibandingkan dengan 31 Juli 2024. Hal ini disebabkan oleh efisiensi yang dilakukan Perseroan pada beban komisi penjualan dan jamuan.

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 273.978.364 atau sebesar 32,84% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan komisi penjualan dan beban pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan untuk dapat meningkatkan pendapatan.

Beban Umum dan Administrasi

Rincian beban umum dan administrasi pada tanggal 31 Juli 2025 dan 2024 serta 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Gaji dan upah	3.001.606.034	3.217.709.777	5.244.749.887	3.383.742.831
Tenaga ahli	569.150.059	92.694.500	765.732.839	242.738.076
Penyusutan aset tetap	375.045.411	313.671.452	568.963.563	428.510.490
Materai dan biaya kantor	268.433.104	244.420.508	505.885.618	614.215.925
Sewa	188.552.935	271.051.161	558.552.161	226.884.994
Utilitas	123.556.872	155.940.598	182.399.012	144.371.759
Transportasi	120.493.887	144.972.959	275.779.063	230.050.647
Imbalan pascakerja	103.095.621	70.825.303	121.414.805	99.616.556
Pemeliharaan	95.423.307	73.298.000	18.600.000	38.572.059
Penyusutan aset hak guna	89.457.681	256.762.977	144.239.904	198.680.450
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	72.210.561	-	94.364.849	120.181.391
Asuransi	25.499.526	13.507.480	29.460.163	32.633.942
Beban pajak	16.373.581	14.678.096	48.069.384	224.824.539
Sumbangan	2.000.000	-	-	19.900.000
Perijinan	847.361	53.785.187	67.449.069	75.151.350
Keanggotaan	-	24.135.000	30.135.000	49.348.490
Beban Umum dan Administrasi	5.051.745.940	4.947.452.998	8.655.795.317	6.129.423.499

Beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 104.292.942 atau sebesar 2,11% dibandingkan dengan 31 Juli 2024. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban tenaga ahli yang digunakan oleh Perseroan dalam menjalankan operasinya.

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.526.371.818 atau sebesar 41,22% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban gaji untuk mendukung operasional Perseroan.

Laba Periode/Tahun Berjalan

Laba untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2025 adalah sebesar Rp 11.269.152.458 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.925.584.632 atau sebesar 738,75% dibandingkan 31 Juli 2024. Peningkatan laba tersebut dikarenakan adanya peningkatan signifikan pada penjualan internet yang diperoleh oleh Perseroan.

Laba untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.328.358.953 mengalami kenaikan sebesar Rp 452.666.934 atau sebesar 51,69% dibandingkan 31 Desember 2023. Peningkatan laba tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada penjualan internet yang diperoleh oleh Perseroan.

Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Jumlah laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 adalah sebesar Rp 11.282.594.406 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.937.977.715 atau sebesar 739,09% dibandingkan 31 Juli 2024. Peningkatan jumlah laba komprehensif tersebut dikarenakan adanya peningkatan signifikan pada penjualan internet yang diperoleh oleh Perseroan.

Jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.326.560.902 mengalami kenaikan sebesar Rp 500.162.735 atau sebesar 60,52% dibandingkan 31 Desember 2023. Peningkatan jumlah laba komprehensif tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada penjualan internet yang diperoleh oleh Perseroan.

B. Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Berikut adalah ringkasan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023.

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
ASET LANCAR	151.587.072.145	66.980.456.860	65.764.792.556
ASET TIDAK LANCAR	187.314.324.852	162.874.228.243	158.153.181.200
JUMLAH ASET	338.901.396.997	229.854.685.103	223.917.973.756
LIABILITAS JANGKA PENDEK	20.530.658.169	12.593.365.343	7.490.677.601
LIABILITAS JANGKA PANJANG	9.179.169.087	1.389.639.618	1.888.338.889
JUMLAH LIABILITAS	29.709.827.256	13.983.004.961	9.379.016.490
JUMLAH EKUITAS	309.191.569.741	215.871.680.142	214.538.957.266

Aset

Komposisi aset Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	113.618.642.420	61.911.440.465	61.802.426.896
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	29.685.954.450	4.824.019.494	3.660.631.541
Piutang lain-lain - pihak ketiga	18.052.123	1.630.000	116.621.907
Pajak dibayar di muka	821.124.689	19.991.051	73.803.972
Uang muka	6.279.592.130	24.989.710	24.989.710
Biaya dibayar di muka	348.686.333	198.386.140	86.318.530
Biaya emisi ditangguhkan	815.020.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	151.587.072.145	66.980.456.860	65.764.792.556

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka setelah dikurangi bagian lancar	45.241.350.000	29.487.150.000	75.497.309.355
Aset pajak tangguhan – neto	209.741.375	257.877.193	239.241.779
Aset tetap – neto	140.915.265.621	132.496.368.609	79.867.743.720
Aset hak guna – neto	374.918.909	59.783.494	1.881.007.399
<i>Goodwill</i>	553.048.947	553.048.947	553.048.947
Uang jaminan	20.000.000	20.000.000	114.830.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	187.314.324.852	162.874.228.243	158.153.181.200
JUMLAH ASET	338.901.396.997	229.854.685.103	223.917.973.756

Aset Lancar

Aset lancar konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2025 dibandingkan posisi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 84.606.615.285 atau sebesar 126,31% dari Rp 66.980.456.860 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 151.587.072.145 pada tanggal 31 Juli 2025. Kenaikan aset lancar konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada piutang usaha pada pihak ketiga dan uang muka. Peningkatan piutang usaha mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan pada tahun 2025. Sedangkan peningkatan uang muka dikarenakan pada tahun 2025 Perseroan melakukan pengembangan jaringan kabel fiber optik sehingga menyebabkan peningkatan atas uang muka *project telco* tersebut.

Aset lancar konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.215.664.304 atau sebesar 1,85% dari Rp 65.764.792.556 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 66.980.456.860 pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan aset lancar konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada piutang usaha pada pihak ketiga. Peningkatan piutang usaha mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan pada tahun 2024.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2025 dibandingkan posisi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 24.440.096.609 atau sebesar 15,01% dari Rp 162.874.228.243 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 187.314.324.852 pada tanggal 31 Desember 2025. Kenaikan aset tidak lancar konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada uang muka jangka panjang dan aset tetap Perseroan. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 Perseroan melakukan penambahan aset tetap dan uang muka yang cukup signifikan untuk pengembangan jaringan kabel fiber optik.

Aset tidak lancar konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.721.047.043 atau sebesar 2,99% dari Rp 158.153.181.200 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 162.874.228.243 pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan aset tidak lancar konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada aset tetap Perseroan dan penurunan uang muka jangka panjang. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 Perseroan melakukan penambahan aset tetap dan telah terealisasinya uang muka pengembangan jaringan kabel fiber optik.

Jumlah Aset

Jumlah aset konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2025 dibandingkan posisi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 109.046.711.894 atau sebesar 47,44% dari Rp 229.854.685.103 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 338.901.396.997 pada tanggal 31 Desember 2025. Kenaikan aset konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada aset lancar seperti piutang usaha pihak ketiga dan uang muka, serta peningkatan pada aset tidak lancar seperti peningkatan pada aset tetap dan uang muka jangka panjang Perseroan.

Jumlah aset konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.936.711.347 atau sebesar 2,65% dari Rp 223.917.973.756 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 229.854.685.103 pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan aset konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada aset lancar seperti piutang usaha pihak ketiga dan peningkatan pada aset tidak lancar seperti peningkatan pada aset tetap dan penurunan uang muka jangka panjang Perseroan.

Liabilitas

Komposisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha - pihak ketiga	13.323.440.891	11.444.724.311	6.221.278.715
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	122.963.350	121.400.000	151.000.000
Pihak berelasi	83.993.364	184.433.640	170.997.140
Utang pajak	4.036.532.177	184.823.523	366.734.575
Biaya masih harus dibayar	1.041.149.769	289.123.090	197.100.000
Uang muka penjualan	117.902.435	-	-
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank jangka panjang	1.285.714.284	-	-
Utang pembiayaan konsumen	349.900.442	330.314.049	174.666.781
Liabilitas sewa	169.061.457	38.546.730	208.900.390
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	20.530.658.169	12.593.365.343	7.490.677.601
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank jangka panjang	7.714.285.716	-	-
Utang pembiayaan konsumen	778.246.444	986.823.767	-
Liabilitas sewa	225.759.218	27.800.497	1.637.040.628
Liabilitas imbalan pascakerja	460.877.709	375.015.354	251.298.261
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.179.169.087	1.389.639.618	1.888.338.889
JUMLAH LIABILITAS	29.709.827.256	13.983.004.961	9.379.016.490

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2025 dibandingkan posisi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.937.292.826 atau sebesar 63,03% dari Rp 12.593.365.343 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 20.530.658.169 pada tanggal 31 Juli 2025. Kenaikan liabilitas jangka pendek konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada utang pajak dan utang bank. Peningkatan pada utang pajak perseroan dikarenakan peningkatan pendapatan dan laba bersih Perseroan yang menyebabkan peningkatan utang pajak terutama pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 29. Sementara itu peningkatan atas utang bank Perseroan dikarenakan adanya kebutuhan pendanaan yang diperlukan oleh Perseroan untuk pembelian tanah dan bangunan oleh Perseroan.

Liabilitas jangka pendek konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.102.687.742 atau sebesar 68,12% dari Rp 7.490.677.601 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 12.593.365.343 pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan liabilitas jangka pendek konsolidasian ini terjadi karena adanya peningkatan pada utang usaha pihak ketiga Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2025 dibandingkan posisi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.789.529.469 atau sebesar 560,54% dari Rp 1.389.639.618 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 9.179.169.087 pada tanggal 31 Juli 2025. Kenaikan liabilitas jangka panjang konsolidasian ini terjadi karena adanya kenaikan pada utang bank jangka panjang Perseroan. Peningkatan liabilitas jangka panjang pada tahun 2025 dikarenakan adanya kebutuhan pendanaan yang diperlukan oleh Perseroan dalam untuk pembelian tanah dan bangunan oleh Perseroan.

Liabilitas jangka panjang konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 498.699.271 atau sebesar -26,41% dari Rp 1.888.338.889 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 1.389.639.618 pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan liabilitas jangka panjang konsolidasian ini terjadi karena adanya penurunan pada liabilitas sewa Perseroan atas aset hak guna yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2025 dibandingkan posisi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 15.726.822.295 atau sebesar 112,47% dari Rp 13.983.004.961 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 29.709.827.256 pada tanggal 31 Juli 2025. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada liabilitas jangka pendek dan juga peningkatan pada liabilitas jangka panjang seperti utang bank jangka panjang dan utang pajak Perseroan, dimana peningkatan ini dikarenakan kebutuhan pendanaan Perseroan yang diperlukan untuk pembelian tanah dan bangunan oleh Perseroan dan juga adanya peningkatan pada laba periode berjalan Perseroan.

Jumlah liabilitas konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.603.988.471 atau sebesar 49,09% dari Rp 9.379.016.490 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 13.983.004.961 pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha pihak ketiga Perseroan

Ekuitas

Komposisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 10 per saham			
Modal dasar - 30.000.000.000 saham pada 31 Juli 2025 dan 10.000.000.000 saham pada 31 Desember 2024 dan 2023			
Modal ditempatkan dan disetor - 8.408.626.310 saham pada 31 Juli 2025, 7.500.067.714 saham pada 31 Desember 2024 dan 7.500.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023	84.086.263.100	75.000.677.140	75.000.000.000
Tambahan modal disetor - neto	207.106.785.120	133.514.991.658	133.509.506.824
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	3.600.000.000	3.300.000.000	3.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	14.404.165.777	4.093.625.646	3.065.266.726
Rugi komprehensif lainnya	(24.249.044)	(37.690.975)	(35.892.921)
Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	309.172.964.953	215.871.603.469	214.538.880.629
Kepentingan Nonpengendali	18.604.788	76.673	76.637
JUMLAH EKUITAS	309.191.569.741	215.871.680.142	214.538.957.266

Pada tanggal 31 Juli 2025 ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar 43,23% atau sebesar Rp 93.319.889.599 dari Rp 215.871.680.142 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 309.191.569.741 pada tanggal 31 Juli 2025. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan tambahan modal disetor melalui pelaksanaan waran sebesar Rp 73.591.793.462 dan peningkatan pada saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya akibat kenaikan laba periode berjalan sebesar Rp 10.310.540.131.

Pada tanggal 31 Desember 2024 ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar 0,62% atau sebesar Rp 1.332.722.876 dari Rp 214.538.957.266 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 215.871.680.142 pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan ini disebabkan peningkatan pada saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya akibat kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp 1.328.358.920.

C. Analisis Arus Kas Konsolidasian

Berikut adalah ringkasan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 dan 2024, 31 Desember 2024 dan 2023:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	28.242.692.667	17.122.152.906	29.179.447.880	28.859.808.819
Pembayaran kas kepada pemasok	(14.096.786.073)	(6.829.382.251)	(14.308.302.233)	(49.409.446.235)
Pembayaran kas kepada karyawan	(3.235.927.794)	(3.662.285.267)	(6.024.158.092)	(3.899.050.890)
Pembayaran kas atas kegiatan operasi lainnya	(1.880.615.239)	(269.968.626)	(2.569.073.279)	(2.031.603.566)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	9.029.363.561	6.360.516.762	6.277.914.276	(26.480.291.872)
Penerimaan bunga	314.882.926	302.175.797	497.441.237	94.958.990
Pembayaran beban keuangan	(74.626.269)	(131.575.166)	(104.367.358)	(87.224.334)
Pembayaran pajak penghasilan	(312.466.733)	(467.002.737)	(564.090.078)	(559.428.786)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	8.957.153.485	6.064.114.656	6.106.898.077	(27.031.986.002)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Aset tetap				
Perolehan	(17.737.255.793)	(5.808.279.895)	(10.129.912.247)	(3.198.252.908)
Hasil Penjualan	-	-	4.504.504.505	-
Penambahan uang muka sewa	(24.255.000.000)	-	-	-
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	(6.010.000.000)	-	-	(58.674.489.517)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(48.002.255.793)	(5.808.279.895)	(5.625.407.742)	(61.872.742.425)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Hasil dari penerbitan saham	82.677.379.422	3.032.393	6.161.974	151.500.000.000
Penerimaan utang bank jangka panjang	9.000.000.000	-	-	-
Penerimaan dari kepentingan nonpengendali pendirian entitas anak	20.000.000	-	-	-
Pembayaran deviden	(660.084.229)	-	-	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(188.990.930)	(203.332.333)	(339.038.740)	(224.989.916)
Pembayaran liabilitas sewa	(96.000.000)	(24.852.000)	(39.600.000)	(178.000.000)
Pembayaran biaya emisi saham	-	-	-	(2.406.693.176)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	90.752.304.263	(225.151.940)	(372.476.766)	148.690.316.908
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	51.707.201.955	30.682.821	109.013.569	59.785.588.481
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	61.911.440.465	61.802.426.896	61.802.426.896	2.016.838.415
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	113.618.642.420	61.833.109.717	61.911.440.465	61.802.426.896

- **Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Perolehan kas dari kegiatan operasi di tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 8.957.153.485 berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 28.242.692.667 dan penerimaan bunga sebesar Rp 314.882.926, dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 14.096.786.073, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 3.235.927.794, pembayaran kas atas kegiatan operasi lainnya sebesar Rp 1.880.615.239, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 312.466.733, serta pembayaran beban keuangan sebesar Rp 74.626.269.

Perolehan kas dari kegiatan operasi di tanggal 31 Juli 2024 sebesar Rp 6.064.114.656 berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 17.122.152.906, dan penerimaan bunga sebesar Rp 302.175.797, dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 6.829.382.251, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 3.662.285.267, pembayaran kas atas kegiatan operasi lainnya sebesar Rp 269.968.626, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 467.002.737, serta pembayaran beban keuangan sebesar Rp 131.575.166.

Perolehan kas dari kegiatan operasi di tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 6.106.898.077 berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 29.179.447.880, dan penerimaan bunga sebesar Rp 497.441.237, dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 14.308.302.233, pembayaran kas atas kegiatan operasi lainnya sebesar Rp 2.569.073.279, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 6.024.158.092, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 564.090.078 serta pembayaran beban keuangan sebesar Rp 104.367.358.

Penggunaan kas dari kegiatan operasi di tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 27.031.986.002 berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 28.859.808.819, dan penerimaan bunga sebesar Rp 94.958.990, dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 49.409.446.235, pembayaran kas atas kegiatan operasi lainnya sebesar Rp 2.031.603.566, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 3.899.050.890, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 559.428.786 serta pembayaran beban keuangan sebesar Rp 87.224.334.

- **Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Dari kegiatan investasi selama periode 31 Juli 2025, Perseroan dan Entitas anak mencatatkan penggunaan kas untuk investasi sebesar Rp 48.002.255.793 terdiri perolehan aset tetap sebesar Rp 17.737.255.793, pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp 6.010.000.000 dan pembayaran uang muka sewa sebesar Rp 24.255.000.000.

Dari kegiatan investasi selama periode 31 Juli 2024, Perseroan dan Entitas anak mencatatkan penggunaan kas untuk investasi sebesar Rp 5.808.279.895 terdiri dari perolehan aset tetap sebesar Rp 5.808.279.895.

Pada tanggal 31 Desember 2024, kas neto digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 5.625.407.742 terdiri dari pembayaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 10.129.912.247 dan penerimaan penjualan aset tetap sebesar Rp 4.504.504.505.

Pada tanggal 31 Desember 2023, kas neto digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 61.872.742.425 terdiri dari pembayaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 3.198.252.908 dan penambahan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp 58.674.489.517.

- **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Dari kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp 90.752.304.263 terutama berasal dari hasil penerbitan saham atas pelaksanaan waran sebesar Rp 82.677.379.422, penerimaan utang bank sebesar Rp 9.000.000.000, penerimaan dari kepentingan nonpengendali pendirian entitas anak Rp 20.000.000 dan dikurangi pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 188.990.930, pembayaran liabilitas sewa Rp 96.000.000 dan pembayaran dividen Rp 660.084.229.

Dari kas yang digunakan dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Juli 2024 sebesar Rp 225.151.940 terutama berasal dari hasil penerbitan saham atas pelaksanaan waran sebesar Rp 3.032.393 dikurangi pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 203.332.333 dan pembayaran liabilitas sewa Rp 24.852.000.

Dari kas yang digunakan dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 372.476.766 terutama berasal dari hasil penerbitan saham atas pelaksanaan waran sebesar Rp 6.161.974 dikurangi pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 339.038.740 dan pembayaran liabilitas sewa Rp 39.600.000.

Pada tanggal 31 Desember 2023, kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 148.690.316.908 berasal dari penambahan setoran modal sebesar Rp 151.500.000.000 dan dikurangi pembayaran biaya emisi saham sebesar Rp 2.406.693.176, pembayaran utang pembiayaan konsumen Rp 224.989.916 dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp 178.000.000.

D. Likuiditas dan Sumber Modal

Sumber pendanaan Perseroan dan Entitas Anak berasal dari 2 (dua) sumber yakni internal dan eksternal. Pembiayaan dari internal berasal dari kas internal Perseroan dan Entitas Anak. Saat ini Perseroan dan Entitas Anak memiliki arus kas internal yang kurang memadai untuk menjaga likuiditas Perseroan dan Entitas Anak, sehingga Perseroan dan Entitas Anak harus berfokus pada pencarian sumber dana eksternal seperti penerbitan surat utang.

Langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan kecukupan untuk mendapatkan modal kerja tambahan adalah dengan melakukan penerbitan surat utang atau pinjaman.

Tidak ada sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Jika modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mengajukan pinjaman dari Bank atau pihak ketiga untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan.

E. Analisis Rasio Keuangan

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio Lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 7,38x, 5,32x dan 8,78x. Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan/penurunan atau penurunan likuiditas.

Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan dan Entitas Anak merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya dan tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan modal sendiri dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan total aset Perseroan.

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 0,10x, 0,06x dan 0,04x, serta Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 0,09x, 0,06x dan 0,04x.

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
Jumlah Aset	338.901.396.997	229.854.685.103	223.917.973.756
Jumlah Liabilitas	29.709.827.256	13.983.004.961	9.379.016.490
Jumlah Ekuitas	309.191.569.741	215.871.680.142	214.538.957.266
Solvabilitas (x)			
Liabilitas terhadap Aset	0,09	0,06	0,04
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,10	0,06	0,04

Imbal Hasil Aset

Imbal hasil aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara rugi bersih dengan jumlah aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Juli 2024, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 3,33%, 0,58%, 0,58% dan 0,37%.

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167
Jumlah Aset	338.901.396.997	231.050.532.409	229.854.685.103	223.917.973.756
Imbal Hasil Aset (%)	3,33%	0,58%	0,58%	0,37%

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan ekuitas.

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Juli 2024, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 3,65%, 0,62%, 0,61% dan 0,39%.

Terlampir adalah penjabaran sehubungan dengan rasio tersebut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	11.282.594.406	1.344.616.689	1.326.560.902	826.398.167
Jumlah Ekuitas	309.191.569.741	216.152.170.595	215.871.680.142	214.538.957.266
Imbal Hasil Ekuitas (%)	3,65%	0,62%	0,61%	0,39%

F. Segmen Operasi

Grup menetapkan segmen berdasarkan wilayah secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan posisi keuangan dan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Keterangan	31 Juli 2025		
	Jawa	Bali	Jumlah
<u>Laporan Laba Rugi Konsolidasian</u>			
Pendapatan neto	51.332.841.179	1.726.094.570	53.058.935.749
Beban pokok pendapatan	(32.229.984.780)	(1.189.631.246)	(33.419.616.026)
Laba bruto	19.102.856.399	536.463.324	19.639.319.723
Beban penjualan	(434.510.279)	-	(434.510.279)
Beban umum dan administrasi	(5.051.745.940)	-	(5.051.745.940)
Penghasilan usaha lainnya – neto	24.169.628	-	24.169.628
Laba usaha	13.640.769.808	536.463.324	14.177.233.132
Penghasilan keuangan	329.250.049	-	329.250.049
Beban keuangan	(116.280.816)	-	(116.280.816)
Laba sebelum pajak penghasilan	13.853.739.041	536.463.324	14.390.202.365
<u>Laporan posisi keuangan konsolidasian</u>			
Aset segmen	338.901.396.997	-	338.901.396.997
Liabilitas segmen	29.709.827.256	-	29.709.827.256
<u>Informasi Lainnya</u>			
Aset Tetap			
Biaya perolehan	154.425.056.225	-	154.425.056.225
Akumulasi penyusutan	13.509.790.604	-	13.509.790.604

Keterangan	31 Juli 2024		
	Jawa	Bali	Jumlah
<u>Laporan Laba Rugi Konsolidasian</u>			
Pendapatan neto	16.192.812.601	2.300.507.671	18.493.320.272
Beban pokok pendapatan	(9.877.933.819)	(1.458.724.059)	(11.336.657.878)
Laba bruto	6.314.878.782	841.783.612	7.156.662.394
Beban penjualan	(676.437.441)	-	(676.437.441)
Beban umum dan administrasi	(4.947.452.998)	-	(4.947.452.998)
Beban usaha lainnya - neto	(7.643.309)	-	(7.643.309)
Laba usaha	683.345.034	841.783.612	1.525.128.646
Penghasilan keuangan	302.175.796	-	302.175.796
Beban keuangan	(131.575.166)	-	(131.575.166)
Laba sebelum pajak penghasilan	853.945.664	841.783.612	1.695.729.276
<u>Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian</u>			
Aset segmen	231.050.532.409	-	231.050.532.409
Liabilitas segmen	14.898.361.815	-	14.898.361.815

Keterangan	31 Juli 2024		
	Jawa	Bali	Jumlah
Informasi Lainnya			
Aset Tetap			
Biaya perolehan	89.433.288.245	-	89.433.288.245
Akumulasi penyusutan	4.019.915.075	-	4.019.915.075

Keterangan	31 Desember 2024		
	Jawa	Bali	Jumlah
Laporan Laba Rugi Konsolidasian			
Pendapatan neto	27.325.879.626	3.111.321.056	30.437.200.682
Beban pokok pendapatan	(17.663.748.279)	(1.899.825.803)	(19.563.574.082)
Laba bruto	9.662.131.347	1.211.495.253	10.873.626.600
Beban penjualan	(1.108.176.734)	-	(1.108.176.734)
Beban umum dan administrasi	(8.655.795.317)	-	(8.655.795.317)
Penghasilan usaha lainnya - neto	200.640.188	-	200.640.188
Laba usaha	98.799.484	1.211.495.253	1.310.294.737
Penghasilan keuangan	497.441.237	-	497.441.237
Beban keuangan	(111.698.031)	-	(111.698.031)
Laba sebelum pajak penghasilan	484.542.690	1.211.495.253	1.696.037.943

Laporan Posisi Keuangan

Konsolidasian

Aset segmen	229.854.685.103	-	229.854.685.103
Liabilitas segmen	13.983.004.961	-	13.983.004.961

Informasi Lainnya

Aset Tetap			
Biaya perolehan	136.687.800.432	-	136.687.800.432
Akumulasi penyusutan	4.191.431.823	-	4.191.431.823

Keterangan	31 Desember 2023		
	Jawa	Bali	Total
Laporan Laba Rugi Konsolidasian			
Pendapatan neto	25.563.651.763	3.325.730.106	28.889.381.869
Beban pokok pendapatan	(18.763.846.500)	(1.855.765.038)	(20.619.611.538)
Laba bruto	6.799.805.263	1.469.965.068	8.269.770.331
Beban penjualan	(834.198.370)	-	(834.198.370)
Beban umum dan administrasi	(6.129.423.499)	-	(6.129.423.499)
Penghasilan usaha lainnya - neto	40.327.718	-	40.327.718
Laba usaha	(123.488.888)	1.469.965.068	1.346.476.180
Penghasilan keuangan	94.958.990	-	94.958.990
Beban keuangan	(131.305.772)	-	(131.305.772)
Laba sebelum pajak penghasilan	(159.835.670)	1.469.965.068	1.310.129.398

Laporan posisi keuangan

konsolidasian

Aset segmen	223.917.973.756	-	223.917.973.756
Liabilitas segmen	9.379.016.490	-	9.379.016.490

Informasi Lainnya

Aset Tetap			
Biaya perolehan	82.340.858.575	-	82.340.858.575
Akumulasi penyusutan	2.473.114.855	-	2.473.114.855

5.5 Fluktuasi Mata Uang Asing dan Suku Bunga

Perseroan tidak memiliki utang/pinjaman dalam mata uang asing. Namun begitu di masa mendatang tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan akan mendapatkan pinjaman dan/atau mendapatkan penghasilan dalam bentuk mata uang asing. Fluktuasi mata uang asing yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja Perseroan baik dari segi pendapatan maupun dari segi beban bunga serta kemampuan Perseroan untuk membayar bunga maupun pokok pinjaman dalam mata uang asing.

Perseroan mengelola risiko fluktuasi mata uang asing dengan menyesuaikan penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama dimana dolar AS menjadi pilihan karena merupakan mata uang yang paling banyak digunakan. Selain itu Perseroan melakukan pemantauan secara berkala terhadap fluktuasi pertukaran nilai mata uang asing. Selain itu dalam hal Perseroan memperoleh pinjaman dalam mata uang asing Perseroan akan menjalankan program lindung nilai yang terkait dengan pinjaman dengan mata uang asing.

5.6 Analisis Jumlah Pinjaman Terutang

Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah pinjaman terutang Perseroan yang angkanya diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
Pinjaman PT Bank DKI	9.000.000.000	-	-
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(1.285.714.284)	-	-
Bagian Jangka Panjang	7.714.285.716	-	-

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman karena selama ini modal kerja operasional Perseroan cukup menggunakan dana internal Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa pinjaman terutang tersebut dapat dilunasi menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki. Keyakinan ini didasarkan pada ketersediaan saldo kas dan setara kas saat ini dan riwayat arus kas dari aktivitas operasi Perseroan yang secara konsisten menunjukkan saldo positif, sehingga mampu mendukung pemenuhan kewajiban keuangan lainnya.

5.7 Investasi Barang Modal

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
Tanah	1.348.593.344	-	-
Bangunan	6.247.160.346	-	-
Perbaikan prasarana	736.156.446	16.257.500	-
Kendaraan	-	1.918.189.900	-
Jaringan internet	9.371.885.925	57.451.613.551	29.585.783.685
Peralatan kantor	33.459.732	73.880.906	75.280.213
Jumlah	17.737.255.793	59.459.941.857	29.661.063.898

Belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 adalah sebesar Rp 17.737.255.793 yang didominasi untuk infrastruktur jaringan internet.

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 59.459.941.857 yang didominasi untuk infrastruktur jaringan internet.

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 29.661.063.898 yang didominasi untuk infrastruktur jaringan internet.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

5.8 Pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan

Perusahaan Anak mungkin tunduk pada sejumlah pembatasan hukum, regulasi, dan perjanjian kontraktual yang membatasi kemampuannya untuk mendistribusikan laba, membayar dividen, atau memberikan pinjaman maupun transfer dana lainnya kepada Perseroan Induk.

Akan tetapi pembatasan tersebut tidak berdampak material terhadap likuiditas dan fleksibilitas keuangan Perseroan, hal ini disebabkan Perseroan memiliki arus kas yang diperoleh dari lini bisnis dan operasionalnya sendiri, selain itu Perseroan juga memiliki opsi untuk mendapatkan sumber pendanaan eksternal, seperti pinjaman bank atau penerbitan surat utang.

5.9 Risiko Suku Bunga Acuan Pinjaman Dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Usaha Atau Keadaan Keuangan Pada Masa Yang Akan Datang

Saat ini, Perseroan tidak memiliki ketergantungan secara langsung terhadap mata uang asing tertentu, karena lebih dari 90% transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah dan berlangsung di wilayah Indonesia. Perseroan juga tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing, sehingga eksposur langsung terhadap risiko nilai tukar tergolong rendah. Selain itu, hingga saat ini Perseroan belum melakukan pengadaan barang dan jasa dari luar negeri dalam mata uang asing, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, risiko nilai tukar tetap menjadi perhatian dalam perencanaan usaha dan strategi keuangan jangka panjang.

Manajemen Perseroan secara aktif memantau kondisi pasar dan faktor makroekonomi seperti nilai tukar dan suku bunga, serta akan mempertimbangkan strategi lindung nilai, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengelolaan struktur pinjaman guna memitigasi potensi risiko terhadap stabilitas keuangan dan kemampuan pembayaran tunai di masa yang akan datang

5.10 Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan Dan Pendapatan Bersih Emiten Serta Laba Operasi Emiten Selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir Serta Dampak Inflasi Dan Perbuahan Kurs Valuta Asing

Selama tiga tahun terakhir, Perseroan tidak melakukan penyesuaian harga jual secara signifikan. Strategi utama yang diambil adalah menjaga stabilitas harga guna mempertahankan daya saing di pasar dan mendorong peningkatan volume penggunaan atau keterisian (*occupancy*). Dengan pendekatan ini, pertumbuhan pendapatan Perseroan lebih banyak ditopang oleh peningkatan volume penjualan atau jasa, termasuk keberhasilan dalam mendorong tingkat okupansi dan efisiensi operasional.

Perseroan juga mencermati faktor eksternal seperti inflasi dan fluktuasi kurs mata uang asing, namun selama periode tersebut tidak terdapat dampak yang material terhadap pendapatan, laba operasional, maupun struktur biaya Perseroan. Mengingat sebagian besar transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah dan beroperasi di dalam negeri, eksposur terhadap risiko nilai tukar sangat terbatas. Oleh karena itu, kenaikan tren pendapatan dan laba operasional lebih mencerminkan pertumbuhan organik, bukan hasil dari penyesuaian harga atau dampak eksternal lainnya.

6 FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Sebagaimana dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka calon investor harus terlebih dahulu secara hati-hati dan dengan cermat mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini, serta risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup dalam Prospektus ini. Semua risiko usaha tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, dan/atau kinerja keuangan Perseroan. Semua risiko usaha utama yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus dimulai dengan risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perizinan

Layanan infrastruktur telekomunikasi yang ditawarkan Perseroan tunduk pada peraturan dan perizinan yang cenderung lebih ketat dibandingkan sebagian besar industri lain. Perseroan tunduk pada pengawasan dan peraturan di bawah berbagai otoritas berwenang Indonesia termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan badan pemerintah terkait lainnya. Perseroan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan peraturan tersebut melalui izin-izin yang diberikan. Peraturan-peraturan yang kerap kali berubah mengakibatkan perlunya penyesuaian izin-izin yang telah diperoleh.

Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dalam izin-izin yang diberikan, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai atau dianggap melanggar izin/peraturan perundangan yang berlaku oleh instansi pemerintah yang berwenang termasuk pemenuhan atas pembatasan kepemilikan investor asing dalam kegiatan usahanya, maka izin-izin Perseroan dapat sewaktu-waktu dihentikan dan/atau dicabut. Apabila hal ini terjadi, dapat mempengaruhi kinerja Perseroan sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

Layanan yang ditawarkan Perseroan kepada pelanggan merupakan layanan infrastruktur telekomunikasi yang mana termasuk di dalamnya penyediaan bandwidth internet melalui jaringan kabel serat optik. Kegiatan usaha utama Perseroan sangat tergantung dengan jaringan kabel yang terentang ribuan kilometer di daerah yang bebas. Jaringan kabel tersebut dapat mengalami gangguan seperti pencurian, pemotongan, kebakaran dan robohnya tiang tumpuan. Hal-hal tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan Perseroan memberikan dampak negatif untuk menarik pelanggan baru maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

2. Risiko Persaingan Usaha

Industri layanan jasa telekomunikasi merupakan industri yang dijalani oleh banyak perusahaan di Indonesia. Faktor internal seperti ketidakmampuan Perseroan untuk memberikan layanan terbaik namun efisien bagi para pelanggan maupun faktor eksternal dimana seringkali pesaing Perseroan melakukan merger dan akuisisi untuk mengkonsolidasi operasional di lapangan sehingga para pesaing tersebut memiliki skala ekonomi yang dapat memberikan efisiensi biaya merupakan faktor yang berdampak signifikan pada kinerja Perseroan baik ditinjau dari sisi keuangan maupun operasional.

Dampak persaingan terhadap kegiatan usaha Perseroan melibatkan ketidakpastian yang tinggi dan akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi, perkembangan peraturan perundang-undangan, perilaku pelanggan dan pesaing, serta efektivitas langkah-langkah yang diambil Perseroan sebagai respons terhadap persaingan yang dihadapi Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk memenangkan persaingan tergantung pada layanan pelanggan, strategi pemasaran, dan kemampuan Perseroan untuk mengantisipasi dan merespons berbagai faktor-faktor persaingan yang memengaruhi industri Perseroan, termasuk peluncuran layanan dan teknologi baru, perubahan preferensi konsumen, tren demografis, kondisi ekonomi, dan strategi harga yang dilakukan para pesaing.

3. Risiko Bencana Alam

Sehubungan dengan pengembangan arah bisnis Perseroan dan Perusahaan anak utamanya untuk pengembangan jaringan Kabel Bawah Laut (*Submarine Cable*) untuk layanan *Network Access Provider (NAP)* yang mana Perseroan berinvestasi pada aset yang terletak di bawah laut dan hal ini menimbulkan risiko baru yaitu risiko bencana alam seperti gempa bumi bawah laut atau tsunami. Terebih fakta bahwa lokasi pemasangan kabel bawah laut ini ada di Ring of Fire yang mana cukup riskan terhadap pergerakan lempeng bumi. Apabila terjadi bencana alam utamanya di bawah laut hal ini dapat berpotensi menyebabkan kerusakan pada aset kabel bawah laut yang menyebabkan Perseroan harus melakukan perbaikan dan juga kehilangan pendapatan karena terganggunya jaringan kabel tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja keuangan maupun kinerja operasional Perseroan.

4. Risiko Perubahan Teknologi Telekomunikasi

Teknologi telekomunikasi merupakan suatu aspek yang sangat dinamis dan seringkali mengalami perubahan serta kemajuan yang pesat seperti halnya yang terjadi pada beberapa dekade terakhir. Perubahan tersebut seringkali mengharuskan pelaku bisnis didalamnya untuk selalu memiliki perangkat-perangkat aktif yang mutakhir untuk dapat menjalankan operasional layanannya. Meskipun teknologi Fiber Optic diperkirakan oleh Perseroan masih akan menjadi teknologi jaringan utama yang digunakan, namun apabila di kemudian hari terjadi perubahan yang signifikan dan perangkat aktif yang dimiliki Perseroan tidak lagi dapat digunakan maka hal ini akan memberikan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan Perseroan dimana Perseroan harus mengeluarkan belanja modal yang cukup besar agar tetap dapat memberikan layanan dengan teknologi paling mutakhir tersebut. Kegagalan Perseroan dalam mengadopsi teknologi baru atau keputusan Perseroan untuk memilih salah satu teknologi dibandingkan teknologi lainnya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk bersaing atau memenuhi permintaan pelanggan. Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan senantiasa berbenah dan menggunakan teknologi terkini sehingga dapat menghadirkan layanan prima kepada pelanggan. Sebagai contoh Adalah implementasi Wi-Fi 7 yang akan dijalankan Perseroan melalui perusahaan anaknya yaitu GPI di Pulau Bali dan Pulau Lombok.

5. Risiko Investasi dan Aksi Korporasi

Perusahaan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia menghadapi sejumlah risiko investasi, terutama terkait tingginya kebutuhan modal untuk pembangunan jaringan serat optik dan perangkat pendukung lainnya. Ketergantungan pada pendanaan eksternal membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi suku bunga dan nilai tukar, yang dapat meningkatkan beban bunga dan biaya investasi. Selain itu, potensi *overcapacity* akibat pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang dengan permintaan pasar juga dapat menurunkan tingkat pengembalian investasi (ROI).

Dari sisi aksi korporasi, risiko muncul dalam bentuk ketidakpastian hasil dari akuisisi. Proses konsolidasi industri yang semakin intensif bisa menimbulkan hambatan integrasi operasional, perbedaan budaya perusahaan, hingga konflik kepentingan antar pemegang saham. Kegagalan dalam realisasi sinergi yang diharapkan dapat mengganggu efisiensi dan merugikan nilai perusahaan.

6. Risiko Pendanaan

Berdasarkan strategi yang saat ini dijalankan oleh Perseroan dan entitas anak dalam mendanai belanja modal maupun modal kerja, terdapat beberapa anggaran yang akan didanai dari kas internal Perseroan yang berasal dari beberapa sumber antara lain kas yang berasal dari operasional seperti pembayaran dari pelanggan. Apabila terjadi kendala penagihan sehingga kas internal Perseroan tidak mencukupi biaya-biaya yang harus dibayarkan maka terdapat risiko menurunnya kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk melakukan pemenuhan modal kerja yang dibutuhkan. Apabila hal ini terjadi maka akan menurunkan kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Terhambatnya Pembangunan/Pengembangan Jaringan Kabel

Pembangunan konstruksi jaringan kabel dan juga pembangunan POP menentukan banyaknya jumlah pelanggan dan kualitas jasa internet. Terhambat dan/atau tidak terealisasinya penyelesaian pembangunan perluasan jaringan sangat tergantung oleh hal-hal tersebut. Selain itu penggalian pada lokasi-lokasi tertentu terutama pada kota Jakarta dan daerah-daerah strategis juga menjadi faktor yang menghambat pembangunan jaringan. Hal ini merupakan risiko yang berdampak negatif untuk menarik pelanggan baru ditahun-tahun mendatang, meminimalkan churn rate maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

8. Risiko Tidak Didapatkannya Kontrak Dengan Penyedia Backbone Dan/Atau Penyedia Bandwidth

Sehubungan dengan target ekspansi Perseroan melalui Entitas Anaknya yakni GPI untuk melakukan penggelaran FTTH di Bali dan Lombok dimana saat ini GPI belum memiliki perjanjian apapun terkait penyediaan bandwidth, maka terdapat risiko dimana apabila tidak didapatkan kontrak dengan penyedia backbone dan/atau penyedia bandwidth tersebut maka Perseroan akan mengalami kendala dalam penyaluran layanan FTTH kepada pelanggan. Apabila hal ini terjadi maka akan berpengaruh negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan secara konsolidasi.

9. Risiko Tidak Didapatkannya Perizinan SBU Konstruksi Untuk IAB

Sehubungan dengan belum didapatkannya Perizinan SBU Konstruksi untuk Entitas Anak Perseroan yakni IAB, maka terdapat risiko tidak dapat dijalkannya operasional IAB. Apabila hal tersebut terjadi, maka IAB akan mendapatkan kendala dan berpotensi tidak dapat menjalankan kontrak yang dimiliki. Hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasi.

10. Risiko Ketergantungan Terhadap Entitas Anak

Sebagai perusahaan induk, kinerja Perseroan akan bergantung pada kinerja masing-masing Entitas Anak. Apabila Entitas Anak tidak mencapai pertumbuhan yang diharapkan atau mengalami masalah keuangan, hal tersebut dapat berdampak pada kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan secara konsolidasi.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makro Ekonomi

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi, menghadapi beberapa risiko makro ekonomi di tahun 2025 yang dapat memengaruhi stabilitas bisnis dan rencana ekspansi diantaranya inflasi dan tekanan daya beli konsumen. Inflasi yang tinggi, terutama pada bahan bakar dan logistik, akan menaikkan biaya operasional Perseroan. Di sisi lain, pelanggan rumah tangga dan UMKM yang terdampak inflasi berpotensi mengurangi pengeluaran untuk layanan internet, atau berpindah ke paket dengan harga lebih murah, sehingga menurunkan ARPU (average revenue per user). Selain itu, Volatilitas nilai Rupiah turut membayangi selama satu tahun terakhir. Sebagian besar infrastruktur internet seperti perangkat keras jaringan dan software manajemen sistem masih bergantung pada impor. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat menyebabkan lonjakan harga pembelian perangkat, terutama dalam kondisi pasar global yang tidak stabil. Hal ini berdampak langsung pada capital expenditure (capex) dan operating expenditure (opex).

Kondisi geopolitik dan rantai pasokan global juga menjadi salah satu risiko Makro ekonomi yang dihadapi Perseroan, dimana Ketegangan geopolitik global, terutama antara negara produsen teknologi seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara Asia Timur lainnya, menimbulkan gangguan dalam rantai pasok perangkat keras. Penundaan pengiriman atau kelangkaan komponen kunci seperti chip dan perangkat optik dapat menghambat ekspansi jaringan dan pembaruan sistem. Dampaknya tidak hanya pada operasional, tetapi juga terhadap kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

2. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan

Berbagai peraturan dan kebijakan dikeluarkan Pemerintah dalam bidang teknologi telekomunikasi. Seringkali, Pemerintah melakukan berbagai pembaruan dan perbaikan terhadap peraturan dan kebijakan tersebut dengan tujuan agar dapat memberikan regulasi yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan di industri teknologi telekomunikasi. Perubahan peraturan Pemerintah tersebut serta perubahan kebijakan pemerintah di masa depan dapat memengaruhi secara signifikan kegiatan operasional Perseroan serta dapat membutuhkan penyesuaian signifikan yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap rencana bisnis Perseroan.

Meskipun Perseroan berupaya mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat menanggapi ketentuan yang terus berkembang tepat pada waktunya. Apabila otoritas pemerintah yang berwenang menganggap Perseroan gagal memenuhi persyaratan tersebut, Perseroan mungkin menerima surat peringatan, diperintahkan untuk melakukan perbaikan, atau dikenakan sanksi dan/atau penalti administratif lainnya yang mungkin menimbulkan dampak terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat saja terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya,

termasuk yang berhubungan dengan layanan Perseroan, klaim karyawan atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada PMHMETD I

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- b. Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para investor;
- c. Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- d. Adanya akuisisi, kerjasama strategis, joint venture atau divestasi yang signifikan;
- e. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- f. Perubahan kondisi politik Indonesia;
- g. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- h. Fluktuasi harga pasar saham pada umumnya;
- i. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- 1) Perolehan laba bersih jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- 2) Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang; dan
- 3) Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Apabila terjadi penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar tanpa diimbangi oleh permintaan saham Perseroan pada harga tertentu dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau dapat menurunkan harga saham Perseroan dibawah nilai wajar. Hal tersebut dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal yang diperlukan untuk perkembangan Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS SESUAI DENGAN BOBOT RISIKO YANG ADA SESUAI DENGAN POJK No. 33/2015.

7 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 4 Desember 2025 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Ridho Fathoni, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP.1629 yang dalam laporannya No. 00427/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/XII/2025 pada tanggal 4 Desember 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Dulgani, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 0165 yang dalam laporannya No. 00091/2.0119/AU.1/05/0165-1/1/III/2025 pada tanggal 27 Maret 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 1023 yang dalam laporannya No. 00114/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 pada tanggal 8 April 2024, selain yang diungkapkan sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1.670 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253540 tanggal 12 Desember 2025, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0281104.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Desember 2025 ("**Akta Perseroan No. 1.670/2025**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan portepel dan perubahan isi Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

8 KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk ("**Perseroan**") didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-002586.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007821.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 3645 serta Tambahan BNRI No. 19 tanggal 10 Januari 2014 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1000,- per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		10.200	1.020.000.000	-
1.	Among Suwardjo	4.080	408.000.000	80
2.	Bayu Satrio	1.020	102.000.000	20
Modal Ditempatkan dan Disetor		5.100	510.000.000	100
Saham dalam Portepel		5.100	510.000.000	-

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.670 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253540 tanggal 12 Desember 2025, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0281104.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Desember 2025 ("**Akta Perseroan No. 1.670/2025**"), yang mana berdasarkan Akta Perseroan No. 1.670/2025 para pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan portepel dan perubahan isi Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.

(Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perseroan No. 1.670/2025 selanjutnya disebut juga "**Anggaran Dasar Perseroan**").

B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

C. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP dan penyewaan Fiber Optic melalui Perusahaan anak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

1) **Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi – KBLI 61994**

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, telex, dan telegraf, jasa jual

kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Caf dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya..

2) Internet Service Provider – KBLI 61921

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk- mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel - KBLI 61100

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro- atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegrap dan komunikasi non vocal lainnya- yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas -transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator- infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan -bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi -data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

2) Jasa Sistem Komunikasi Data - KBLI 61922

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan.

3) Jasa Interkoneksi Internet (NAP) - KBLI 61924

Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses- dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan- trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

4) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya - KBLI 62090

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

5) Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Selanjutnya, berikut ini merupakan perkembangan permodalan kepemilikan saham Perseroan untuk periode setelah dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran terakhir oleh Perseroan kepada OJK yaitu pernyataan efektif penawaran umum perdana saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2023:

Tahun 2023

Pada tahun 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 27 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-AH.01.03-0097846 tanggal 27 Juli 2023, dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0143273.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Juli 2023 ("**Akta Perseroan No. 16/2023**").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 16/2023, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:

- a. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp60.000.000.000 terbagi atas 6.000.000.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp10 menjadi Rp75.000.000.000 terbagi atas 7.500.000.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp10;
- b. pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebesar Rp15.000.000.000 terbagi atas 1.500.000.000 saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, yang diambil bagian dan disetor penuh oleh masyarakat; dan
- c. perubahan isi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perseroan No. 16/2023, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		10.500.000.000	105.000.000.000	-
1.	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	80,00
2.	Muhammad Arif	10.000	Rp100.000	0,00013
3.	Masyarakat	1.500.000.000	15.000.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor		7.500.000.000	75.000.000.000	100
Saham dalam Portepel		3.000.000.000	30.000.000.000	-

Tahun 2024

Pada tahun 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan mengalami perubahan berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 7 tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0140708 tanggal 11 Juni 2024, dan (ii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0115158.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 11 Juni 2024 ("**Akta Perseroan No. 7/2024**").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 7/2024, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:

- a. pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10 setiap saham; dan
- b. perubahan isi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Perseroan No. 7/2024, Direksi Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 28 Mei 2024, jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 41.804 saham, dan dengan demikian jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi sejumlah 7.500.041.804 saham.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perseroan No. 7/2024, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		10.500.000.000	105.000.000.000	-
1.	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.516.974.200	55.169.742.000	73,56
2.	Masyarakat	1.983.067.604	19.830.676.040	26,44
Modal Ditempatkan dan Disetor		7.500.041.804	75.000.418.040	100
Saham dalam Portepel		2.999.958.196	299.995.819.600	-

- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 22 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037389.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024, (ii) diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0217670 tanggal 25 Juni 2024, serta (iii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0125009.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024 ("**Akta Perseroan No. 22/2024**").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 22/2024, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:

- peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp300.000.000.000 yang terbagi atas 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10; dan
- perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perseroan No. 22/2024, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		30.000.000.000	300.000.000.000	-
1.	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.516.974.200	55.169.742.000	63,84
2.	Masyarakat	1.983.067.604	19.830.676.040	36,16
Modal Ditempatkan dan Disetor		7.500.041.804	75.000.418.040	100
Saham dalam Portepel		22.499.958.196	224.999.581.960	-

Tahun 2025

Pada tahun 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan mengalami perubahan berdasarkan:

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 7 tanggal 28 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Selo Selvieana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0164941 tanggal 24 Juni 2025, dan telah (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0139591.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 Juni 2025 ("**Akta Perseroan No. 7/2025**").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 7/2025, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui perubahan isi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Perseroan No. 7/2025, Direksi Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal 11 Juni 2024, jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan menjadi sebanyak 447.050.837 saham, dan dengan demikian jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi sejumlah 7.947.082.614 saham.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perseroan No. 7/025, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		30.000.000.000	300.000.000.000	-
1.	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.340.907.200	53.409.072.000	67,22
2.	Masyarakat	2.606.175.414	26.061.754.140	32,78
Modal Ditempatkan dan Disetor		7.947.082.614	79.470.826.140	100
Saham dalam Portepel		22.052.917.386	220.529.173.860	-

- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 2 tanggal 7 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0209038 tanggal 7 Agustus 2025, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181582.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 7 Agustus 2025 ("Akta Perseroan No. 2/2025")

Berdasarkan Akta Perseroan No. 2/2025, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui perubahan isi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Perseroan No. 2/2025, Direksi Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025, jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 448.112.769 saham, dan dengan demikian jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi sejumlah 8.395.195.383 saham.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perseroan No. 2/2025, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		30.000.000.000	300.000.000.000	-
1.	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.360.707.200	53.607.072.000	63,85
2.	Masyarakat	3.034.488.183	30.344.881.830	36,15
Modal Ditempatkan dan Disetor		8.395.195.383	83.951.953.830	100
Saham dalam Portepel		21.604.804.617	216.048.046.170	-

- c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1.327 tanggal 17 September 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0236052 tanggal 17 September 2025, (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0216220.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 17 September 2025, serta telah (iii) diumumkan dalam BNRI No. 26707 dan Tambahan BNRI No. 76 tanggal 23 September 2025 ("Akta Perseroan No. 1.327/2025").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 1.327/2025, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui perubahan isi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Perseroan No. 1.327/2025, Direksi Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025, jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 447.800.727 saham, dan dengan demikian jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi sejumlah 8.842.996.110 saham.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perseroan No. 1.327/2025, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		30.000.000.000	300.000.000.000	-
1.	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.360.707.200	53.607.072.000	60,61

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
2.	Masyarakat	3.482.288.910	34.822.889.100	39,39
Modal Ditempatkan dan Disetor		8.842.996.110	88.429.961.100	100
Saham dalam Portepel		21.157.003.890	211.570.038.900	-

- d. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1.670 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253540 tanggal 12 Desember 2025, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0281104.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Desember 2025 ("**Akta Perseroan No. 1.670/2025**").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 1.670/2025, Direksi Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Desember 2025, jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 725.319.347 saham, dan dengan demikian jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi sejumlah 9.568.315.457 saham, dengan demikian para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan isi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan konversi Waran Seri I menjadi saham.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perseroan No. 1.670/2025 dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 10 Desember 2025 berdasarkan Surat Keterangan dari PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tanggal 11 Desember 2025 Nomor 02/INET-FBR/XII/25 ("**Daftar Pemegang Saham**"), struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp10 per saham)		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		30.000.000.000	300.000.000.000	-
1.	PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.360.707.200	53.607.072.000	56,0298
2.	Muhammad Arif	10.000	100.000	0,0001
3.	Masyarakat	4.207.598.257	42.075.982.570	43,9701
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		9.568.315.457	95.683.154.570	100
Saham dalam Portepel		20.431.684.543	204.316.845.430	-

E. IZIN USAHA

E.1. PERSEROAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (" NIB ") dengan No. 91205031528150007 tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-10 pada tanggal 20 April 2023 dan berlaku pula sebagai Angka Pengenal Impor (API-U)	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> (" OSS ")	Untuk kegiatan usaha: - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100) - Internet Service Provider (KBLI 61921) - Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) - Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090) - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994) - Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI 61924)

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 81.148.632.3-014.000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Mampang Prapatan	-
3.	Surat Penguakuan Pengusaha Kena Pajak ("SPKP") No. S-4661/KT/KPP.040703/2022 tanggal 12 Oktober 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	-
4.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packet Switched</i> No. 91205031528150007	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Menteri Komunikasi dan Informatika / Menteri Investasi	Perizinan untuk kegiatan usaha Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100)
5.	Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i> / "ISP") No. 91205031528150002 tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-1 pada tanggal 31 Agustus 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Perizinan untuk kegiatan usaha Internet Service Provider (KBLI 61921) dengan jenis penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dengan Media Fiber Optik Terrestrial
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") tanggal 22 November 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	Untuk kegiatan usaha: - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100) - Internet Service Provider (KBLI 61921) - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994) - Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI 61924) - Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090) - Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)
7.	Sertifikat Standar No. 91205031528150003 tanggal 20 Oktober 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Menteri Komunikasi dan Digital & Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Untuk kegiatan usaha: - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994)
8.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("KKPR") No. 19112510213174404 tanggal 19 November 2025	19 November 2028	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Untuk kegiatan usaha: - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994)
9.	KKPR No. 19112510213174403 tanggal 19 November 2025	19 November 2028	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Untuk kegiatan usaha: - Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090)
10.	KKPR No. 19112510213174196 tanggal 19 November 2025	19 November 2028	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Untuk kegiatan usaha: - Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)
11.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") No. 14042310411871058 tanggal 29 November 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	OSS	PKKPR untuk kegiatan usaha Internet Service Provider (KBLI 61921)
12.	PKKPR No. 04072310211871039 tanggal 3 Juli 2023	Tiga tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional & Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Untuk kegiatan usaha: - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100)

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
		undangan yang berlaku		

E.2 PERUSAHAAN ANAK

E.2.1 DPS

DPS telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan DPS, yakni :

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
1.	NIB dengan No. 9120314291081 dengan perubahan ke-2 tanggal 24 November 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	Untuk kegiatan usaha: 61921 (Internet Service Provider).
2.	NPWP No. S-2665PKP/WPJ.08/KP.1103/2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Cikupa	Untuk alamat Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten
3.	SKT No. S-2665PKP/WPJ.08/KP.1103/2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Cikupa	-
4.	KKKPR No. 19112510213173292 tanggal 19 November 2025	Tiga tahun sejak 19 November 2025	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Untuk kegiatan usaha KBLI 61921 – Jasa Internet Service Provider
5.	Izin Penyelenggara Jasa Akses Internet No. 741/TEL.02.02/2020 tanggal 26 September 2020	Sepanjang DPS melakukan kegiatan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Menteri Komunikasi dan Informatika/BKPM	Untuk jenis layanan Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>)
6.	SPPL tanggal 22 November 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	- 61921 – Internet Service Provider

E.2.2 PFI

PFI telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan PFI, yakni :

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
1.	NIB dengan No. 1207220036123 tanggal 12 Juli 2022 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-1 pada tanggal 3 Juli 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Untuk kegiatan usaha: - Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya (KBLI 47411) - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994)

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
				- Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI 62021) - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200) - Internet Service Provider (KBLI 61921) - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100)
2.	Sertifikat Standar No. 12072200361230002 tanggal 24 November 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Perizinan untuk kegiatan usaha Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994)
3.	NPWP No. 60.113.754.0-086.000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Kembangan	-
4.	SKT No. S-4653KT/WPJ.05/KP.1103/2022 tanggal 5 Juli 2022	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	DJP Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Kembangan	-
5.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup melalui Media Fiber Optik Terrestrial No. 12072200361230012 tanggal 13 Maret 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Perizinan untuk kegiatan usaha Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100) dengan penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dengan Media Fiber Optik Terrestrial
6.	PKKPR No. 14032310413674011 tanggal 21 Januari 2023	Tiga tahun sejak 21 Januari 2023	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Perizinan untuk kegiatan usaha Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100)
7.	KKKPR No. 19112510213173252 tanggal 19 November 2025	Tiga tahun sejak 19 November 2025	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Perizinan untuk kegiatan usaha Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994)
8.	KKKPR No. 24112210113173442 tanggal 24 November 2022	24 November 2025 PFI sedang dalam proses perpanjangan perizinan tersebut.	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Perizinan untuk kegiatan usaha Internet Service Provider (KBLI 61921)
9.	KKKPR No. 24112210113173446 tanggal 24 November 2022	24 November 2025 PFI sedang dalam proses perpanjangan perizinan tersebut.	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Perizinan untuk kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI 62021)
10.	KKKPR No. 19112510213173259 tanggal 19 November 2025	Tiga tahun sejak 19 November 2025	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Perizinan untuk kegiatan usaha Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya (KBLI 47411)
11.	KKKPR No. 19112510213173263 tanggal 19 November 2025	Tiga tahun sejak 19 November 2025	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui OSS	Perizinan untuk kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
12.	SPPL tanggal 12 Juli 2022	Selama pelaku usaha	OSS	Berlaku sebagai perizinan lingkungan

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
		menjalankan kegiatan usaha		

E.2.3 IAB

IAB telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan IAB, yakni :

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
1.	NIB dengan No. 0705250044669 tanggal 7 Mei 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	<p>Untuk kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523) Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (KBLI 46639) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638) <p>Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> IAB tidak memiliki Sertifikat Standar atas KBLI 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi), baik yang belum terverifikasi maupun yang telah terverifikasi; dan IAB masih dalam proses pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi yang pada saat ini masih dalam tahap verifikasi oleh Menteri Pekerjaan Umum, sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar pada akun OSS IAB, yang disampaikan oleh IAB pada tanggal 20 Oktober 2025.
2.	NPWP No. 1000000001946013 tanggal 7 Mei 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Kembangan	-
3.	SPPKP No. S-00274/SPPKP-CT/KPP.0511/2025 tanggal 11 Juni 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Kembangan	-
4.	SKT No. S-14839/SKT-WP-CT/KPP.0511/2025 tanggal 15 Mei 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	KPP Pratama Jakarta Kembangan	-
5.	SPPL tanggal 7 Mei 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	Berlaku sebagai perizinan lingkungan

E.2.4 GPI

GPI telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan GPI, yakni :

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
1.	NIB dengan No. 9120201773902 dengan perubahan ke-3 tertanggal 31 Juli 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	Untuk kegiatan usaha: <ul style="list-style-type: none"> • Internet Service Provider (KBLI 61921) • Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523) • Aktivitas Pengolahan Data (KBLI 63111) • Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61998) • Aktivitas Hosting dan YBDI (KBLI 63112) • Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100) • Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200) • Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI 61300)
2.	NPWP No. 0920 4713 8090 1000	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kantor Wilayah DJP Bali KPP Pratama Denpasar	
3.	SPPKP No. S-1161PKP/WPJ.17/KP.0103/2019 tanggal 27 November 2019	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kantor Wilayah DJP Bali KPP Pratama Denpasar	
4.	Izin Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>) No. 722/TEL.02.02/2020 yang diterbitkan pada tanggal 14 September 2020	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Menteri Komunikasi dan Informatika	Jenis layanan: Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>)
5.	Izin Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi No. 91202017739020003 tanggal 17 Juni 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Untuk penyelenggaraan KBLI 61100 - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel:

No.	Izin	Masa Berlaku	Institusi yang Mengeluarkan Izin	Keterangan
6.	SPPL tanggal 21 Juli 2025	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("OSS")	Berlaku sebagai perizinan lingkungan

F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 22 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, No.12 tanggal 4 November 2024, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (iii) 3. Akta Berita Acara RUPSLB PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, No. 014 tanggal 12 Juni 2025, dibuat di hadapan Selo Selviana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan (iv) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, No.12 tanggal 20 Agustus 2025, dibuat di hadapan Selo Selviana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Saripudin
 Komisaris Independen : Cahyana Ahmad Jayadi
 Komisaris : Tongam Lumban Tobing

DIREKSI

Direktur Utama : Muhammad Arif
 Direktur : Willy Unsulangi

Bahwa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan RUPS tahunan ke-lima sejak pengangkatan, yaitu sampai dengan RUPS tahunan Perseroan tahun 2027.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Saripudin – Komisaris utama

Berkebangsaan Indonesia. Saat ini berusia 45 tahun. Pendidikan formal terakhir adalah lulusan S1 Teknik Informatika dari STT Telematika Indonesia

Tahun 2024 - : Komisaris Utama, Perseroan

Sekarang

Tahun 2021 - : Direktur Operasional, PT Inti Pusat Data Nasional

Tahun 2020 - 2021 : Direktur, PT Quanta Teknik Gemilang

Tahun 2018 - 2020 : Direktur, PT Binari Teknologo Solusi

Tahun 2008 - 2018 : GM Operations and Business Development, PT Trans Hybrid Communication

Tahun 2005 - 2008 : Sales manager, PT Mitzmara Inti



Cahyana Ahmad Jayadi – Komisaris Independen

Komisaris Independen, 70 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir SE, Hukum Teknologi/ Hukum Bisnis, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia. Lulus tahun 2010.

Lahir di Garut, 12 Juli 1955. Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Oktober 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

- 2022 - Sekarang : Komisaris Independen, Perseroan
- 2017 - 2020 : Komisaris Independen, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- 2010 - 2013 : Komisaris, PT Bank Mandiri Tbk
- 2005 : Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika
- 2000 : Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri
- 1998 : Deputy Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Industri Strategi, Kementerian Negara BUMN
- 1995 : Direktur Utama, PT POS Indonesia
- 1981 - 1993 : *Regional Director* Wilayah V Jawa Barat, PT Telkom Tbk

Tongam Lumban Tobing, Komisaris



Berkebangsaan Indonesia, saat ini berusia 61 Tahun. Beliau menyelesaikan pendidikan terakhir dengan gelar Doktor Bisnis Manajemen, di Universitas Padjajaran di tahun 2018. Selain itu Beliau juga menyelesaikan pendidikannya dan berhasil meraih gelar LLM Degree dari The University of Melbourne , Australia pada tahun 2002. Beliau pun berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Sumatera Utara dengan gelar Sarjana Hukum di tahun 1988

- 2025 - sekarang : Komisaris, Perseroan
- 2025 – sekarang : Komisaris, PT Giat Bangkit Indonesia
- 2025 – sekarang : Komisaris, PT UMKM Pintar Indonesia
- 2025 – sekarang : Advokat, Kantor Hukum Tongam Tobing & Partners
- 2012 – 2024 : Kepala Departemen Investigasi Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
- 1994 - 2012 : Direktorat Human Resource, Bank Indonesia

Direksi



Muhammad Arif – Direktur Utama

Direktur Utama, 39 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1 Sistem Infomasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia. Lulus tahun 2008.

Lahir di Jakarta, 4 Oktober 1986. Menjabat Sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Oktober 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2022 - sekarang	:	Direktur Utama, Perseroan
2022 - sekarang	:	Komisaris, PT Pusat Fiber Indonesia
2019 – 2022	:	Komisaris Utama, Perseroan
2015 - 2019	:	VP Commercial and Operation, PT Technology data Indonesia
2008 - 2015	:	Sales Manager, PT Power Telecom



Willy Unsulangi – Direktur

Direktur, 38 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1, *Sistem Informatika*, Universitas Bina Nusantara, Jakarta

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2024 - sekarang	:	Direktur, Perseroan
2024 - sekarang	:	Komisaris, PT Lugas Karya Estetik
2020 - sekarang	:	Direktur, PT Olteco Nusantara Sinergi
2019 - sekarang	:	Direktur, PT Olteco Nusantara Teknologi
2019 - sekarang	:	PT Garuda Prima Internetindo
2011 - 2019	:	Regional Manager, PT Supra Primatama Nusantara

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No.33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Unit Audit Internal akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 06/2022, Dewan Komisaris telah melakukan:

1. Pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan, pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lebih dulu mendapat persetujuan dalam RUPS.

Remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris per tanggal, 31 Juli 2025 sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah), 31 Juli 2024 sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta Rupiah), 31 Desember 2024 sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) dan 31 Desember 2023 sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah).

Remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi per tanggal, 31 Juli 2025 sebesar Rp 250.008.500,- (dua ratus lima puluh juta delapan ribu lima ratus Rupiah), 31 Juli 2024 sebesar Rp 255.788.700,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah), 31 Desember 2024 sebesar Rp 418.544.489,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan Rupiah) dan 31 Desember 2023 sebesar Rp 244.196.226,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam Rupiah).

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Pada Tahun 2025, Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014. Sampai dengan disusunnya Prospektus ini Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat sebanyak 4 kali.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Direksi sesuai dengan Akta No.06/2022 tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai anggaran dasar.
2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun buku.

Frekuensi Rapat Direksi

Pada Tahun 2025, Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014. Sampai dengan disusunnya Prospektus ini Direksi telah melaksanakan Rapat sebanyak 9 kali.

Direksi juga telah melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Sekretaris Perseroan

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014, Perseroan telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/KP-DIREKSI/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dimana Perseroan telah menunjuk Kemal Akbar untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Kemal Akbar merupakan Warga Negara Indonesia, 39 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jawa Timur, Indonesia.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Kemal Akbar :

- Oktober 2022 - sekarang : Sekretaris Perusahaan, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
- 2018 - sekarang : Indonesia *Chief*, Hyundai Solar Energy
- 2015 - sekarang : *President Commissioner*, PT Tectonia Grandis

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi :
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;

- penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris : Ruko Rich Palace. Jl. Meruya Ilir Raya No.36 – 40 Blok A1.
 Perusahaan : Jakarta Barat 11630
 No. Telephone : 021 – 5265943/ 5835854
 Alamat E-mail : info@sinergynetworks.co.id

Dalam 1 (satu) tahun terakhir sampai disusunnya Prospektus ini, terdapat beberapa program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi *Corporate Secretary*, diantaranya:

No	Waktu	Pihak yang mengadakan	Judul Acara
1	Oktober s/d November 2024	Bursa Efek Indonesia	IDX Net Zero Incubator
2	13 Agustus 2025	Bursa Efek Indonesia	<i>Refreshment</i> dan Diskusi terkait Peraturan Pencatatan dan Pengenalan Sistem Sarana Pelaporan SPE – IDXnet dan Laporan Keuangan Berbasis XBRL

Komite Audit

Perseroan telah membentuk tim komite audit yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 014/SP/SINERGY/VIII.2025 tanggal 21 Agustus 2025, Perseroan telah melakukan perubahan Komite Audit dengan masa jabatan Komite Audit adalah 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ditandatangani, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Cahyana Ahamadjayadi
 Usia : 70 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pengalaman Kerja Cahyana Ahamadjayadi dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris di Bab VIII.

Anggota : Tongam Lumban Tobing
 Usia : 61 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Cahyana Ahamadjayadi dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris di Bab VIII.

Anggota : Fathurrizal Zuhri
 Usia : 34 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pengalaman kerja : • 2024 - : Anggota Komite Audit, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
 sekarang

- 2021 - 2023 : Consolidation Reporting Specialist, PT Sejahtera Bintang Abadi Tekstile Tbk
- 2017 - 2023 : Accounting and Tax Reporting Group Support, PT Mitra Buana Korporindo SPV Accounting, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
- 2016 – 2017 : Senior Auditor, Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan – DFK International
- 2013 – 2016 : Credit Analyst and Accounting, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- 2013 :

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 10 Oktober 2022 yang berlaku efektif sejak tanggal 10 Oktober 2022 telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan
- b. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- d. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris;
- f. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- g. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan; dan
- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Pelaporan Komite Audit :

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah ngangkatan atau pemberhentian;
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

-
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
 - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit telah mengadakan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Pada saat Prosektus ini disusun, sepanjang tahun 2025 Komite Audit telah mengadakan Rapat Komite Audit sebanyak 3 (tiga) kali.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk unit audit internal yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.003/P-DK/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Keputusan Direksi Perseroan No.004/KP-DIREKSI/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, sebagaimana termaksud dalam Surat Penunjukan tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Cachnita sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 10 Oktober 2022.

Cachnita merupakan Warga Negara Indonesia, 38 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Sarjana Ekonomi dari STIE YAI Jakarta, Indonesia.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Cachnita :

- | | |
|-------------------------|---|
| Oktober 2022 - sekarang | : Audit Internal, PT Sinergi Inti Andala Prima Tbk |
| 2020 – Oktober 2022 | : <i>Finance, Tax and Accounting</i> , PT Sinergi Inti Andala Prima |
| 2013 - 2019 | : <i>Finance, Tax and Accounting</i> , PT Wifiku Indonesia |
| 2011 - 2013 | : <i>Budget Controller</i> , PT Gudang Garam Tbk |

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Pasal 9 POJK No. 56/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam system dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.011/SP/SINERGY/VIII.2025 tanggal 21 Agustus 2025 yang berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Cahyana Ahamadjayadi
Usia : 70 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Cahyana Ahamadjayadi dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris di Bab VIII.

Anggota : Tongam Lumban Tobing
Usia : 61 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Tongam Lumban Tobing dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris di Bab VIII.

Anggota : Yulmina Sari Dewi
Usia : 42 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja :

- Oktober 2022 - sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Sinergi Inti Andala Prima Tbk
- 2019 – Oktober 2022 : Presales, PT Sinergi Inti Andala Prima
- 2016 - 2019 : Administrasi, PT Arga Kencana Mandiri
- 2010 - 2016 : Administrasi, PT Transdata Satkomindo

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

-
1. Dalam Bidang Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Struktur Remunerasi;
 - 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - 3) Besaran atas Remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 2. Dalam Bidang Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

Sampai pada tanggal disusunnya Prospektus ini, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi 2 (dua) Kali sepanjang tahun 2025.

H. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai macam risiko usaha yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya pengelolaan risiko tidak kalah penting bagi Perseroan guna mencapai target yang akan dicapai. Pengelolaan risiko secara sistematis, yang dimulai dengan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, monitor, dan kemudian pelaporan risiko, dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Tahap identifikasi risiko dimulai dengan tahap mengidentifikasi faktor penyebab risiko. Kemudian dilanjutkan dengan tahap mengukur nilai risiko untuk menentukan nilai yang bisa diterima dan batas toleransi terhadap risiko tersebut. Tahap pengendalian dan monitor risiko dilakukan untuk memantau dan mengkaji risiko sesuai nilai dan batas tersebut. Kemudian secara berkala, proses pelaporan dan pengkajian ulang risiko dilakukan untuk mencapai manajemen risiko yang lebih baik.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Risiko Perizinan

Mengingat risiko utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah risiko perizinan, dimana Perseroan wajib memiliki izin-izin dari pihak pihak yang berwenang untuk dapat melakukan penggelaran jaringan sehingga dapat memberikan layanan kepada pelanggan, Perseroan memitigasi risiko ini dengan cara

senantiasa membangun hubungan yang baik kepada semua pemangku kepentingan di lapangan termasuk diantaranya warga setempat, RT-RW dan perangkat Pemerintahan lainnya, dan juga regulator dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selain itu, tim legal Perseroan senantiasa mempelajari update dan refreshment dalam setiap peraturan yang berlaku.

2. Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

Risiko gangguan pada jaringan kabel serat optik merupakan salah satu risiko yang dihadapi Perseroan dimana apabila terjadi gangguan jaringan kabel serat optik akan menyebabkan Perseroan tidak dapat memberikan layanan secara prima kepada pelanggan, yang mana hal ini akan menurunkan kepuasan pelanggan. Untuk memitigasi risiko ini Perseroan melakukan beberapa langkah diantaranya memperketat SOP pada saat penggelaran awal dan memastikan bahwa semua perangkat terpasang sesuai dengan seharusnya. Selain itu Perseroan juga melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara berkala pada setiap perangkat sehingga mengurangi potensi gangguan jaringan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak menjalin hubungan baik para klien dengan mengembangkan system komunikasi terbuka untuk memberikan Pelayanan maupun peningkatan kemampuan Perseroan melalui observasi, *feedback* dan rekomendasi dari klien. Selain itu, Perseroan juga memiliki hubungan dengan berbagai perusahaan besar sektor teknologi seperti Provider *Cloud*, Perusahaan *Cyber Security*, Perusahaan Software Developer serta perusahaan pendukung seperti Facebook, Google dan perusahaan penggerak teknologi informasi baik lokal maupun global untuk mempertahankan wawasan dan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mengikuti perkembangan yang ada.

4. Risiko Bencana Alam

Risiko bencana alam tentu saja menjadi salah satu risiko yang harus dimitigasi Perseroan, mengingat perangkat Perseroan termasuk kabel terbentang di area yang sangat luas sehingga akan terjadi kerugian yang signifikan apabila terjadi bencana alam. Mitigasi risiko yang dijalankan Perseroan adalah dengan melakukan perencanaan yang mendetail termasuk menghindari lokasi-lokasi yang memiliki risiko besar terhadap bencana alam diantaranya banjir dan juga tanah longsor.

5. Risiko Perubahan Teknologi Telekomunikasi

Untuk menghadapi risiko perkembangan teknologi, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa melakukan riset dan pengembangan agar Perseroan dan Perusahaan Anak dapat terus menawarkan inovasi seiring dengan berkembangnya teknologi dan perubahan perilaku konsumen di pasar. Hal ini dilakukan Perseroan untuk memitigasi risiko perkembangan teknologi dan juga agar dapat senantiasa memberikan layanan terbaik kepada para pelanggannya. Sebagai contoh nyata Adalah Perseroan melalui Perusahaan Anaknya yakni GPI, menjadi salah satu pionier pertama yang melakukan implementasi teknologi WI-Fi 7 untuk melayani pelanggan di wilayah Bali dan Lombok.

6. Risiko Investasi dan Aksi Korporasi

Untuk mendukung ekspansi Perseroan, seringkali Perseroan harus melakukan investasi strategis dan juga aksi korporasi. Kegagalan Investasi dan juga Aksi Korporasi ini dapat beresiko menyebabkan hambatan bagi ekspansi Perseroan. Perseroan melakukan mitigasi dengan cara melakukan perencanaan dan implementasi investasi serta Aksi Korporasi dengan cermat dan sesuai dengan seluruh aturan yang berlaku.

7. Risiko Terhambatnya Pembangunan/Pengembangan Jaringan Kabel

Perseroan memandang bahwa apabila sampai terjadi hambatan pada pembangunan dan pembangunan jaringan kabel maka akan menyebabkan terhambatnya layanan kepada pelanggan. Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan melakukan perencanaan secara mendetail dan faktual pada proses pembangunan dan pengembangna jaringan sehingga meminimalisi hambatan tersebut.

8. Risiko Tidak Didapatkannya Kontrak Dengan Penyedia Backbone Dan/Atau Penyedia Bandwidth

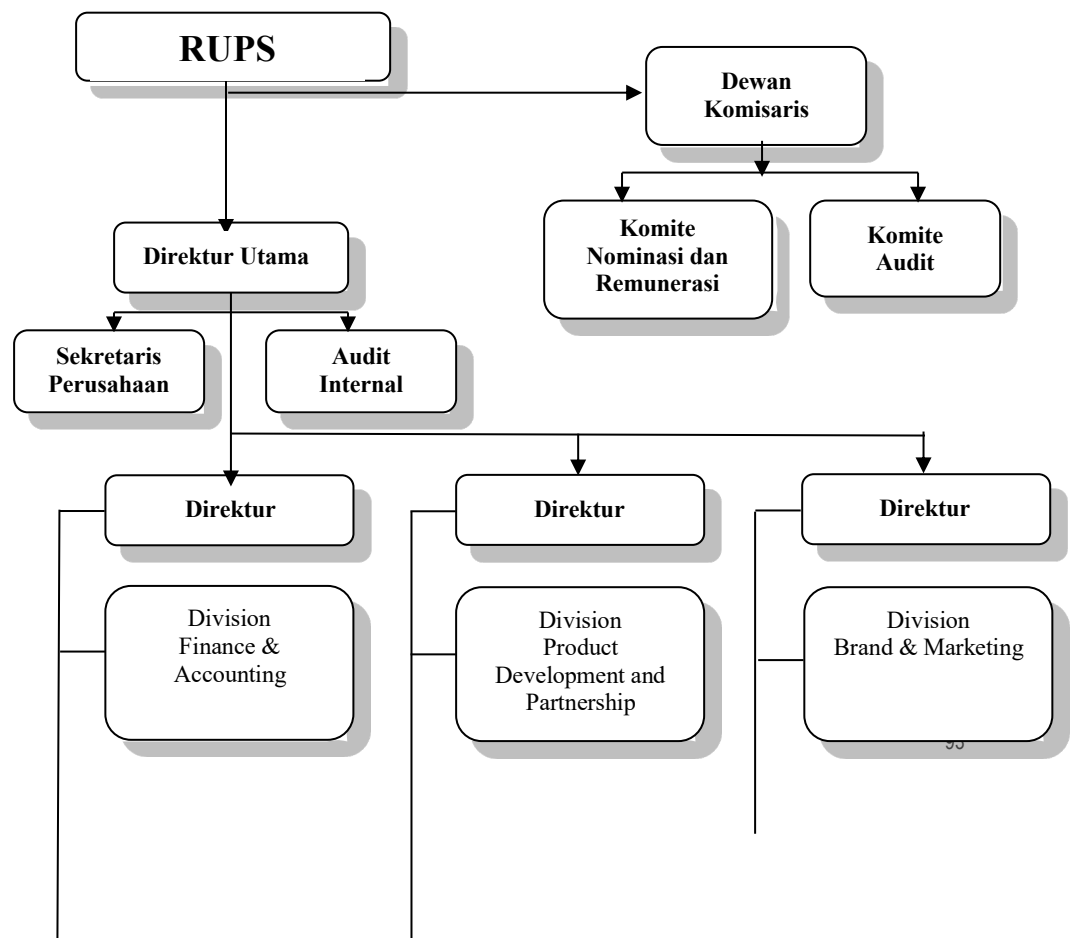
Sehubungan dengan target ekspansi Perseroan melalui Entitas Anaknya yakni GPI untuk melakukan penggelaran FTTH di Bali dan Lombok dimana saat ini GPI belum memiliki perjanjian apapun terkait penyediaan bandwidth, maka terdapat risiko dimana apabila tidak didapatkan kontrak dengan penyedia backbone dan/atau penyedia bandwidth tersebut maka Perseroan akan mengalami kendala dalam penyaluran layanan FTTH kepada pelanggan. Perseroan memitigasi hal ini dengan cara senantiasa melakukan komunikasi aktif dengan para pelaku bisnis telekomunikasi di Bali dan Lombok, dengan selalu membuka peluang kerjasama, selain itu Perseroan juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembangunan backbone sendiri pada lokasi-lokasi yang potensial di masa yang akan datang.

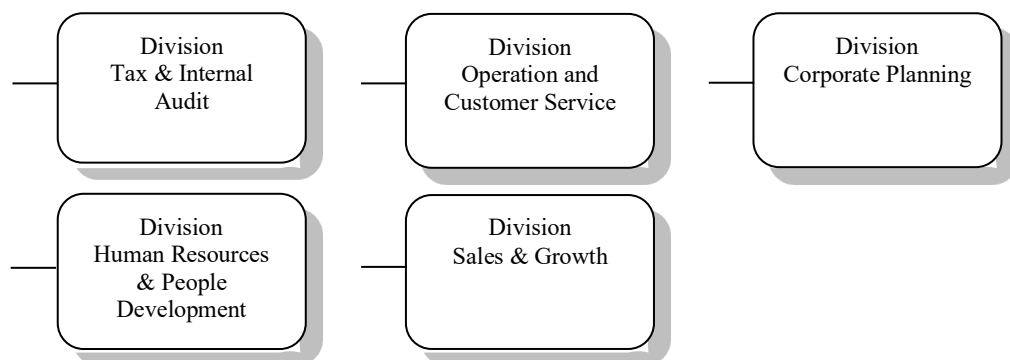
9. Risiko Ketergantungan Terhadap Entitas Anak

Sebagai perusahaan induk, kinerja Perseroan akan bergantung pada kinerja masing-masing Entitas Anak. Apabila Entitas Anak tidak mencapai pertumbuhan yang diharapkan atau mengalami masalah keuangan, hal tersebut dapat berdampak pada kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan secara konsolidasi. Perseroan melakukan mitigasi atas risiko ini dengan cara melakukan komunikasi, dan pengawasan secara intensif terhadap masing-masing Entitas Anak dan bisnis unitnya untuk memastikan tidak terdapat kendala yang berarti yang dapat menimbulkan kerugian pada Entitas Anak.

I. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut struktur organisasi Perseroan:





J. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya.

Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.

Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Berikut komposisi karyawan menurut jabatan, pendidikan, usia, hubungan kerja dan lokasi penempatan per 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Komposisi Karyawan Perseroan

Jabatan

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Manager/ Departemen Head	4	6	4
Staff	16	15	17
Jumlah	20	21	21

Pendidikan

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
SD – SMA	7	7	7
Diploma	1	1	1
S1 Keatas	12	13	13
Jumlah	20	21	21

Usia

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
21 – 30	9	9	9
31 – 40	8	8	8
41 Keatas	3	4	4
Jumlah	20	21	21

Hubungan Kerja

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tetap	19	21	21
Tidak Tetap	1	0	0
Jumlah	20	21	21

Lokasi Kerja

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jakarta	20	21	21
Luar Jakarta	0	0	0
Jumlah	20	21	21

b. Komposisi Karyawan Perusahaan anak Jabatan

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Manager/ Departemen Head	7	8	7
Staff	35	33	28
Jumlah	42	41	35

Pendidikan

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
SD – SMA	14	11	10
Diploma	1	1	1
S1 Keatas	27	29	24
Jumlah	42	41	35

Usia

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
21 – 30	23	22	21
31 – 40	16	17	12
41 Keatas	3	2	2

Jumlah	42	41	35
---------------	-----------	-----------	-----------

Hubungan Kerja

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tetap	36	35	31
Tidak Tetap	6	6	4
Jumlah	42	41	35

Lokasi Kerja

	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jakarta	25	23	21
Luar Jakarta	17	18	14
Jumlah	42	41	35

K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

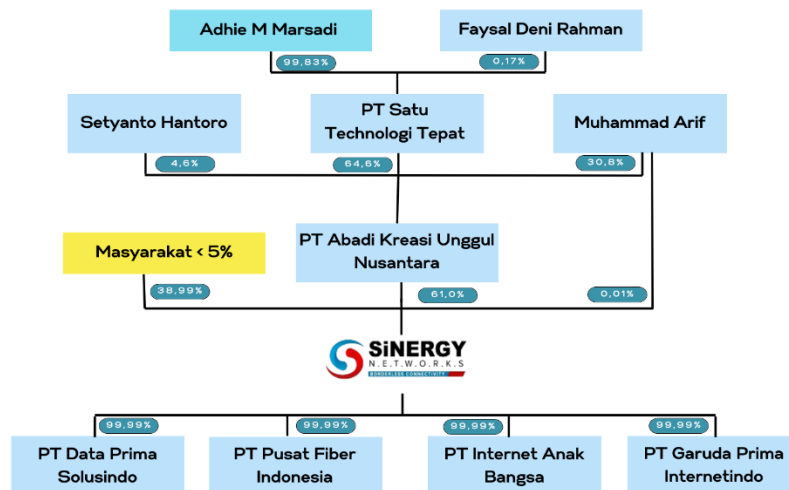
Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

Nama	AKUN	Perseroan	DPS	PFI	IAB	GPI
Bayu Satrio	-	-	-	D	D	-
Bianca Wina	-	-	K	-	-	-
Cahyana Ahmad Jayadi	-	KI	-	-	-	-
Danang Wijayanto	-	-	D	-	-	-
Tongam Lumban Tobing	-	K	-	-	-	-
Saripudin	-	KU	-	-	-	-
Muhammad Arif	K	DU	-	K	K	D
Willy Unsulangi	-	D	-	-	-	K
Anugrah Dwi Setyanto	D	-	-	-	-	-

Keterangan :

KU	=	<i>Komisaris Utama</i>	K	=	<i>Komisaris</i>	KI	=	<i>Komisaris Independen</i>
DU	=	<i>Direktur Utama</i>	D	=	<i>Direktur</i>			

DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM



Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres 13/2018”), Perseroan telah melaporkan Adhie M. Masardi selaku pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal.

Ketentuan Pasal 85 Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (“POJK 3/2021”), Pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 06/2022 telah menetapkan Adhie M. Masardi sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

L.1 AKUN

UMUM

AKUN didirikan dengan nama PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara sesuai dengan Akta Pendirian No. 11 tanggal 6 September 2021 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU.0055311.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 6 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151489.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 September 2021 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 27151 serta Tambahan BNRI No. 65 tanggal 6 September 2021.

Sejak pendirian, anggaran dasar AKUN telah mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 07 tertanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Yunita Elysabeth Nainggolan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah (i) mendapatkan persetujuan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0059527.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU0164087.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0045432 tertanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162412.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022 serta telah diumumkan dalam

BNRI No. 29004 serta Tambahan BNRI No. 69 tertanggal 30 Agustus 2022 (“**Akta AKUN No. 07/2022**”).

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Akta AKUN No. 07/2022, maksud dan tujuan AKUN adalah untuk berusaha di bidang Telekomunikasi dan Aktivitas Jasa Keuangan bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AKUN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. **Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61999)**

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

b. **Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keingatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara No. 76 tanggal 29 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0105627 tanggal 30 Maret 2023, dan telah (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0064172.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 30 Maret 2023 (“**Akta AKUN No. 76/2023**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham AKUN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000 setiap saham		
Modal Dasar	100	100.000.000	-
PT Satu Teknologi Tepat	42	42.000.000	64,6
Muhammad Arif	20	20.000.000	30,8
Setyanto Hantoro	3	3.000.000	4,6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65	65.000.000	100
Saham dalam portepel	35	35.000.000	-

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara No. 15 tanggal 28 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dethisyah Agrimerinda, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0119788 tanggal 4 Maret 2025, dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0050957.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 4 Maret 2025 (“**Akta AKUN No. 15/2025**”), adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Anugrah Dwi Setyanto

Dewan Komisaris:

Komisaris : Muhammad Arif

M. INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN ANAK

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	DPS	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2022	Kabupaten Tangerang	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%
2	PFI	Perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	2022	2022	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%
3	IAB	Perdagangan besar, konstruksi sipil, konstruksi khusus, konstruksi gedung	2025	2025	Jakarta Barat	Sudah Beroperasi secara komersial	99%
4	GPI	Perdagangan, informasi dan Komunikasi	2019	2025	Bali	Sudah Beroperasi secara komersial	99,99%

1. DPS

UMUM

PT Data Prima Solusindo didirikan dengan Akta Pendirian PT DPS No. 11 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Dince Yuniarti Sitompul, S.H., M. Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0065969.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0239638.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 dan diumumkan dalam BNRI No. 071 dan TBNRI No. 029862 tanggal 6 September 2022 (“**Akta Pendirian DPS**”).

Anggaran dasar DPS berdasarkan Akta Pendirian DPS sebagaimana diungkapkan pada di atas, telah mengalami perubahan dan anggaran dasar DPS yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 56 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0048398.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Agustus 2023 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0106053 tanggal 18 Agustus 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159466.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 18 Agustus 2023 (“**Akta DPS No. 56/2023**”).

Anggaran dasar DPS adalah yang sebagaimana terdapat pada Akta Pendirian DPS dan Akta No. 56/2023.

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar DPS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler RUPS No. 53 tanggal 23 November 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0084913.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235383.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 November 2022 dan diumumkan dalam BNRI No. 094 dan TBNRI No. 040680 tanggal 25 November 2022 (“**Akta DPS No. 53/2022**”), maksud dan tujuan DPS ialah menjalankan usaha di bidang informasi dan komunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DPS dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Aktivitas utama:

1. Internet Service Provider (KBLI 61921).

Aktivitas pendukung:

1. Aktivitas Telekomunikasi dan Kabel (KBLI 61100).

DPS saat ini telah menjalankan kegiatan usaha secara komersial.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPS berdasarkan Akta Pendirian dan Akta DPS No. 56/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 27.500,- setiap saham		
Modal Dasar	2.000.000	55.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			

Perseroan	9.999	274.972.500	99,99
Danang Wijayanto	1	27.500	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.910	30.275.000.025	100,00
Saham dalam portepel	899.090	24.724.975.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DPS pada saat ini adalah berdasarkan Akta Pendirian DPS, sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Danang Wijayanto

Dewan Komisaris:

Komisaris : Bianca Wina

2. PFI

UMUM

PFI didirikan berdasarkan Akta Pendirian PFI No. 11 tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0044712.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 5 Juli 2022; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127861.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Juli 2022; serta (iii) diumumkan dalam BNRI No. 54 tanggal 8 Juli 2022 serta Tambahan BNRI No. 22148 tanggal 8 Juli 2022 ("**Akta Pendirian PFI**").

Anggaran dasar PFI berdasarkan Akta Pendirian PFI sebagaimana diungkapkan di atas, telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir kali sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PFI No. 44 tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan dan persetujuan dari Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0105546 tanggal 15 Agustus 2023 dan (ii) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0048086.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0158481.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 067 tanggal 22 Agustus 2023 serta Tambahan BNRI No. 025143 tanggal 22 Agustus 2023 ("**Akta PFI No. 44/2023**").

Anggaran dasar PFI adalah yang sebagaimana terdapat pada Akta Pendirian PFI dan Akta PFI No. 44/2023 ("**Anggaran Dasar PFI**").

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PFI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, maksud dan tujuan PFI ialah berusaha dalam bidang (i) Informasi dan Komunikasi; (ii) Konstruksi; (iii) Perdagangan; dan (iv) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PFI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Informasi dan Komunikasi, antara lain:
 - a. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
 - b. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi;
 - c. Internet Service Provider;
 - d. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; dan
 - e. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi.
2. Konstruksi, antara lain:
 - a. Instalasi Telekomunikasi; dan
 - b. Konstruksi Sentral Telekomunikasi.
3. Perdagangan, antara lain:
 - a. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya.
4. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain:
 - a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

PFI saat ini sudah menjalankan kegiatan usaha secara komersial.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PFI berdasarkan Akta PFI No. 44/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	2.000.000	200.000.000.000	-
Perseroan	1.504.999	150.499.900.000	99,99
Muhammad Arif	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.505.000	150.500.000.000	100,00
Saham dalam portepel	495.000	49.500.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PFI terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PFI No. 52 tanggal 20 September 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, Notaris di Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0057385 tanggal 21 September 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

0188241.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 September 2022 (“Akta PFI No. 52/2022”), yaitu sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Bayu Satrio

Dewan Komisaris:

Komisaris : Muhammad Arif

3. IAB

UMUM

IAB didirikan dengan nama PT Pusat Fiber Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian IAB No. 02 tanggal 5 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Dethisyah Agrimerinda, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kepulauan Seribu yang telah (i) mendapatkan pengesahan Menkum berdasarkan surat keputusan Menkum No. AHU-0036016.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 7 Mei 2025; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099100.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 7 Mei 2025; serta (iii) diumumkan dalam BNRI No. 037 tanggal 9 Mei 2025 serta Tambahan BNRI No. 011995 tanggal 9 Mei 2025 (“**Akta Pendirian IAB**”).

Anggaran dasar IAB berdasarkan Akta Pendirian IAB sebagaimana diungkapkan pada huruf A di atas, belum pernah mengalami perubahan dan anggaran dasar IAB yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian IAB (“**Anggaran Dasar IAB**”).

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar IAB sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, maksud dan tujuan PFI ialah berusaha dalam bidang (i) Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor; (ii) Konstruksi bangunan sipil; (iii) Konstruksi khusus; dan (iv) Konstruksi gedung.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PFI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor, antara lain:
 - a. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523);
 - b. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (Kode KBLI 46511);
 - c. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (Kode KBLI 46639); dan
 - d. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (Kode KBLI 46638).
2. Konstruksi bangunan sipil, antara lain:
 - a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42206); dan
 - b. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (Kode KBLI 42204).
3. Konstruksi khusus, antara lain:
 - a. Instalasi Telekomunikasi (Kode KBLI 43212).
4. Konstruksi gedung, antara lain:

- a. Konstruksi Gedung Lainnya (Kode KBLI 41019); dan
- b. ii. Konstruksi Gedung Hunian (Kode KBLI 41011).

IAB saat ini sudah menjalankan kegiatan usaha secara komersial.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham IAB berdasarkan Akta Pendirian IAB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	-
Perseroan	1.980	1.980.000.000	99,00
Muhammad Arif	20	20.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	3.000	3.000.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IAB terakhir adalah berdasarkan Akta Pendirian IAB, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Bayu Satrio

Dewan Komisaris

Komisaris : Muhammad Arif

4. GPI

UMUM

GPI adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Denpasar, didirikan dengan nama PT Garuda Prima Internetindo berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Jefriy Firmanto Soegianto, S.H., M. Kn. Notaris di Kota Denpasar dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0021891.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0104259.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 dan diumumkan dalam BNRI No. 66 dan TBNRI 022453 (“**Akta Pendirian GPI**”).

Anggaran dasar GPI berdasarkan Akta Pendirian GPI sebagaimana diungkapkan pada di atas, telah mengalami perubahan dan anggaran dasar GPI yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler RUPS No. 56 tanggal 18 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Bambang Ariawan, S.H., Notaris di Bogor dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047746.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 21 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam

Daftar Perseroan No. AHU-0164454.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 21 Juli 2025 (“**Akta GPI No. 56/2025**”).

Anggaran dasar GPI adalah yang sebagaimana terdapat pada Akta Pendirian GPI dan Akta No. 56/2025.

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GPI sebagaimana termaktub dalam Akta GPI No. 56/2025, maksud dan tujuan GPI ialah menjalankan usaha di bidang informasi dan komunikasi serta perdagangan besar. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DPS dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Internet Service Provider (KBLI 61921);
2. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 6199);
3. Aktivitas Pengolahan Data (KBLI 63111);
4. Aktivitas Hosting dan YBDI (KBLI 63112);
5. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523);
6. Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI 61300);
7. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (61100);
8. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200).

GPI saat ini telah menjalankan kegiatan usaha secara komersial.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GPI terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 19 September 2025 yang dibuat di hadapan Delny Toeberto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, dengan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0339802 tanggal 19 September 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219209.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 19 September 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	-
Perseroan	2.499	249.900.000	99,00
Willy Unsulangi	1	100.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Saham dalam portepel	7.500	750.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DPS pada saat ini adalah berdasarkan Akta Pendirian DPS, sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Muhammad Arif

Dewan Komisaris:

Komisaris : Willy Unsulangi

N. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD I

Dalam rangka PMHMETD I, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Obyek	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 1.328 tanggal 19 September 2025, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.267 tanggal 16 Oktober 2025, yang keduanya dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dengan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk untuk PMHMETD I ("Akta PPAS")	a. Perseroan; dan b. PT Ficomindo Buana Registrar ("BAE")	Penunjukan BAE oleh Perseroan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham serta bertindak sebagai agen pelaksana dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan terus berlaku selama saham masih tercatat di BEI, kecuali diputus lebih awal dengan pemberitahuan tertulis minimal enam bulan sebelumnya.
2.	Akta Perjanjian Pembeli Siaga No. 1.329 tanggal 19 September 2025 ("Akta PPS")	a. Perseroan; dan b. AKUN	Penunjukan AKUN oleh Perseroan untuk membeli Sisa Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang tidak diambil oleh Pemegang Saham maupun Pemegang HMETD, dengan nilai maksimal 5.652.377.067 saham setara dengan Rp1.413.094.266.750,00 berdasarkan Harga Pelaksanaan Rp250 per saham.	Sampai dengan efektif nya pernyataan pendaftaran
3.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran seri II No. 1.331 tanggal 19 September 2025 sebagaimana telah	a. Perseroan; dan b. BAE.	Perjanjian ini mengatur mengenai penunjukan dan pengaturan pelaksanaan pengelolaan administrasi serta kewajiban terkait	Sampai dengan efektif nya pernyataan pendaftaran

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Obyek	Jangka Waktu
	diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) No. 1.269 tanggal 16 Oktober 2025, yang keduanya dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn. ("Akta PPAW")		Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), termasuk komitmen pihak kedua dalam melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan saham hasil pelaksanaan HMETD yang tidak diambil oleh pemegang saham.	
4.	Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II No. 1.330 tanggal 19 September 2025 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri II PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.268 tanggal 16 Oktober 2025, yang keduanya dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn. ("Akta PPW")	Perseroan	Pernyataan Penerbitan Waran Seri II	Sampai dengan efektif nya pernyataan pendaftaran

O. PERJANJUAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana PMHMETD I, Perusahaan Anak telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Penyediaan Fiber Optik Core dalam Jaringan Telekomunikasi Batam – Singapore secara Indefeasible Right of Use (IRU) No. 019/JMP-PFI/LEG/PKS// 2025 tanggal 2 Mei 2025 ("PKS IRU Batam - Singapore")	1. PFI; dan 2. PT Jejaring Mitra Persada ("JMP").	Penyediaan Fiber Optik Core secara <i>Indefeasible Right of Use</i> untuk jaringan telekomunikasi Batam – Singapore.	Sepanjang umur teknis kabel FO yang ditentukan berdasarkan masa hidup operasional normal kabel FO terhitung sejak ditandatanganinya BAST.	Biaya penggunaan kabel FO: Rp39.600.000.000 Biaya pemeliharaan dan perbaikan: Rp1.584.000.000/ta hun

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
2.	Perjanjian Penyediaan Fiber Optik Core dalam Jaringan Telekomunikasi Jakarta-Batam Submarine Cable System (Rising-8) secara Indefeasible Right of Use (IRU) No. 020/JMP-PFI/LEG/PKS/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 ("PKS IRU Rising-8")	1. PFI; dan 2. JMP	Penyediaan Fiber Optik Core secara Indefeasible Right of Use dalam rangka pembangunan serta penggelaran jaringan telekomunikasi Rising-8 segmen Jakarta-Batam.	15 tahun sejak ditandatanganinya BAST.	Biaya penggunaan kabel FO: Rp202.950.000.000 Biaya pemeliharaan dan perbaikan: Rp10.147.500.000/tahun
3.	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Pendukungnya antara IJE dan IAB No. IAB 001/PKS/IAB-IJE/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 ("PKS IAB - IJE")	1. PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE"); dan 2. IAB.	Pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur pendukungnya (<i>homepass</i> dan <i>homeconnect</i>) dengan target 2.000.000 <i>homeconnect</i> .	20 Mei 2025 – 20 Mei 2028	Rp270.000 per- <i>homeconnect</i>

P. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

- Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Kredit

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki satu perjanjian kredit dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 22 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Khairina, S.H., Notaris di Jakarta ("PK Bank DKI")	a. PT Bank DKI ("Bank DKI"); dan b. Perseroan	Fasilitas Kredit Investasi – Pembelian untuk pembelian tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa ruko lima lantai di Jl. Kapten	Jangka waktu fasilitas kredit: 22 Juli 2025 sampai dengan 22 Juli 2032 Jangka waktu PK Bank DKI: sampai dengan jumlah	Rp9.000.000.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
			<p>Tendean No. 27^a, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, DKI Jakarta.</p> <p>Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan <i>financial covenant</i> sebagai berikut: <i>Current Ratio</i> (CR) minimal 100%, <i>Debt to Equiti Ratio</i> (DER) minimal 250%., <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) minimal 100%, serta ekuitas dan laba tetap positif. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi ketentuan <i>financial covenant</i> tersebut.</p>	yang terutang telah dibayar lunas	

Perjanjian Kredit

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki satu perjanjian sewa dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
1.	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Di Lantai 10 Gedung Cyber No. 007/SL-CITINET/XI/2016 tanggal 28 November 2016, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Ketujuh tanggal 2 Oktober 2025</p> <p>("Perjanjian Sewa Gedung Cyber")</p>	<p>1. Perseroan; dan PT Amron Citinet ("AC")</p>	<p>Gedung Cyber Lt. 10, Jl. Kuningan Barat No. 8, Jakarta Selatan</p>	<p>1 Juni 2025 – 30 Mei 2026</p>	<p>Rp2.000.000 per bulan apabila tidak ditempati oleh penyewa</p> <p>Rp3.000.000 per bulan apabila ruangan ditempati oleh penyewa dan/atau wakil dari penyewa</p>

- **Perjanjian antara Perusahaan Anak dengan Pihak Ketiga**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak memiliki perjanjian dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Sebidang Tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) No. 02 tertanggal 3 Januari 2025 ("Perjanjian Sewa Menyewa Sebidang Tanah dan Rumah Toko")	1. Drg. Beryl Nugroho Komala; dan 2. DPS.	Sewa menyewa bidang Tanah dan Bangunan Rumah Toko Seluas 84 M ² oleh Drg. Beryl kepada DPS	2 Januari 2025 sampai dengan 2 Januari 2028	Rp468.000.000
2.	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Pendukungnya antara IJE dan IAB No. IAB 001/PKS/IAB-IJE/V/2025 tanggal 20 Mei 2025	1. PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE"); dan 2. IAB.	Pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur pendukungnya (<i>homepass</i> dan <i>homeconnect</i>) dengan target 2.000.000 <i>homeconnect</i> .	20 Mei 2025 – 20 Mei 2028	Rp270.000 per- <i>homeconnect</i>
3.	Kontrak Berlangganan antara PFI dan IJE tentang Layanan IP Transit No. 42/PKS/LGL/PF I-IJE/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 ("PKS PFI – IJE")	1. PFI; dan 2. PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE").	Penyediaan layanan IP transit PFI oleh PFI kepada IJE.	25 Maret 2025 – 25 Maret 2035	Rp242.550.000.000
4.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Kabel Fiber Optik No. 30/PKS/PFI-GLN/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana diubah terakhir	1. PFI; dan 2. PT Gemilang Lintang Nusantara ("GLN")	GLN akan menyediakan jaringan kabel fiber optik kepada PFI.	9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan.	1. DPP: Rp569.820,00/km/bulan 2. PPN: Rp62.680,00 3. Total: Rp632.500,00/km/bulan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
	dengan Amandemen III atas Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Kabel Fiber Optik No. 021/AMD-PKS/PFI-GLN/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025. ("PKS GLN")				
5.	Perjanjian Penyediaan Fiber Optik Core dalam Jaringan Telekomunikasi Batam – Singapore secara Infeasible Right of Use (IRU) No. 019/JMP-PFI/LEG/PKS/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 ("PKS IRU Batam - Singapore")	1. PFI; dan 2. PT Jejaring Mitra Persada ("JMP").	Penyediaan Fiber Optik Core secara <i>Infeasible Right of Use</i> untuk jaringan telekomunikasi Batam – Singapore.	Sepanjang umur teknis kabel FO yang ditentukan berdasarkan masa hidup operasional normal kabel FO terhitung sejak ditandatanganinya BAST.	Biaya penggunaan kabel FO: Rp39.600.000.000 Biaya pemeliharaan dan perbaikan: Rp1.584.000.000/ta hun
6.	Perjanjian Penyediaan Fiber Optik Core dalam Jaringan Telekomunikasi Jakarta-Batam Submarine Cable System (Rising-8) secara Infeasible Right of Use (IRU) No. 020/JMP-PFI/LEG/PKS/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 ("PKS IRU Rising-8")	1. PFI; dan 2. JMP	Penyediaan Fiber Optik Core secara Infeasible Right of Use dalam rangka pembangunan serta penggelaran jaringan telekomunikasi Rising-8 segmen Jakarta-Batam.	15 tahun sejak ditandatanganinya BAST.	Biaya penggunaan kabel FO: Rp202.950.000.000 Biaya pemeliharaan dan perbaikan: Rp10.147.500.000/ta hun
7.	Perjanjian Pembangunan Infrastruktur Jaringan Kabel Fiber Optik No. 22/PKS/PFI-	1. PFI; dan 3. PT Mega Internet Nusantara ("MIN")	Pembangunan jaringan kabel fiber optik dan perangkat pendukung di wilayah Cinere	Berlaku sampai dengan ditandatanganinya BAST hasil pekerjaan dan BA masa	Rp8.959.328.306

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Perjanjian
	MIN/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum II atas Perjanjian Pembangunan Infrastruktur Jaringan Kabel Fiber Optik No. 015/ADD- PKS/PFI- MIN/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 ("PKS PFI – MIN")		Depok – Pancoran Mas Depok dan Pondok Gede – Bekasi Barat	pemeliharaan termasuk seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi.	
8.	Perjanjian Kontrak Berlangganan Tentang Layan IP Transit RBN No. 095/RBN-SIAP/GPI/IX/2023 tanggal 1 September 2023 ("Perjanjian Kontrak Berlangganan")	1. PT Rabik Bangun Nusantara ("RBN"); dan 2. GPI.	Penyediaan Layanan IP Transit RBN, yakni layanan akses internet global dengan fitur full route Border Gateway Protocol (BGP) Internet dengan menggunakan blok internet protocol dan autonomous syteem (AS).	1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024, namun diperpanjang otomatis apabila tidak terdapat pemberitahuan tertulis dari GPI untuk mengakhiri perjanjian ini.	Diatur dalam lampiran terpisah
9.	Perjanjian Berlangganan Jaringan Telekomunikasi tanggal 2 Juli 2024 ("Perjanjian Berlangganan Jaringan Telekomunikasi")	1. PT Mega Akses Persada ("MAP"); dan 2. GPI.	Penyediaan dan penggunaan Jaringan Telekomunikasi berbasis fiber optic oleh MAP kepada GPI.	Berlaku sejak tanggal aktif berlangganan (BAST) hingga berakhirnya seluruh masa aktif berlangganan Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan hukum kami sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi GPI, GPI dan RBN masih menundukkan diri terhadap perjanjian ini.	Bervariasi, bergantung pada suatu berita acara terpisah.

Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam Perjanjian Dengan Pihak Ketiga yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (termasuk kewajiban Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rancana Penawaran Umum Perdana Saham),

menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Q. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian Sewa dengan Pihak Terafiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan memiliki satu Perjanjian Sewa dengan Pihak Terafiliasi, berikut adalah ringkasan dari perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 7 Mei 2025 ("Perjanjian Sewa Perseroan – IAB")	1. Perseroan; dan 2. IAB.	Perseroan merupakan pengendali langsung dari IAB, di mana Perseroan adalah pemegang saham mayoritas IAB.	Bangunan di Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40 Blok A-1, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta sebagai kantor operasional	7 Mei 2025 – 6 Mei 2030	Rp3.000.000 per tahun Rp15.000.000 untuk lima tahun
2.	Perjanjian Pinjam Pakai antara Perseroan dan PFI tanggal 5 Juli 2024 ("Perjanjian Pinjam Pakai PFI")	1. Perseroan ; dan 2. PFI	Perjanjian Sewa PFI merupakan suatu transaksi afiliasi dikarenakan Perseroan adalah pemegang saham pengendali PFI, di mana PFI adalah perusahaan terkendali Perseroan.	Pinjaman atas sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40 Blok A1 RT 000, RW 000, Srengseng, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta	5 Juli 2024 – 5 Juli 2026	Tidak diatur.
3.	Perjanjian Pinjam Pakai antara Bayu Satrio dan PFI tanggal 5 Juli 2024 ("PKS PFI – BS")	1. PFI; dan 2. Bayu Satrio ("BS").	PKS PFI – BS merupakan suatu transaksi afiliasi dikarenakan BS adalah Direktur PFI, di mana PFI adalah perusahaan	Peminjaman sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40 Blok A1 RT 000, RW 000, Srengseng,	5 Juli 2024 – 5 Juli 2026	Tidak diatur.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
			terkendali Perseroan.	Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta		

Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (termasuk kewajiban Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rancana Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Perusahaan Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 4 Desember 2025, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara apa pun baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Persaingan Usaha, dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan dan Perusahaan Anak tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan perusahaan anak. Selanjutnya, Perseroan dan Perusahaan Anak juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri baik yang berdampak material maupun tidak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak dan/atau Perseroan yang secara material dan tidak material dapat berdampak negatif terhadap PMHMETD I dan penerbitan Waran Seri II dari Perseroan dan penggunaan dananya.

II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (Perseroan) dan entitas anak merupakan perusahaan yang memberikan layanan *business to business* (B2B) kepada para mitra Perseroan yang sebagian besar merupakan perusahaan *internet service provider* (ISP) dengan *market share* lebih dari 200 perusahaan dari seluruh ISP di Indonesia yang jumlahnya mencapai 800 perusahaan. Para Pelanggan Perseroan tersebar diseluruh wilayah Indonesia dari ISP besar berskala Nasional sampai ISP didaerah yang bersekala kecil. Layanan yang perseroan tawarkan antara lain adalah layanan pusat data interkoneksi, layanan kolokasi, layanan *local loop* atau *local access* serta layanan *IP Transit* (NAP) bekerjasama dengan mitra Perseroan.

Sejak didirikan pada 2016, saat ini Perseroan telah berkembang cukup pesat dengan memiliki POP (*point of presence*) berjumlah 13 POP yang tersebar di 8 kota-kota besar di Indonesia mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Balikpapan, Medan dan Lampung dan 1 POP di Singapura.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan penyedia jasa infrastruktur jaringan telekomunikasi terbaik dan tidak terbatas untuk mengembangkan infrastruktur digital Indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :

- Memberikan solusi yang akurat dan cepat terkait kebutuhan pelanggan;
- Menjadikan perusahaan yang selalu mengikuti perkembangan jaman untuk kebutuhan pelanggan;
- Memberikan fleksibilitas dalam memberikan solusi kepada pelanggan;
- Menjadikan lingkungan kerja yang kreatif dan produktif bagi seluruh karyawan; dan
- Menjadikan perusahaan yang bernilai lebih bagi seluruh pemegang saham dan karyawan.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, sebagai berikut :

1. **SINERGI.** Mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang saat ini maupun yang akan datang untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan usaha yang sehat.
2. **FOKUS.** Mengedepankan dan mendedikasikan diri pada pengembangan ICT yang komprehensif dan transparan.
3. **INTEGRITAS.** Mampu mewujudkan keinginan pelanggan dengan konsep duduk bersama dalam lingkup persoalan.
4. **CUSTOMER SATISFACTION.** Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi kebutuhan pengguna jasa, baik internal maupun eksternal secara tulus dan memuaskan.
5. **EXCELLENCE.** Berorientasi pada kepuasan dan keinginan pelanggan dengan mengedepankan ketepatan kualitas dan hasil yang memuaskan.

Berikut adalah rekam jejak kegiatan usaha dari Perseroan sebagai berikut:

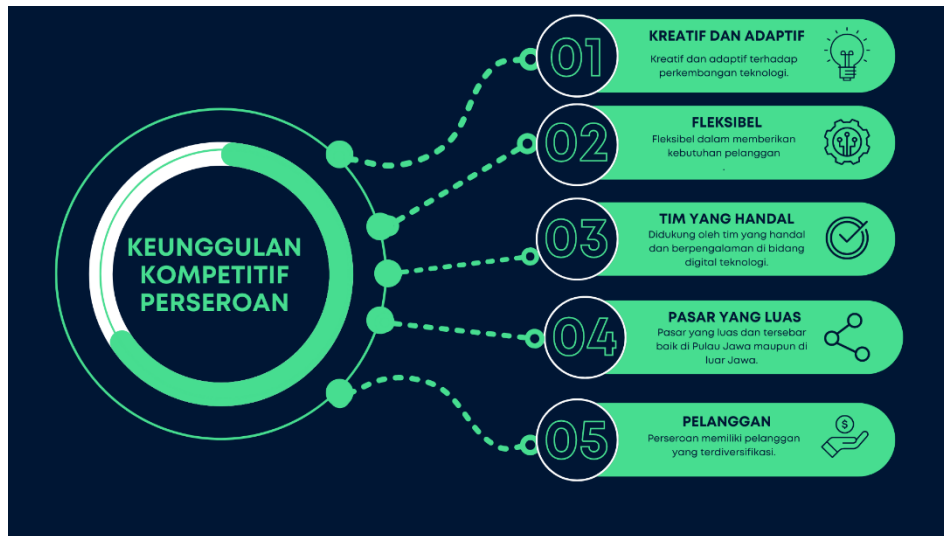
Sejarah Perseroan berawal dari kepekaan pendiri Perseroan, yaitu Bapak Muhammad Arif dalam melihat peluang besarnya pasar yang membutuhkan jasa infrastruktur telekomunikasi. Berkarir di bidang yang sama sejak tahun 2008, dengan *expertise* nya di bidang penyediaan jasa infrastruktur telekomunikasi pada tahun 2016 beliau dan keluarga mendirikan Perseroan untuk memberikan solusi terbaik bagi para mitra pengguna jasa layanan yang belum tergarap oleh perusahaan dimana beliau bekerja sebelumnya. Berikut merupakan rekam jejak Perseroan:

- Pada tahun 2016 Perseroan didirikan untuk pertama kalinya oleh Bapak Muhammad Arif dan keluarga dengan nama PT Sinergi Inti Andalan Prima.
- Pada Tahun 2017 Perseroan melakukan operasional untuk pertama kalinya. Seiring berjalannya waktu, Perseroan melakukan rekrutment dengan tujuan membentuk tim yang mumpuni dan solid untuk memberikan layanan yang prima kepada setiap klien. Setiap fungsi pada Perseroan diisi dengan orang-orang yang handal dan menguasai bidangnya masing-masing. Tidak hanya dari segi operasional, namun Perseroan memiliki standard yang tinggi dari sisi administrasi yang rapi dan transparan dengan tujuan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh klien.

-
- Pada tahun 2018 Perseroan melakukan penetrasi pasar dengan memperluas jangkauan layanan. Sampai dengan akhir tahun 2018, Perseroan telah memiliki 4 POP yang tersebar di Jakarta dan Bali.
 - Dari tahun 2019 sampai dengan 2021 Perseroan melakukan terus penetrasi pasar dengan tujuan menggaet lebih banyak pangsa pasar. Pada akhir tahun 2021, Perseroan telah memiliki 11 POP yang tersebar di 6 kota di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021 Perseroan juga bekerjasama dengan PT Rabik Bangun Nusantara (RBN) dimana Perseroan dapat menggunakan lisensi *Network Access Provider* (NAP) yang dimiliki oleh RBN dan Perseroan dapat memberikan layanan IP transit premium dengan rute terbaik ke jaringan global melalui jaringan yang ada di Singapura.
 - Pada tahun 2022 perseroan memiliki visi besar kedepannya untuk ekspansi mengembangkan Jaringan Fiber Optic, sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menambah POP sehingga terdapat 13 POP yang tersebar di 8 kota di Indonesia ditambah 1 POP di Singapura. Selain itu, dengan rencana Perseroan membangun jaringan kurang lebih 400 Km di wilayah Jabodetabek dan Jawa Backbone dan juga akan menambah POP di 52 titik, sehingga tercetus opsi untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia untuk mendanai ekspansi ini. Beberapa persiapan dilakukan Perseroan diantaranya melakukan beberapa perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan perubahan nama menjadi PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Perseroan memiliki harapan pada awal tahun 2023 proses IPO ini dapat selesai dan Perseroan resmi mencatatkan sahamnya di Perdagangan Bursa Efek Indonesia.
 - Pada tahun 2023, Perseroan telah berhasil melakukan penawaran umum saham perdana dan memperoleh tambahan permodalan untuk melakukan pengembangan infrastruktur jaringan internet. Pada akhir tahun 2024, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur jaringan internet di entitas anak PFI dan telah beroperasi secara komersial.
 - Pada tahun 2025, Entitas Anak, PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), menjalin kerja sama strategis dengan PT Jejaring Mitra Persada (JMP) dalam proyek pengembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang menghubungkan Jakarta – Batam – Singapura. Kerja sama ini berbentuk perjanjian *Indefeasible Right of Use* (IRU), di mana PFI memperoleh hak penggunaan infrastruktur kabel bawah laut yang disediakan oleh JMP. Dalam kesepakatan tersebut, JMP bertanggung jawab menyediakan inti kabel serat optik (*fiber optic core*) serta melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pada jalur Rising-8, khususnya segmen Tanjung Punggir (Batam) – Tanah Merah (Singapura).
 - Kemudian pada bulan Mei 2025, Perseroan secara resmi mendirikan entitas anak yang bernama PT Internet Anak Bangsa (IAB) sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnisnya di sektor infrastruktur telekomunikasi. IAB akan berfokus sebagai kontraktor pembangunan jaringan *Fiber To The Home* (FTTH) serta penyedia layanan pemeliharaan jaringan yang menjadi sumber pendapatan berulang. Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat portofolio bisnis perusahaan, memperluas jangkauan layanan infrastruktur digital, serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi perusahaan secara berkelanjutan.
 - Pada bulan September 2025, Perseroan resmi mengakuisisi PT Garuda Prima Internetindo (GPI), yang dikenal juga sebagai penyedia layanan internet Bali Internet atau *Flynet*. Akuisisi ini merupakan bagian dari strategi ekspansi Perseroan untuk

memperluas jangkauan layanan dan infrastruktur jaringan digital di Indonesia, khususnya di wilayah Bali. Perseroan menyatakan langkah ini akan memperkuat sinergi operasional, meningkatkan efisiensi layanan *broadband*, serta memperluas cakupan jaringan *fiber optic* sebagai bagian dari rencana besar perusahaan membangun konektivitas nasional.

B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK



Perseroan dan Perusahaan anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan perjalanan selama 7 tahun berkecimpung dalam industri penyedia infrastruktur telekomunikasi, Perseroan terbukti tetap eksis dan mampu terus melakukan pengembangan usaha mengikuti perkembangan dunia teknologi yang berkembang pesat dan dinamis, hal ini menunjukkan keseriusan Perseroan dalam bidangnya. Berbagai langkah ekspansi baik dari penambahan POP maupun pengembangan dengan menambah layanan NAP dengan brand SYNERGY NETWORK yang terbukti dapat menambah aliran pemasukan Perseroan.

2. Fleksibel dalam memberikan kebutuhan pelanggan

Beragamnya kebutuhan pelanggan dalam bidang infrastruktur telekomunikasi, Perseroan selama ini terbukti dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat bagi setiap kebutuhan tersebut. Layanan yang diberikan Perseroan dapat dikustomisasi berdasarkan kebutuhan masing-masing pelanggan karena Perseroan menyadari bahwa setiap pelanggan memiliki preferensi tersendiri untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasinya.

3. Didukung oleh tim yang handal dan berpengalaman di bidang digital teknologi.

Bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi, Perseroan memandang bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan usaha yang dijalankannya. Oleh karenanya Perseroan berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang dapat memberikan ruang bagi para karyawannya untuk berinovasi pada peranannya masing-masing dengan harapan dapat menjalankan proses operasional sehari-hari sehingga makin efektif dan efisien.

4. Pasar yang luas dan tersebar baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.

Dengan basis data jaringan Perseroan yang luas dan tersebar di kota-kota besar di Indonesia, Perseroan memiliki keunggulan berupa pangsa pasar yang luas, menjadikan Perseroan merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi yang dipercaya oleh berbagai klien ISP besar di Indonesia. Portfolio tersebut juga menjadikan Perseroan semakin unggul dalam persaingan dengan usaha sejenis.

5. Perseroan memiliki pelanggan yang terdiversifikasi.

Selain berbagai klien yang dimiliki Perseroan yang merupakan internet service provider, Melalui perusahaan anak Perseroan yaitu PT Data Prima Solusindo, Perseroan memiliki basis data klien korporasi dan enterprise, dimana Perseroan memberirkan layanan infrastruktur telekomunikasi untuk klien di perkantoran dan *industrial area*. Diversifikasi ini menunjukkan bahwa Perseroan tidak tergantung pada satu pihak tertentu, namun Perseroan juga mengembangkan pada pangsa pasar lain dengan harapan kegiatan usaha Perseroan dapat terus berkesinambungan.

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Layanan Infrastruktur Telekomunikasi

Perseroan dan entitas anak merupakan perusahaan yang melayani *business to business* (B2B) sebagai penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi bagi lebih dari 200 Penyedia Layanan Internet atau *Internet Service Provider* (ISP) dengan jangkauan operasional di seluruh Indonesia. Perseroan juga merupakan Penyedia Akses Jaringan atau *Network Access Provider* (NAP) melalui kerjasamanya dengan PT Rabik Bangun Nusantara (RBN).

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan memberikan jasa infrastruktur telekomunikasi yang mana pelanggannya merupakan perusahaan penyedia layanan internet (ISP). Secara garis besar, layanan yang Perseroan tawarkan terdiri dari:

a. Layanan Pusat Data Interkoneksi

Layanan ini memberi pengguna konektivitas berkinerja tinggi antara pusat data di sekitar kota. Pengguna dapat menghubungkan antara ekosistem Pusat Data terkemuka dengan Kualitas Layanan dan Pengalaman yang terjamin. Layanan ini menghilangkan kerumitan dari interkoneksi antara hub pusat data global terkemuka.

b. Layanan Kolokasi,

Fasilitas Kolokasi Perseroan memungkinkan Pengguna untuk membangun kehadiran jaringan yang hemat biaya dan saling berhubungan di pasar baru. Situs Perseroan berlokasi strategis di komunikasi utama dan interkoneksi. Layanan ini menawarkan opsi kolokasi yang fleksibel dan aman, memastikan waktu maksimum dengan pemeliharaan dan pemantauan sepanjang waktu.

Fasilitas operator netral terpercaya Perseroan menawarkan kepada mitra Perseroan jaminan lingkungan hosting yang sangat aman dan tangguh, serta kekuatan pilihan untuk konektivitas melalui jaringan ekosistem interkoneksi Operator, Penyedia Layanan Cloud (CSP) dan Poin Pertukaran Internet (IXPs).

c. Layanan Loop Lokal,

Perseroan memberikan layanan menghubungkan jaringan WAN pelanggan yang ada di kantor pusat Pelanggan dengan beberapak kantor cabang melalui jaringan provider

d. Layanan Pengelolaan Perangkat

Perseroan memberikan jasa pengelolaan router, pengelolaan switch dan pengelolaan tautan milik para mitra

e. Layanan Penyedia Akses Jaringan (NAP)

Perseroan memberikan layanan IP transit yang menghubungkan jaringan di dalam negeri dengan jaringan induk di Singapura.

Dalam melaksanakan layanan-layanannya, Perseroan menggunakan merek yang dimiliki dan terdaftar atas nama Perseroan, yakni tiga Sertifikat Merek “SiNERGY Networks” dengan Nomor Pendaftaran IDM001172805, IDM001094762, dan IDM001172805, seluruhnya dengan tanggal penerimaan 20 Oktober 2022 dan masa berlaku hingga 20 Oktober 2032. Merek-merek tersebut berfungsi sebagai identitas utama Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sekaligus menjadi instrumen penting dalam membangun reputasi, memperluas basis klien, dan mendukung pertumbuhan pendapatan Perseroan.

Dalam menjalankan layanan-layanan tersebut, berikut adalah bisnis proses dari Perseroan:



1) Penawaran

Tim Marketing Perseroan melakukan marketing dengan metode *direct selling*, dimana Perseroan melakukan approach kepada calon pelanggan dengan tujuan mengetahui kebutuhan dari calon pelanggan yang dapat Perseroan layani. Proses ini berakhir dengan diterbitkannya surat penawaran atau *offering letter* dari Perseroan sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan tersebut.

2) Purchase Order

Setelah calon pelanggan mendapatkan suratpenawaran dari Perseroan maka akan dilakukan negosiasi dan beberapa penyesuaian agar layanan dapat berfungsi optimal sesuai kebutuhan calon pelanggan kemudian calon pelanggan menerbitkan Purchase Order.

3) Penandatanganan Kontrak

Sesuai dengan purchase order yang diterima Perseroan dari pelanggan, Perseroan dan pelanggan menandatangani Perjanjian Kerja, dimana didalamnya tertera *terms and condition* seperti harga final, termin pembayaran, dan ingkup kerja yang jelas.

4) **Installation**

Pada tahap ini Perseroan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya, yang umumnya dilakukan dengan penyambungan jaringan pelanggan pada perangkat Perseroan yang ada di POP. Berikut merupakan dokumentasi proses instalasi tersebut:



5) **Layanan Purna Jual**

Setelah proses instalasi selesai, Perseroan memberikan layanan purna jual tidak hanya dengan pemeliharaan sambungan perangkat di POP, namun Perseroan juga menyediakan bandwidth yang dibeli pelanggan dengan sistem langganan dengan tarif tertentu setiap bulannya.

2. **Layanan Penyediaan Bandwith**

Baik secara langsung maupun melalui perusahaan anak Perseroan yaitu DPS, Perseroan menawarkan layanan lain yaitu penyediaan bandwidth sebagai *Internet Service Provider (ISP)*. Layanan ISP yang ditawarkan memiliki brand “Data Prime”.



Dengan jaringan pelayanan (*service point*) Data Prime yang saat ini telah melebihi 25 tempat, didukung lebih dari 50 orang engineer dan para staff yang ahli di bidangnya, Data Prime telah memiliki lebih dari 500 klien dan lebih dari 1.000 project terselesaikan. Kedepannya dengan melihat kebutuhan bandwidth yang besar dan juga keunggulan Perseroan untuk menyediakan bandwidth dengan kecepatan yang tinggi dan harga yang ekonomis, Perseroan berharap dapat mengerjakan pangsa pasar yang lebih luas lagi.

3. **Layanan Penyewaan Fiber Optik**

Selain layanan infrastruktur telekomunikasi dan layanan penyediaan bandwidth, Perseroan juga merambah pangsa pasar lain yaitu penyewaan fasilitas Fiber Optik. Saat ini Perseroan melalui perusahaan anak PFI memiliki jaringan fiber optic sepanjang lebih dari 430 km yang tersebar sepanjang pulau Jawa. Dengan PFI yang memiliki jaringan fiber optic ini, Perseroan dapat memanfaatkan jaringan yang dimiliki PFI untuk dapat lebih mengoptimalkan usaha penyediaan bandwidth sehingga memiliki margin laba yang lebih besar.

4. Layanan Kontraktor Pembangunan Jaringan *Fiber To The Home* (FTTH)

Kegiatan usaha kontraktor untuk pembangunan jaringan FTTH (Fiber To The Home) merupakan layanan yang berfokus pada penyediaan infrastruktur telekomunikasi berbasis serat optik yang langsung menghubungkan jaringan internet berkecepatan tinggi ke rumah atau bangunan pengguna akhir. Dalam bisnis ini, IAB bertanggung jawab penuh mulai dari tahap perencanaan jaringan, survei lokasi, desain teknis, hingga pembangunan fisik yang mencakup penggalian, penanaman pipa ducting, penarikan kabel fiber optik, instalasi perangkat distribusi (seperti ODC dan ODP), serta penyambungan kabel ke rumah pelanggan (last mile connection). Kegiatan ini sangat penting dalam mendukung transformasi digital karena jaringan FTTH mampu memberikan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, stabilitas koneksi yang lebih baik, dan kapasitas bandwidth yang besar. Oleh karena itu, jasa kontraktor FTTH banyak dibutuhkan oleh operator telekomunikasi, penyedia layanan internet (ISP), maupun pemerintah dalam program perluasan akses internet, terutama di kawasan perumahan, perkantoran, kawasan industri, hingga daerah terpencil.

5. Layanan Jaringan *Fiber To The Home* (FTTH) sebagai ISP (*Internet Service Provider*)

Layanan Jaringan FTTH (Fiber To The Home) merupakan penyediaan layanan internet berbasis jaringan serat optik yang langsung menghubungkan pusat jaringan penyedia layanan ke rumah, apartemen, gedung perkantoran, atau bangunan pengguna akhir yang dilakukan oleh entitas anak Perseroan yaitu PT Garuda Prima Internetindo (GPI). Layanan ini mencakup berbagai aktivitas utama seperti perencanaan dan desain jaringan, pembangunan infrastruktur serat optik, instalasi perangkat distribusi (seperti ODC dan ODP), penyambungan jaringan ke pelanggan (last mile), serta pengelolaan dan pemeliharaan jaringan agar layanan tetap optimal.

Perseroan dan Perusahaan Anaknya tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anaknya tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang

Perseroan dan Perusahaan Anaknya tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu dalam kegiatan usahanya. Hal ini seperti diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025, Perseroan dan entitas anak tidak memiliki ketergantungan dan/atau sekelompok pelanggan dalam kegiatan usahanya.

D. PEMASARAN

Dengan lini bisnis yang Perseroan jalani dimana sebagian besar aliran pendapatan berasal dari bisnis *business to business* (B2B) dimana Perseroan memberikan layanan kepada para pelanggan yang merupakan penyedia layanan internet (ISP) maka strategi pemasaran Perseroan difokuskan pada pemasaran secara offline dengan melakukan berbagai pendekatan kepada para penyedia layanan internet tersebut. Berikut merupakan beberapa strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan:

1. Pemasaran B2C layanan FTTH berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi-7

Strategi pemasaran B2C (*Business to Consumer*) untuk layanan FTTH berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 7 berfokus pada edukasi pasar, diferensiasi nilai, dan pengalaman pengguna yang unggul. Langkah pertama adalah melakukan segmentasi pasar secara tepat dengan menyasar rumah tangga yang memiliki kebutuhan internet tinggi, pekerja jarak jauh, keluarga dengan banyak perangkat, hingga komunitas perumahan atau apartemen premium. Setelah itu, Perseroan mengutamakan nilai keunggulan layanan, seperti kecepatan ultra tinggi, latensi rendah yang cocok untuk *gaming* dan *video conference*, koneksi stabil untuk banyak perangkat sekaligus, serta dukungan penuh terhadap ekosistem *smart home*. Karena teknologi Wi-Fi 7 masih relatif baru, strategi promosi harus mencakup edukasi pasar melalui kampanye digital, video penjelasan, webinar, serta kolaborasi dengan influencer teknologi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Penawaran harga yang menarik dengan harga yang terjangkau dapat memberikan kualitas jaringan internet yang tinggi dapat meningkatkan daya tarik pelanggan baru. Dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup edukasi, promosi, kemitraan, dan pelayanan berkualitas, bisnis FTTH berbasis Wi-Fi 7 dapat berkembang pesat dan menjadi pilihan utama konsumen dalam layanan internet rumah masa depan.

2. Pemasaran offline B2B

Perseroan juga memiliki tim marketing yang melakukan *direct selling* kepada calon pelanggan potensial yang akan menjelaskan berbagai keunggulan dari layanan Perseroan sehingga calon pelanggan tertarik untuk menggunakan layanan Perseroan baik itu layanan jasa pusat data interkoneksi, kolokasi, loop lokal, pengelolaan perangkat maupun jasa penyedia akses jaringan (NAP).

3. *After sales maintenance*

Layanan yang diberikan perseroan bukan merupakan *one time service* hanya pada pemasangan interkoneksi data, namun para pelanggan Perseroan juga akan berlangganan bandwidth yang dikelola Perseroan setiap bulannya selama kontrak jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan titik penting dimana layanan yang prima dari para karyawan Perseroan kepada pelanggan antara lain dengan respon yang cepat dan tepat saat terdapat gangguan atau *trouble* sehingga tidak banyak merugikan para pengguna layanan ISP mitra Perseroan. Dengan layanan yang prima ini diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan sehingga dapat terjadi *repeat order* untuk kebutuhan pelanggan di tempat yang lain dan juga testimoni kepuasan pelanggan akan dapat memberikan citra baik bagi Perseroan sehingga ISP lain akan tertarik untuk ikut menggunakan layanan Perseroan.

4. Pemasaran dengan target pasar corporate dan enterprise melalui perusahaan anak

Perseroan menawarkan jasa yang sama namun dengan pasngsa pasar yang berbeda kepada *end user* yaitu corporate, enterprise dan juga pemerintahan melalui *e-catalog/LKPP*, namun Perseroan memisahkan transaksi tersebut melalui perusahaan anak Perseroan yaitu PT Data Prima Solusindo. Hal ini dilakukan Perseroan untuk mengurangi konflik di lapangan dan menjaga kerjasama dengan para mitra B2B Perseroan agar tidak saling berebut konsumen. Dengan adanya pemisahan ini pelanggan B2B Perseroan tetap merasa nyaman karena tidak tersaingi oleh vendornya sendiri.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan entitas tercatat telah melayani lebih dari 224 Perusahaan ISP (Internet Service Provider) di seluruh Indonesia. Dengan jumlah pelanggan yang banyak tersebut, maka Perseroan tidak memiliki ketergantungan tertentu terhadap satu atau sekelompok pelanggan.

Berikut adalah beberapa pelanggan dari Perseroan yang bergerak di berbagai bidang yang merupakan pelanggan B2B (*business to business*) yang sebagian besar merupakan penyedia jasa internet (ISP).



E. KONDISI PERSAINGAN

Pada industri penyedia infrastruktur dan jasa telekomunikasi di Indonesia, persaingan yang terjadi cukup ketat dimana untuk layanan ISP (Internet Service Provider) saja menurut data terkini saat Prospektus ini diterbitkan terdapat lebih dari 1200 perusahaan ISP, dimana setiap ISP tersebut memiliki vendor masing-masing di setiap daerah layanan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan Perseroan. Berdasarkan survei APJII tahun 2025, Penyedia Layanan Internet besar di Indonesia antara lain:

- Indihome
- Iconnet
- Biznet
- My Republic
- Oxygen
- First Media
- MNC Play
- XL Home
- DII

Kompetisi dalam penyewaan jaringan fiber optic didorong oleh permintaan yang terus meningkat dengan meningkatkannya konsumsi internet yang terjadi di seluruh dunia.

Posisi Perseroan dalam industri saat ini relatif masih cukup kecil dibandingkan para pesaing besar yang disebutkan di atas. Namun demikian, Perseroan dengan strategi dan keunggulannya diharapkan untuk terus bertumbuh dan bersaing di industri telekomunikasi.

F. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perkembangan Teknologi

Prospek usaha bisnis internet ke depan sangat cerah dan terus mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Transformasi digital di berbagai sektor mulai dari pendidikan, perbankan, kesehatan, e-commerce, hingga industri kreatif telah mendorong peningkatan kebutuhan akan konektivitas yang cepat, stabil, dan berkapasitas tinggi. Penerapan teknologi seperti 5G, Wi-Fi 7, *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), *cloud computing*, dan *edge computing* semakin memperluas peluang bisnis internet, tidak hanya sebagai penyedia koneksi tetapi juga sebagai penyedia layanan bernilai tambah seperti solusi *smart home*, platform digital, layanan data center, hingga *cyber security*.

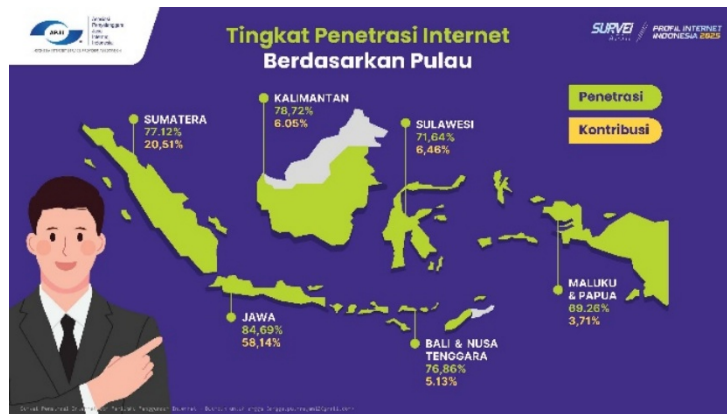
Selain itu, tren digital lifestyle yang mencakup kerja jarak jauh, konten streaming, *smart city*, dan kendaraan otonom turut menciptakan permintaan besar terhadap layanan internet berkualitas tinggi. Pertumbuhan pengguna internet yang terus meningkat baik dari kalangan rumah tangga, UMKM, maupun korporasi menjadikan sektor ini sebagai salah satu industri yang paling menjanjikan secara jangka panjang. Di Indonesia sendiri, penetrasi internet yang masih belum merata di seluruh wilayah membuka peluang ekspansi besar. Dengan inovasi teknologi yang terus berkembang dan kebutuhan digital yang semakin kompleks, bisnis internet tidak lagi sekadar layanan koneksi, tetapi akan menjadi tulang punggung ekonomi digital dan fondasi utama bagi transformasi industri di masa depan.

Tingkat penetrasi internet di Indonesia menurut survei yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada bulan Agustus 2025 yaitu sebesar 80,66% dimana 229.428.417 jiwa dari total 284.438.900 jiwa penduduk Indonesia telah terkoneksi internet pada tahun 2025. Angka ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan 79,50% di tahun 2024 dan 78,19% di tahun 2022.



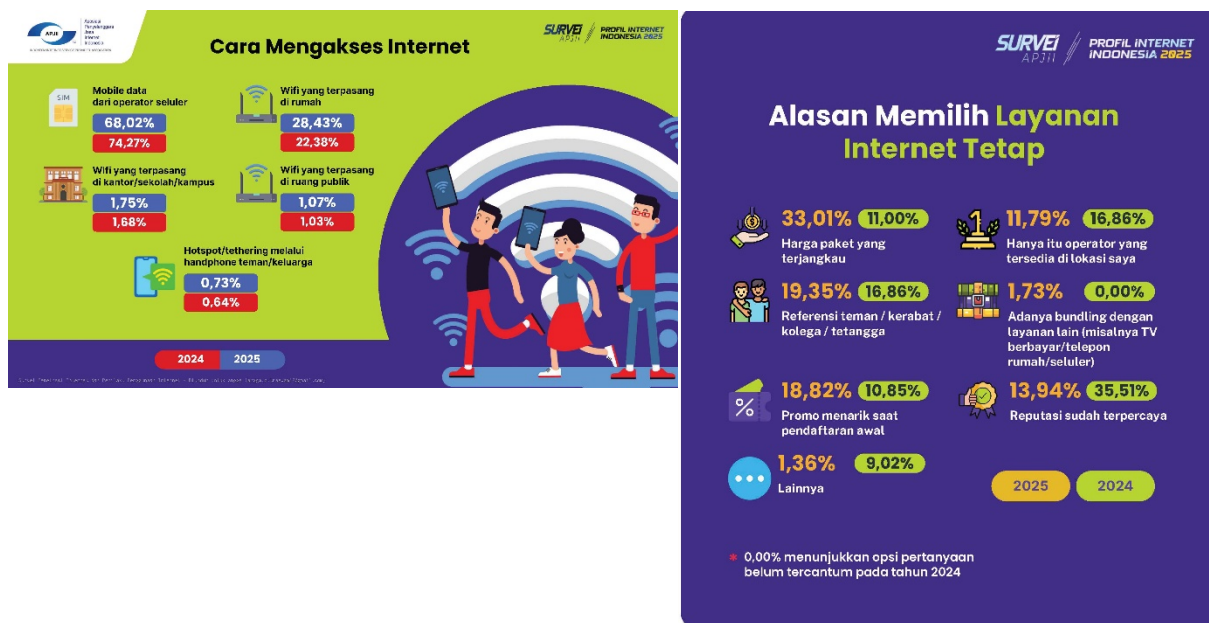
Sumber: Survei APJII

Dilihat dari persebaran menurut pulau, walaupun Pulau Jawa memiliki tingkat penetrasi internet yang relatif tinggi dibandingkan pulau yang lain, namun merujuk pada hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2020 bahwa 56,10% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pulau Jawa masih memiliki pangsa pasar yang cukup besar untuk penetrasi internet.



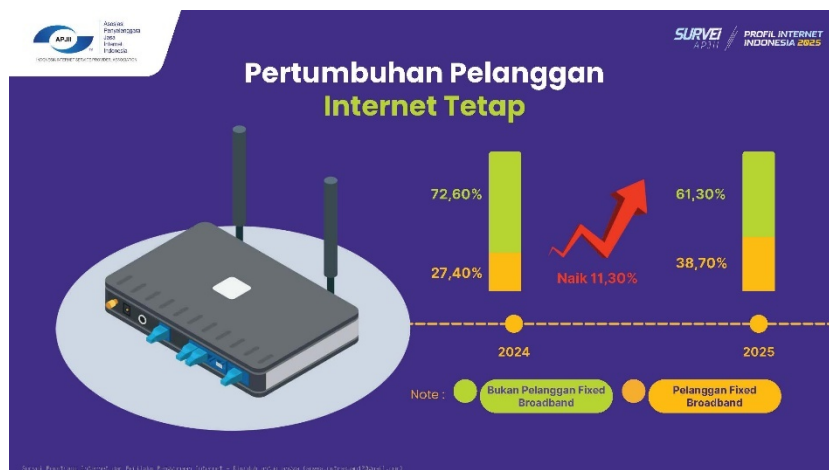
Sumber: Survei APJII

Pada survei yang sama, data menunjukkan bahwa dari jumlah masyarakat yang menggunakan internet tersebut sebagian besar melakukan akses internet dengan mobile data dari operator seluler sebesar 74,27% sedangkan sisanya menggunakan *fixed broadband* dari jaringan wifi yang tersedia baik di rumah, kantor/sekolah/kampus dan juga yang terpasang di ruang publik. Namun demikian, melakukan akses dari *fixed broadband* memberikan beberapa kelebihan mulai dari koneksi yang lebih stabil dan juga dari segi harga yang lebih ekonomis karena dapat diakses oleh banyak perangkat sekaligus.



Sumber: Survei APJII

Pertumbuhan pengguna *fixed broadband* atau internet tetap di Indonesia pada tahun 2025 meningkat pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga yang berlangganan *fixed broadband* naik dari sekitar 27,40% pada 2024 menjadi 38,70% di 2025, sebuah lonjakan yang cukup signifikan. Kenaikan ini tidak lepas dari perbaikan infrastruktur jaringan serat optik yang semakin merata, program pemerintah dalam mendorong pemerataan akses internet, serta kompetisi antar-penyedia layanan yang menurunkan biaya berlangganan dan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan koneksi yang lebih stabil untuk bekerja, belajar, hingga hiburan digital mendorong pergeseran dari dominasi akses mobile ke fixed broadband.



Sumber: Survei APJII 2021-2022

Perkembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)

Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) merupakan tulang punggung utama infrastruktur telekomunikasi global, termasuk Indonesia. Seiring dengan ledakan trafik data akibat transformasi digital, cloud computing, streaming, IoT, dan 5G, permintaan terhadap kapasitas SKKL terus meningkat tajam. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, sangat bergantung pada SKKL untuk menghubungkan wilayah-wilayah terluar dan mendukung konektivitas nasional. Selain itu, secara geografis Indonesia berada di jalur strategis antara Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australia, menjadikannya lokasi ideal untuk lintasan kabel laut internasional. Prospek usaha SKKL di Indonesia juga didorong oleh rencana pembangunan dan penguatan infrastruktur digital oleh pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Palapa Ring dan inisiatif perluasan jaringan ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Sejumlah perusahaan swasta dan BUMN seperti Telkom Group (lewat Telin), Indosat, Moratelindo, dan operator global seperti Google, Meta, dan Inligo Networks juga tengah terlibat aktif dalam pembangunan maupun ekspansi SKKL baru yang menghubungkan Indonesia dengan negara lain. Selain pertumbuhan domestik, peluang bisnis juga datang dari kebutuhan perusahaan global untuk data center interconnect, cross-border capacity leasing, dan permintaan akan redundansi jaringan yang andal. Meski investasi SKKL tergolong tinggi dan memerlukan waktu konstruksi yang panjang, potensi jangka panjangnya sangat besar karena kebutuhan bandwidth akan terus tumbuh setiap tahun. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, kemitraan internasional, dan lonjakan trafik digital, sektor SKKL diproyeksikan akan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dalam satu dekade ke depan.

Prospek usaha kontraktor Fiber To The Home (FTTH)

Prospek usaha kontraktor FTTH (Fiber To The Home) di Indonesia saat ini sangat menjanjikan dan diproyeksikan akan terus bertumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan industri terhadap koneksi internet berkecepatan tinggi serta transformasi digital yang semakin meluas. Perubahan gaya hidup digital, seperti kerja jarak jauh (remote working), pembelajaran daring, layanan hiburan berbasis streaming, hingga perkembangan teknologi smart home dan Internet of Things (IoT), semuanya membutuhkan jaringan internet yang stabil, cepat, dan berkapasitas besar - yang hanya dapat didukung oleh infrastruktur FTTH.

Dari sisi pasar, Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk dengan penetrasi *fixed broadband* yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia, sehingga ruang ekspansi masih sangat besar. Pemerintah juga mendorong pemerataan akses digital melalui berbagai program infrastruktur telekomunikasi dan digitalisasi daerah, yang membuka

peluang besar bagi perusahaan kontraktor untuk terlibat dalam pembangunan jaringan di kota-kota besar maupun wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, pertumbuhan kawasan perumahan baru, apartemen, kawasan industri, dan pusat bisnis yang membutuhkan jaringan FTTH sejak tahap konstruksi memberikan peluang kerja sama jangka panjang antara kontraktor, pengembang properti, dan penyedia layanan internet (ISP).

Secara bisnis, sektor kontraktor FTTH menawarkan potensi pendapatan berulang (recurring income) tidak hanya dari proyek pembangunan jaringan, tetapi juga dari layanan operasi, pemeliharaan, dan perluasan kapasitas jaringan di masa mendatang. Dengan meningkatnya persaingan antar-ISP yang berlomba menyediakan layanan berkualitas tinggi, permintaan terhadap jasa kontraktor profesional yang mampu membangun jaringan cepat, efisien, dan handal juga akan terus meningkat. Kombinasi antara permintaan pasar yang tinggi, dukungan kebijakan pemerintah, pertumbuhan infrastruktur digital, dan perkembangan teknologi telekomunikasi menjadikan bisnis kontraktor FTTH sebagai salah satu sektor strategis dengan prospek pertumbuhan jangka panjang yang kuat di Indonesia.

Prospek usaha *Fiber To The Home* (FTTH)

Prospek usaha penyediaan layanan *Fiber To The Home* (FTTH) di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah dalam beberapa tahun ke depan. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan internet cepat dan stabil untuk kegiatan seperti belajar daring, kerja jarak jauh, streaming, game online, hingga smart home, layanan berbasis fiber optik menjadi standar baru bagi konektivitas rumah tangga. Saat ini, meskipun penetrasi internet secara umum di Indonesia telah melampaui 80%, penetrasi layanan FTTH masih jauh lebih rendah — ini menciptakan ruang pertumbuhan yang sangat besar, terutama di luar kota-kota besar. Pulau Jawa memang sudah lebih padat dengan jaringan FTTH, namun peluang tetap terbuka di kota lapis kedua dan ketiga, serta di luar Jawa seperti Bali, NTB, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, yang saat ini masih dilayani oleh koneksi nirkabel atau tembaga.

G. STRATEGI

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa infrastruktur telekomunikasi, maka Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan layanan IP Transit Jakarta – Singapore

Perseroan melalui Entitas Anak, PFI, telah menjalin kerja sama strategis dengan PT Jejaring Mitra Persada (JMP) dalam proyek pengembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang menghubungkan Jakarta – Batam – Singapura. Kerja sama ini berbentuk perjanjian Indefeasible Right of Use (IRU), di mana PFI memperoleh hak penggunaan infrastruktur kabel bawah laut yang disediakan oleh JMP. Dalam kesepakatan tersebut, JMP bertanggung jawab menyediakan inti kabel serat optik (fiber optic core) serta melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pada jalur Rising-8, khususnya segmen Tanjung Pinggir (Batam) – Tanah Merah (Singapura).

Dengan adanya infrastruktur kabel bawah laut melalui PFI, Perseroan dapat mengambil pangsa pasar layanan konektivitas internasional dan memperluas lini bisnisnya meliputi:

- 2. IP Transit - menyediakan jalur konektivitas internet dari Indonesia ke jaringan global atau sebaliknya, lewat kabel laut milik PFI.**
- 3. Exchange Content (peering/Content Delivery) — memungkinkan pengiriman konten lokal atau internasional dengan latensi rendah menggunakan rute kabel laut.**

4. IPLC (International Private Leased Circuit) — layanan sirkuit khusus internasional untuk perusahaan atau institusi yang memerlukan koneksi privat langsung antar negara.

5. Pengembangan bisnis sebagai kontraktor FTTH di Pulau Jawa

Kontraktor FTTH (Fiber to the Home) di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, memiliki prospek yang sangat menjanjikan dengan strategi bisnis yang tepat. Salah satu strategi utama yang dilakukan oleh entitas anak Perseroan yaitu IAB adalah dengan berfokus pada segmen pasar yang spesifik dan belum banyak dijangkau pemain besar, seperti perumahan skala kecil sampai dengan menengah, kawasan suburban, dan desa digital. Di wilayah-wilayah ini, kebutuhan akan internet berkecepatan tinggi terus meningkat, namun infrastruktur jaringan internet masih minim. Dengan menawarkan jasa pembangunan jaringan *last-mile* - mulai dari penggelaran kabel, pemasangan perangkat optik, hingga instalasi ke rumah pelanggan - IAB dapat mengisi celah pasar yang luas ini. Strategi IAB lainnya adalah menjalin kemitraan dengan *Internet Service Provider* (ISP) lokal maupun nasional, baik dalam bentuk proyek borongan, *outsourcing* teknis, maupun kerja sama berbasis bagi hasil.

6. Pengembangan FTTH Wi-Fi 7 di Bali – Lombok

Pengembangan layanan FTTH (Fiber to the Home) dengan dukungan teknologi Wi-Fi 7 di kawasan Bali - Lombok merupakan langkah strategis yang sangat potensial untuk mengisi celah pasar konektivitas berkecepatan tinggi yang dilakukan Perseroan melalui entitas anak, GPI. Wilayah ini tidak hanya menjadi pusat pariwisata internasional, tetapi juga sedang tumbuh sebagai kawasan digital dan edukasi. Strategi utama yang diterapkan oleh GPI adalah menargetkan segmen premium dan produktif, seperti vila-vila mewah, coworking space, hotel, UMKM digital, hingga masyarakat urban kelas menengah yang meningkat. Dengan menawarkan layanan FTTH yang dikombinasikan dengan perangkat Wi-Fi 7 (yang mendukung kecepatan hingga 40 Gbps dan latensi ultra rendah), penyedia jasa dapat memosisikan diri sebagai penyedia koneksi "ultra-fast internet" yang siap mendukung aktivitas berat seperti 4K/8K streaming, VR/AR tourism, dan smart home/hospitality system. Untuk mendukung ekspansi cepat, strategi lain yang dilakukan oleh GPI adalah menjalin kerja sama dengan developer perumahan, pengelola properti pariwisata, dan penyedia infrastruktur lokal. Strategi model bundling juga bisa diterapkan, seperti paket FTTH + Wi-Fi 7 router + IoT Smart Home, atau paket bisnis digital untuk homestay dan restoran. Untuk mempercepat penetrasi pasar, promosi digital dan edukasi pelanggan soal keunggulan Wi-Fi 7 dibanding Wi-Fi 5/6 perlu dijalankan secara aktif. Dengan kombinasi teknologi mutakhir, pemilihan pasar yang tepat, kemitraan lokal, dan layanan purna jual yang unggul, pengembangan FTTH Wi-Fi 7 di Bali–Lombok bukan hanya menjanjikan secara finansial, tapi juga memperkuat transformasi digital kawasan wisata nasional ini.

7. Peningkatan kompetensi karyawan

Perseroan memandang bahwa sumber daya yang dimiliki merupakan suatu aset yang sangat vital dan strategis, oleh karenanya Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi karyawan baik secara teknis dengan keikutsertaan dalam acara-acara pengembangan kompetensi maupun secara non teknis yaitu peningkatan softskill karyawan dengan tujuan membangun tim yang solid dan efisien serta mampu

selalu berinovasi mengikut perkembangan dunia teknologi yang berkembang dengan sangat pesat.

8. Memberikan potongan harga

Perseroan memiliki program potongan harga bagi para pelanggan yang menggunakan jasa Perseroan dengan jumlah PO yang banyak. Perseroan melihat bahwa seluruh pelanggan merupakan mitra kerja yang mana dalam melayani pelanggan, Perseroan selalu menawarkan deal terbaik agar semua pihak dapat diuntungkan dalam kerjasama yang dibangun. Semakin besar jumlah layanan yang diorder dari Perseroan maka Perseroan memberikan potongan harga yang baik sehingga ISP selaku pelanggan Perseroan mendapatkan banyak manfaat bekerjasama dengan Perseroan.

9. Memperkuat positioning

Perseroan memiliki strategi yaitu memperkuat positioning sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi yang terkemuka dengan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh mitra yang menggunakan jasa Perseroan. Dalam jangka panjang strategi ini diharapkan dapat terus mempertahankan eksistensi Perseroan dan juga terus meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

9. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2025, 31 Desember 2024, dan 2023.

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain). Laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Juli 2025 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasi atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Ridho Fathoni, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1629 yang dalam laporannya No. 00427/2.1315/AU.1/05/1629-1/1/XII/2025 pada tanggal 4 Desember 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasi atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Dulgani, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 0165 yang dalam laporannya No. 00091/2.0119/AU.1/05/0165-1/1/III/2025 pada tanggal 27 Maret 2025. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasi atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dengan izin Akuntan Publik No. AP. 1023 yang dalam laporannya No. 00114/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 pada tanggal 8 April 2024, sebagaimana tercantum dalam laporan audit yang juga tercantum dalam Prospektus ini:

Keterangan	31 Juli 2025	31 Desember	
		2024	2023
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 10 per saham			
Modal dasar - 30.000.000.000 saham pada 31 Juli 2025 dan 10.000.000.000 saham pada 31 Desember 2024 dan 2023			
Modal ditempatkan dan disetor - 8.408.626.310 saham pada 31 Juli 2025, 7.500.067.714 saham pada 31 Desember 2024 dan 7.500.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023	84.086.263.100	75.000.677.140	75.000.000.000
Tambahan modal disetor - neto	207.106.785.120	133.514.991.658	133.509.506.824
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	3.600.000.000	3.300.000.000	3.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	14.404.165.777	4.093.625.646	3.065.266.726
Rugi komprehensif lainnya	(24.249.044)	(37.690.975)	(35.892.921)
Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	309.172.964.953	215.871.603.469	214.538.880.629
Kepentingan Nonpengendali	18.604.788	76.673	76.637
JUMLAH EKUITAS	309.191.569.741	215.871.680.142	214.538.957.266

Berdasarkan laporan kegiatan pelaksanaan waran pada 5 Agustus 2025 dari PT Ficomindo Buana Register, biro administrasi efek, Perusahaan telah melaksanakan waran Seri I sebanyak 908.626.310 saham. Sehingga, modal disetor pada tanggal 31 Juli 2025 menjadi Rp 84.086.263.100.

Berdasarkan RUPS Perusahaan diaktakan Notaris Moelina Santoso, S.H., M.Kn., No. 16 tanggal 27 Juli 2023, Perusahaan memperoleh peningkatan modal ditempatkan sebanyak 60.000.000.000 saham sehingga modal yang ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp 75.000.000.000 saham. Akta tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0143273.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Juli 2023.

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran kecuali hasil pelaksanaan Waran Seri I.

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I sejumlah 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) Saham Baru atau sebesar 57,14% (lima puluh tujuh koma satu empat persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD I dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 27 November 2025 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah).

Tabel berikut ini menggambarkan proforma posisi ekuitas pada tanggal 31 Juli 2025 apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I sebanyak 12.800.000.000 (dua belas miliar delapan ratus juta) dan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap Saham Baru ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 31 Juli 2025 pada Harga Pelaksanaan:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I	Pelaksanaan HMETD	Setelah PMHMETD I
Modal ditempatkan dan disetor penuh	84.086.263.100	128.000.000.000	212.086.263.100
Tambahan modal disetor – bersih	207.106.785.120	3.072.000.000.000	3.279.106.785.120
Saldo laba	17.979.916.733	-	17.979.916.733
Kepentingan nonpengendali	18.604.788	-	18.604.788
Jumlah Ekuitas	309.191.569.741	3.200.000.000.000	3.509.191.569.741

10. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam UUPT.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari laba bersih untuk tahun buku 2025. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Tabel berikut menyajikan riwayat dividen tunai yang telah dibagikan dan dibayarkan oleh Perseroan:

Tahun Buku	Rasio Dividen Tunai (Dividen payout ratio)	Total	Tanggal RUPS	Tanggal Pembayaran Dividen
2024	0,08%	Rp660.084.228,88	12 Juni 2025	8 Juli 2025

Tidak terdapat negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

11. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) ("UU No. 7/2021") dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("PP No. 55/2022"), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroa dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Dalam hal wajib pajak pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi kembali, atas semua dividen yang berasal dari dalam Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Wajib pajak pribadi dalam negeri tersebut wajib melakukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, pendapatan yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, dari penanaman modal yang termasuk di dalamnya dividen yang diterima dari perusahaan Indonesia yang tercatat, dikecualikan dari pajak.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Agar Wajib Pajak luar negeri tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka Wajib Pajak luar negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding*, yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 atau bank dan Wajib Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta Wajib Pajak luar negeri yang berbentuk Dana Pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/ Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama Wajib Pajak luar negeri; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT 1 atau Form-DGT 2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka Wajib Pajak luar negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pajak Penjualan Saham

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c dari UU PPh, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Keputusan Menteri Keuangan No. 81/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 *juncto* No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan cara pemungutan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai atau harga saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan atas saham pendiri tersebut dilakukan oleh perseroan (sebagai emiten) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.
Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam DPS perseroan terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*Initial Public Offering*).
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran tersebut seperti dijelaskan di butir 2 diatas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan Penyelenggara Bursa Efek. Yang dimaksud dengan "saham pendiri" adalah saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori "pendiri". Termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*); dan (ii) saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Tidak termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham; (ii) saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya; dan (iii) saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana.

<p>CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I</p>

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

12. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

12.1. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Yang bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

- a. **Nama Pembeli Siaga**
Pembeli Siaga adalah PT Abadi Kreasi unggul Nusantara.
- b. **Alamat Kantor Pembeli Siaga**
Pembeli Siaga beralamat di Gedung ARVA Lt.03, Jl. RP. Soeroso Blok BC, Jakarta Pusat.
- c. **Bidang Usaha**
Pembeli Siaga bergerak di bidang Perusahaan Holding
- d. **Status badan Hukum**
Pembeli Siaga berstatus badan hukum Perseroan terbatas (PT).
- e. **Susunan Pengurus dan pengawas**
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara No. 15 tanggal 28 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dethisyah Agrimerinda, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta , yang telah (i) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0119788 tanggal 4 Maret 2025, dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0050957.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 4 Maret 2025 ("Akta AKUN No. 15/2025"), adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Anugrah Dwi Setyanto

Dewan Komisaris:

Komisaris : Muhammad Arif

- f. **Struktur Permodalan**

Berikut merupakan struktur permodalan Pembeli Siaga:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	100.000.000	-
PT Satu Teknologi Tepat	42	42.000.000	64,6
Muhammad Arif	20	20.000.000	30,8
Setyanto Hantoro	3	3.000.000	4,6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65	65.000.000	100
Saham dalam portepel	35	35.000.000	-

- g. **Penerima manfaat**
Penerima Manfaat Utama / Ultimate Beneficiary Owner dari Pembeli Siaga adalah Bapak Adhie M Masardi.
- h. **Sumber dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga**
Sumber dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga adalah dana internal Pembeli Siaga.
- i. **Sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan**
Pembeli Siaga memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan yaitu sebagai Pemegang Saham Pengendali.
- j. **Keterangan mengenai porsi yang diambil**

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham porsi Publik maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No.1.329 tanggal 19 September 2025 yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, AKUN ("Pembeli Siaga") telah menyatakan sanggup menjadi Pembeli Siaga jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 5.652.377.067 (lima miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tujuh) saham pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp1.413.094.266.750,- (satu triliun empat ratus tiga belas miliar Sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

12.2. Uraian Singkat Perjanjian Pembeli Siaga

Berikut uraian singkat mengenai Perjanjian Pembeli Siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.329 tanggal 19 September 2025 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan AKUN di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan:

- Bahwa jika Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang HMETD tidak melaksanakan secara penuh HMETD mereka atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD sampai pada akhir Periode Perdagangan HMETD, Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang tidak dipesan tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang HMETD yang telah mengajukan Pemesanan Saham Tambahan;
- Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika setelah penawaran Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang HMETD dan Pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat Sisa Saham, maka Sisa Saham wajib dibeli oleh Pembeli Siaga sesuai dengan Komitmen Pembeli Siaga dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini, dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini dan dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku;
- Pembeli Siaga telah menyatakan sanggup menjadi Pembeli Siaga jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 5.652.377.067 (lima miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tujuh) saham pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp1.413.094.266.750,- (satu triliun empat ratus tiga belas miliar Sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

12.3. Persetujuan Dari Pihak Yang Berwenang

Pembeli Siaga tidak membutuhkan persetujuan dari pihak yang berwenang manapun terkait pelaksanaan pembelian sisa saham.

**PT ABADI KREASI UNGGUL NUSANTARA SEBAGAI PEMBELI SIAGA
MENYATAKAN SANGGUP MENJALANKAN KEWAJIBAN SEBAGAI PEMBELI
SIAGA DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS (PMHMETD I) INI.**

13. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

**KONSULTAN HUKUM
HANAFIAH PONGGAWA &
PARTNERS**

Wisma 46 – Kota BNI
4th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.1
Jakarta, 10220
Indonesia
P +62 21 5701837
F +62 21 5701835

STTD : STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama J Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A
Pedoman Kerja : Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM /XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukan : No. 54/SK/INET-DENTONS/IX/2025 tanggal 19 September 2025

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KAP Suharli, Sugiharto dan Rekan**

UOB Plaza 34th Floor
Jl. MH Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230

STTD KAP : STTD.KAP-25/PM-223/2020 tanggal 22 Desember 2020.
Nama Rekan : Ridho Fathoni, CPA
STTD AP : STTD.AP-55/PM.223/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan No.VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.
Surat Penunjukan : No. 37/SK/INET-KAP/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025

Tugas pokok akuntan publik dalam PMHMETD I ini adalah untuk Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

NOTARIS
MOHAMAD FAJRI MEKKA PUTRA,
SH.,M.Kn

SOHO Pancoran, Tower Splendor Unit
S-2512,
Jl. Letjen MT. Haryono, Kav. 2-3 Teber
Barat, Tebet, Jakarta Selatan

STTD : STTD.N-278/PM.223/2021 tanggal 17
Mei 2021
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja : Undang-undang No 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dan undang-
undang No 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-undang No 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan
Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan : No. 55/SK/INET-MFM/IX/2025 tanggal 19
September 2025

Tugas utama Notaris dalam PMHMETD I ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD I ini, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

BAE
PT FICOMINDO BUANA
REGISTRAR

Jl. Kyai Caringin No. 2-A
Jakarta 10150, Indonesia
Telepon: +62-21 2263 8327
Fax. +62-21 2263 9048

Surat Ijin : No. Kep-02/PM/BAE/2000
Asosiasi : ABI/IX/2014-10
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan
Asosiasi BAE Indonesia
Surat Penunjukan : No. 60/SK/INET-FBR/IX/2025 tanggal 22
September 2025

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD I ini, sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan DPS yang berhak HMETD, mendistribusikan HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Perseroan serta menyusun laporan PMHMETD I sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG TURUT SERTA DALAM PMHMETD I INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUP2SK.

14. TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar selaku BAE yang akan mengelola pelaksanaan administrasi dalam PMHMETD I Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.328 tanggal 19 September 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 1.267 tanggal 16 Oktober 2025 yang keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Persyaratan pemesanan dan pembelian saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru.

1. Pemesan yang berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Januari 2026 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru yang diterbitkan Perseroan dalam PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik 3 (tiga) Saham Lama memiliki 4 (empat) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa pada Harga Pelaksanaan.

Harga Pelaksanaan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah Pemegang saham Perseroan yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan tidak menjual/mengalihkan kepada pihak lain; dan

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan terdekat ke bawah, dan jika masih timbul pecahan maka akan menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

2. Distribusi HMETD, Formulir dan Prospektus

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 7 Januari 2026 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Perusahaan Efek dan Bank Kustodiannya setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal 7 Januari 2026 di kantor BAE dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 22 Januari 2026 dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI.

-
- 2) Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian kepada KSEI maka:
 - a) KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub-rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST; dan
 - b) Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk KSEI tersebut ke rekening bank khusus pada hari kerja berikutnya.
 - 3) Satu Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada Biro Administrasi Efek dokumen sebagai berikut:
 - a) Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (Nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b) Surat atau bukti pemindahbukuan Harga PMHMETD I yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI kedalam rekening bank khusus; dan
 - c) Instruksi untuk mendapatkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
 - 4) Segera setelah BAE menerima dari KSEI dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir a.iii di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahan uang sesuai Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus serta instruksi untuk menandatangani sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD.
 - 5) Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham yang telah melaksanakan HMETD miliknya dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- c. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan;
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 26 Januari 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang Saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada POJK 32/2015 selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE akan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah di cap dan ditandatangani, kepada pemesan untuk menjadi bukti pada saat mengambil Saham dan untuk pengembalian uang untuk pesanan yang tidak dipenuhi. Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

7. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam HMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran; dan
- c. Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen permohonan dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan sesuai dengan tata cara pengembalian uang pemesanan pada angka 8 di bawah ini

8. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah (sesuai dengan yang tercantum dalam FPPS Tambahan) pengembalian uang dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 28 Januari 2026.

Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 28 Januari 2026 tidak akan disertai bunga, apabila terjadi keterlambatan maka uang akan dikembalikan dengan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar 2% (dua persen) dari tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh: (i) kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan, (ii) pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan hari kerja ke-2 (dua) setelah Tanggal Penjatahan, (iii) atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan.

Pengembalian uang dilakukan dengan mata uang Rupiah dengan menggunakan cek atau pemindah bukuan ke rekening pemesan.

Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kyai Caringin No. 2-A

Jakarta 10150, Indonesia

Telepon: +62-21 2263 8327

Fax. +62-21 2263 9048

E-mail : helpdesk@ficomindo.com ; ficomindo_br@yahoo.co.id

dengan menunjukkan bukti jati diri Pemesan seperti KTP/Paspor/KITAS asli yang masih berlaku; fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga) dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham asli serta menyerahkan fotokopi bukti jati diri tersebut. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut.

9. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil PMHMETD I bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

10. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham porsi Publik maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No.1.329 tanggal 19 September 2025 yang dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, AKUN ("Pembeli Siaga") telah menyatakan sanggup menjadi Pembeli Siaga jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 5.652.377.067 (lima miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tujuh) saham pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp1.413.094.266.750,- (satu triliun empat ratus tiga belas miliar Sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

15. PENYEBARAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT HMETD DAN FORMULIR

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di *Website* Bursa dan *Website* Perseroan.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 7 Januari 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan HMETD atas nama pemegang saham.

HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan 22 Januari 2026 pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan di:

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kyai Caringin No. 2-A
Jakarta 10150, Indonesia
Telepon: +62-21 2263 8327
Fax. +62-21 2263 9048

E-mail : helpdesk@ficomindo.com ; ficomindo_br@yahoo.co.id

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 6 Januari 2026 belum menerima atau mengambil HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

16. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary* Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
Kantor Pusat :
Gedung Cyber 1, Lantai 10
Jl. Kuningan Barat No.8,
Jakarta Selatan 12710
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id